



KEMENTERIAN KEUANGAN RI

**KERANGKA EKONOMI MAKRO
DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL
TAHUN 2012**



KEMENTERIAN KEUANGAN RI

**KERANGKA EKONOMI MAKRO
DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL
TAHUN 2012**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kinerja Perekonomian 2010 dan Proyeksi 2011	1
B. Tantangan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2012	4
C. Asumsi Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012	6
BAB II KINERJA PEREKONOMIAN 2010 DAN PROYEKSI 2011	8
A. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL	8
1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia	8
2. Volume Perdagangan Dunia	12
B. PEREKONOMIAN DOMESTIK	18
1. Pertumbuhan Ekonomi	18
2. Nilai Tukar Rupiah	24
3. Laju Inflasi	27
4. Suku Bunga SBI dan SPN 3 Bulan	29
5. Harga dan Lifting Minyak	33
6. Neraca Pembayaran	37
7. Ketenagakerjaan dan Kemiskinan	40
BAB III TANTANGAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2012	43
A. TANTANGAN	43
1. Tantangan Perekonomian Global 2012	43
2. Tantangan Perekonomian Domestik	46

B.	SASARAN PEMBANGUNAN 2012	48
1.	Pertumbuhan Ekonomi	48
2.	Nilai Tukar	51
3.	Inflasi	52
4.	Suku Bunga SBI dan SPN 3 Bulan	53
5.	Harga dan <i>Lifting</i> Minyak	54
6.	Ketenagakerjaan dan Kemiskinan	55
 BAB IV POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2012		57
A.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL 2010 DAN PROYEKSI 2011	57
1.	Pendapatan Negara dan Hibah	61
2.	Belanja Negara	75
3.	Pembiayaan Anggaran	90
B.	ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2012	93
C.	ARAH KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2012	94
1.	Kebijakan Pendapatan Negara	96
2.	Kebijakan Belanja Negara	100
3.	Kebijakan Pembiayaan Anggaran	108
D.	RISIKO FISKAL	113
1.	Risiko Ekonomi Makro	113
2.	Risiko Utang Pemerintah Pusat	117
3.	Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat	118
4.	Desentralisasi Fiskal	123

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1 Pertumbuhan Ekonomi AS dan Negara Maju Asia.....	8
Grafik II.2 Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju Eropa	8
Grafik II.3 Pertumbuhan Ekonomi AS dan Negara Maju Di Asia	9
Grafik II.4 Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju Eropa	9
Grafik II.5 Pertumbuhan Ekonomi China dan ASEAN-5	9
Grafik II.6 Pertumbuhan di Kawasan Asia	10
Grafik II.7 Pertumbuhan Ekonomi ASEAN-5.....	10
Grafik II.8 Pertumbuhan Ekonomi Dunia	10
Grafik II.9 Volume Perdagangan Dunia	12
Grafik II.10 Total Perdagangan Negara Maju Eropa.....	13
Grafik II.11 Total Perdagangan Negara Maju Asia Pasifik.....	13
Grafik II.12 Perkembangan Neraca Perdagangan dan Inflasi Global	14
Grafik II.13 Total Perdagangan Cina dan India.....	15
Grafik II.14 Total Perdagangan ASEAN	15
Grafik II.15 Pertumbuhan Volume Perdagangan (Q1-Q4 2010)	15
Grafik II.16 Ekspor dan Impor Beberapa Negara Asia Tahun 2010.....	16
Grafik II.17 Pertumbuhan Ekspor Non Migas	17
Grafik II.18 Nilai Ekspor Komoditi Utama Indonesia.....	17
Grafik II.19 Sumber Pengeluaran PDB.....	18
Grafik II.20 Pertumbuhan PDB 2008-2011 (Persen, yoy)	21
Grafik II.21 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah 2007-2011	25
Grafik II.22 Perkembangan Inflasi 2007-2010	29
Grafik II.23 Perkembangan Inflasi Tahunan (yoy) Berdasarkan Komponen.....	29
Grafik II.24 SBI 3 Bulan, Suku Bunga Acuan dan Inflasi 2007-2011	30
Grafik II.25 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	32
Grafik II.26 Kapitalisasi Pasar	32
Grafik II.27 Perkembangan Produksi Minyak Dunia.....	34
Grafik II.28 Perkembangan Konsumsi Minyak Dunia.....	34

Grafik II.29 Perkembangan Harga Minyak Dunia.....	36
Grafik II.30 <i>Lifting</i> Minyak (ribu barel per hari).....	37
Grafik II.31 Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran 2004 - 2010	40
Grafik II.32 Komposisi Lapangan Kerja tahun 2010 – 2011 (persen).....	41
Grafik II.33 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan 2004 - 2010.....	42
Grafik III.1 Neraca Transaksi Berjalan (Miliar US\$)	45
Grafik III.2 Investasi Langsung Netto	46
Grafik III.3 Arus Portofolio Swasta, netto	46
Grafik III.4 Perkembangan dan Proyeksi Nilai Tukar 2005 – 2012	52
Grafik III.5 Perkembangan dan Proyeksi Inflasi 2005 – 2012 (Persen).....	53
Grafik IV.1 Perkembangan Defisit Tahun 2005-2011.....	58
Grafik IV.2 Komposisi Penerimaan Dalam Negeri.....	62
Grafik IV.3 Grafik Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2005 s.d. 2011	63
Grafik IV.4 Penerimaan Pajak Triwulan I Tahun 2010-2011	67
Grafik IV.5 Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Triwulan I Tahun 2010-2011	68
Grafik IV.6 Perkembangan Bea Keluar dan Harga Referensi CPO Tahun 2010-2011.....	68
Grafik IV.7 Perkembangan PNBPN Tahun 2005 - 2011	73
Grafik IV.8 Realisasi PNBPN Triwulan I, 2010 - 2011.....	74
Grafik IV.9 Perkembangan Belanja Negara Tahun 2005 – 2011	76
Grafik IV.10 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2005 - 2011.....	76
Grafik IV.11 Perkembangan Subsidi Tahun 2005-2011	78
Grafik IV.12 Perkembangan Transfer ke Daerah Tahun 2005-2011.....	79
Grafik IV.13 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Triwulan I Tahun 2010 dan 2011	82
Grafik IV.14 Realisasi Belanja Subsidi Triwulan I Tahun 2010 dan 2011	82
Grafik IV.15 Realisasi Transfer Ke Daerah Triwulan I Tahun 2010-2011.....	86
Grafik IV.16 Perkembangan Anggaran Kemiskinan terhadap Tingkat Kemiskinan.....	87
Grafik IV.17 Perkembangan Anggaran Infrastruktur terhadap Tingkat Pengangguran..	88
Grafik IV.18 Perkembangan Anggaran Pendidikan terhadap Belanja Negara	89
Grafik IV.19 Perkembangan Anggaran Kesehatan terhadap Belanja Negara.....	90
Grafik IV.20 Perkembangan Pembiayaan APBN Tahun 2005-2011	91
Grafik IV.21 Perkembangan Posisi Utang Pemerintah Tahun 2005-2011	92
Grafik IV.22 Realisasi Pembiayaan Triwulan I Tahun 2010 dan 2011	93
Grafik IV.23 Proyeksi Interval Harga Minyak Mentah WTI (USD/barel)	116

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Laju Pertumbuhan PDB Sektoral 2007 – 2010.....	20
Tabel II.2 Perkiraan Pertumbuhan Komponen PDB 2011 (persen)	23
Tabel II.3 Laju Pertumbuhan dan Struktur PDB Sektoral	24
Tabel II.4 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran.....	28
Tabel II.5 Neraca Pembayaran Indonesia, 2007 – 2011 (miliar USD).....	38
Tabel III.1 Pertumbuhan Ekonomi Berbagai Kawasan (% YOY).....	44
Tabel III.2 Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia (% YOY)	45
Tabel III.3 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi 2012	48
Tabel III.4 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral 2012	50
Tabel IV.1 Ringkasan APBN Tahun 2009-2011 (Triliun Rupiah)	61
Tabel IV.2 Asumsi Ekonomi Makro 2010-2012	94

BAB I

PENDAHULUAN

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2012 pada dasarnya merupakan sebuah acuan sekaligus landasan bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2012. Selain itu, KEM-PPKF disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari Pemerintah kepada rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 157 ayat 2 UU 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Secara substansi, penyusunan KEM-PPKF Tahun 2012 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, yang merupakan perwujudan implementatif jangka pendek dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014. Selain itu, substansi KEM-PPKF Tahun 2012 juga senantiasa memperhatikan berbagai perkembangan terkini kinerja perekonomian dan keuangan baik dalam dimensi global maupun domestik.

Dalam RPJM 2010-2014 sendiri, Pemerintah telah menitikberatkan strategi pembangunan nasional pada penataan kembali Bangsa Indonesia di segala bidang, khususnya pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan kemampuan ilmu terapan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Selain itu, Pemerintah juga terus berupaya meletakkan dasar-dasar pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) melalui penguatan sektor manufaktur, pertanian, kelautan serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara efektif, efisien, dan sebesar-besarnya dipergunakan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

A. Kinerja Perekonomian 2010 dan Proyeksi 2011

Pemulihan ekonomi global yang berlangsung sejak pertengahan tahun 2009 terus berlanjut di sepanjang tahun 2010. Bahkan, pada tahun 2010 kinerja perekonomian global sudah mampu berekspansi dan menciptakan nuansa optimisme bagi masyarakat

dunia. Perbaikan ekonomi global tahun 2010 terutama ditopang oleh semakin membaiknya performa ekonomi baik pada negara maju maupun negara berkembang. Untuk negara maju (*advanced economies*), pertumbuhan ekonomi tahun 2010 mencapai 3,0 persen setelah pada tahun sebelumnya masih berkontraksi sebesar 3,4 persen. Sedangkan untuk negara-negara berkembang, ekonomi pada tahun 2010 mampu berakselerasi pada level 7,3 persen atau jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2009 yang sebesar 2,7 persen.

Seiring membaiknya ekonomi global, kinerja perekonomian Indonesia sepanjang 2010 juga semakin membaik dan sesuai ekspektasi Pemerintah di awal tahun. Stabilitas ekonomi makro di sepanjang tahun 2010 juga relatif terjaga sebagaimana tercermin dari pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang relatif stabil dan laju inflasi yang relatif terkendali. Lebih dari itu, sesungguhnya telah terjadi momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2010 lalu dimana pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1 persen atau meningkat jika dibandingkan pencapaian dua tahun sebelumnya.

Sejalan dengan terjaganya stabilitas dan terciptanya akselerasi ekonomi, kinerja berbagai indikator baik di sektor finansial maupun sektor riil di sepanjang 2010 juga terus menunjukkan penguatan secara konsisten. Di sektor finansial, penguatan terutama disebabkan derasnya arus masuk modal asing (*capital inflow*) ke pasar ekuitas dan pasar obligasi yang mengindikasikan bahwa kini Indonesia sudah layak menjadi negara tujuan investasi. Untuk pasar ekuitas, tingginya arus masuk dana asing menyebabkan IHSG menguat secara signifikan sebesar 46,13 persen di tahun 2010. Kenaikan IHSG ini tercatat sebagai salah satu kenaikan indeks tertinggi di kawasan Asia Pasifik.

Sementara itu, di pasar obligasi, tingginya arus masuk dana asing terindikasi dari posisi total (*outstanding*) dana asing per Desember 2010 yang mencapai Rp195,8 triliun atau sekitar 30,5 persen dari posisi total Surat Berharga Negara (SBN) Domestik yang sebesar Rp641,2 triliun. Sebagai perbandingan, kontribusi (*share*) dana asing pada tahun 2009 hanya sekitar 18,6 persen. Tingginya minat investor asing pada instrumen SBN telah meningkatkan posisi tawar (*bargaining power*) pemerintah, sehingga imbal hasil (*yield*) atas SBN pada tahun 2010 menjadi yang terendah di sepanjang sejarahnya.

Ini artinya, beban pembiayaan (*cost of financing*) dalam emisi SBN yang ditanggung APBN pun semakin murah.

Penguatan sektor finansial juga terlihat dari kinerja perbankan. Hingga Desember 2010, penyaluran kredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara tahunan masing-masing tumbuh sebesar 22,8 persen dan 18,5 persen. Sejalan hal ini, rata-rata rasio penyaluran kredit terhadap DPK (*Loan to Deposit Ratio/LDR*) mencapai 75,5 persen. Ini merupakan suatu pencapaian yang cukup tinggi serta berkontribusi positif terhadap geliat sektor riil dan pertumbuhan ekonomi. Hal yang membanggakan, tingginya penyaluran kredit ini tetap disertai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan penerapan manajemen risiko yang baik sehingga rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) pun terjaga pada level rendah yaitu 2,8 persen.

Sedangkan dari perspektif sektor riil, penguatan kinerja ekonomi 2010 terutama ditopang oleh perbaikan kinerja investasi dan ekspor impor. Untuk kinerja investasi, pada tahun 2010 mampu tumbuh cukup tinggi 8,5 persen atau meningkat jika dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 3,3 persen. Sedangkan, untuk ekspor impor, pada tahun 2010 sudah mampu berekspansi pada level masing-masing 14,9 persen dan 17,3 persen atau jauh lebih baik dibandingkan tahun 2009 yang mengalami kontraksi pada tingkat 9,7 persen dan 15,0 persen. Sementara itu, untuk konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah pada tahun 2010 tumbuh masing-masing 4,6 persen dan 0,3 persen.

Dari sisi sektoral (*supply-side*), pada tahun 2010 seluruh sektor ekonomi mencatatkan pertumbuhan positif dengan tiga sektor yang mengalami akselerasi pertumbuhan yaitu Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Sektor Keuangan; dan Sektor Industri Pengolahan dimana masing-masing tumbuh 8,7 persen; 5,7 persen; dan 4,5 persen. Sedangkan, sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 13,5 persen. Hal ini terutama didorong oleh meningkatnya penggunaan telepon seluler dan internet serta naiknya jumlah penumpang pesawat udara secara signifikan di sepanjang tahun 2010.

Dari perspektif fiskal, kinerja fiskal tahun 2010 juga menunjukkan hasil yang baik dan sesuai harapan Pemerintah. Ini tercermin dari realisasi penerimaan negara yang melampaui targetnya dalam APBN Perubahan 2010. Perbaikan kinerja fiskal lainnya

tercermin dari rasio utang terhadap PDB yang kini cenderung terus menurun. Jika dalam tahun 2005, *debt-to-GDP ratio* masih berkisar 48 persen, dalam tahun 2010 ini berkisar 26 persen. Ini berarti, tingkat produktivitas dari utang selama ini cukup tinggi dan mampu menciptakan skala ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan nilai entitas utang tersebut. Hal ini pada gilirannya telah meningkatkan sustainabilitas APBN dan menciptakan ruang gerak fiskal yang semakin besar dalam membiayai kegiatan pembangunan nasional.

Memasuki tahun 2011, Pemerintah optimis bahwa perekonomian akan berjalan lebih baik dan semakin prospektif. Tingkat pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan akan terus berakselerasi pada level yang semakin tinggi. Hal ini didorong oleh membaiknya kinerja investasi, perdagangan internasional, konsumsi pemerintah, maupun konsumsi masyarakat. Kondisi perekonomian global yang semakin kondusif juga akan memberikan sentimen positif terhadap pencapaian kinerja ekonomi Indonesia tahun 2011 khususnya dari sisi penguatan kinerja ekspor dan investasi.

Sementara itu, terjaganya stabilitas ekonomi makro secara berkesinambungan juga diyakini akan semakin meningkatkan kepercayaan internasional terhadap perekonomian Indonesia yang pada gilirannya akan memberikan nilai tambah terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, pertumbuhan ekonomi tahun 2011 diperkirakan sebesar 6,5 persen.

B. Tantangan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2012

Pada tahun 2012, ekonomi global diperkirakan memasuki fase akseleratif pada level yang semakin tinggi. Berbagai negara khususnya negara-negara berkembang di kawasan Asia (*developing Asia*) dewasa ini tengah berada dalam tahapan transformasi dari pemulihan menuju pertumbuhan yang tinggi dan berkesinambungan melalui penguatan stabilitas ekonomi. Hal ini tercermin dari penguatan produktivitas industri, perbaikan kinerja perdagangan internasional, dan peningkatan daya beli masyarakat.

Bagi Indonesia, perkembangan positif ekonomi global tahun 2012 tentu menjadi momentum positif dalam menjalankan roda perekonomian sekaligus melaksanakan pembangunan nasional. Atas dasar hal ini, Pemerintah optimis bahwa kinerja ekonomi

tahun 2012 akan melaju pada level semakin tinggi pada kisaran 6,5 – 6,9 persen. Guna mendukung pencapaian pertumbuhan ini, Pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis seperti peningkatan kompetensi industri domestik, penguatan skema kerjasama pembiayaan investasi dengan swasta, perbaikan kinerja perdagangan internasional, penguatan konsumsi masyarakat, dan perbaikan iklim investasi baik di sektor keuangan maupun sektor riil. Selain itu, Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas ekonomi baik dari sisi harga (inflasi) maupun nilai tukar dalam rangka memberikan kepastian usaha bagi pelaku bisnis dan masyarakat.

Sebagai pendorong tercapainya pertumbuhan tinggi di tahun 2012, Pemerintah telah menetapkan sasaran pembangunan dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur di berbagai sektor baik yang ada di perdesaan maupun perkotaan. Beberapa sektor infrastruktur tersebut diantaranya sektor energi dan ketenagalistrikan, sektor transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan sumber daya air bersih. Guna mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai sektor tersebut, Pemerintah akan mengupayakan peningkatan dukungan pembiayaan baik dari sisi perbankan, non-perbankan, pasar modal, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan belanja modal baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun BUMD.

Meskipun kinerja perekonomian tahun 2012 semakin prospektif, namun tetap perlu diwaspadai adanya sejumlah tantangan. Dari sisi global, beberapa tantangan tahun 2012 diantaranya laju pemulihan ekonomi global yang tidak merata, derasnya arus modal asing, krisis utang Eropa, kebijakan pengetatan likuiditas Cina, perang mata-uang global (*currency war*), dan meningkatnya harga komoditas dunia khususnya minyak. Peningkatan harga minyak dunia bisa disebabkan oleh faktor fundamental yaitu peningkatan permintaan (*demand*) yang melebihi tingkat pasokannya (*supply*) maupun faktor non-fundamental seperti krisis politik di Timur Tengah saat ini.

Selama ini, melonjaknya harga minyak telah menciptakan efek menular (*contagion effect*) pada harga-harga komoditas lainnya yang juga ikut melambung khususnya dari sektor energi. Ini berarti, akan memberikan dampak negatif pada inflasi domestik. Inflasi yang melambung tinggi dan tidak terkendali tentu dapat mendistorsi kinerja ekonomi karena mereduksi daya beli masyarakat. Selain itu, hal ini juga berpotensi

mengganggu kinerja industri karena menciptakan biaya produksi yang menjadi semakin mahal seiring dengan kenaikan suku bunga dan upah buruh sehingga menjadikan harga barang ekspor menjadi tidak kompetitif di pasar global.

Sedangkan dari sisi domestik, salah satu tantangan tahun 2012 adalah perlunya dilakukan perbaikan terhadap iklim investasi dalam rangka meningkatkan kinerja investasi langsung (*Foreign Direct Investment*). Untuk mendukung hal tersebut, akan terus dievaluasi dan dilakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap semua aspek terkait seperti prosedur bisnis, hukum, perpajakan, pengadaan tanah, kinerja birokrasi, kondisi infrastruktur, maupun substansi regulasi terkait lainnya. Khusus dalam hal peningkatan kondisi infrastruktur, pembangunan infrastruktur tahun 2012 akan dilakukan dengan penekanan pada peningkatan kualitas sistem jaringan infrastruktur yang mampu menghubungkan antarwilayah (*domestic connectivity*) secara lebih efektif dan efisien serta menjamin tersedianya pasokan barang hingga ke wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia. Selain itu, pembangunan infrastuktur juga diorientasikan pada sektor energi seperti penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Sejalan dengan peningkatan iklim investasi tersebut, pada tahun 2012 Pemerintah juga perlu melakukan revitalisasi terhadap industri domestik dalam rangka meningkatkan nilai utilisasi sekaligus mendorong industri pada tingkat efisiensi tinggi agar mampu bersaing secara global yang pada gilirannya akan meningkatkan akses penciptaan lapangan pekerjaan.

C. Asumsi Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012

Memajukan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan tugas utama Pemerintah sebagai penyelenggara negara. Untuk mewujudkan hal tersebut secara optimal, salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah adalah menjaga stabilitas ekonomi makro secara berkesinambungan dalam rangka memberikan kepastian terhadap segenap komponen masyarakat khususnya pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Dengan mendasarkan pada perkembangan terkini ekonomi dan keuangan baik dalam dimensi domestik maupun global serta memperhatikan proyeksinya pada satu tahun mendatang, asumsi ekonomi makro dalam APBN Tahun 2012 ditetapkan sebagai berikut: (i) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,5 – 6,9 persen; (ii) Inflasi 3,5 – 5,5 persen; (iii) Suku Bunga SPN 3 Bulan 5,5 – 7,5 persen; (iv) Nilai Tukar Rupiah 9.000 – 9.300 per dolar AS; (v) Harga Minyak Indonesia 75 - 95 US dolar per barel; (vi) Lifting Minyak 950 - 970 ribu barel per hari.

Asumsi ekonomi makro yang telah disusun Pemerintah selanjutnya menjadi basis dalam penyusunan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2012 dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Dari sisi kebijakan, substansi APBN dan kebijakan fiskal pada tahun 2012 pada dasarnya akan diarahkan pada 3 (tiga) hal, yaitu: (i) Mendukung kegiatan pembiayaan infrastruktur untuk menggalakkan kegiatan investasi, dunia usaha, sekaligus menjaga kelancaran arus distribusi barang; (ii) Meningkatkan jangkauan pelayanan dengan memberikan prioritas pada pemanfaatan energi terbarukan setempat untuk daerah remote area (terpencil), tertinggal, dan terluar; dan (iii) Menjamin keamanan pasokan energi yang dicapai melalui upaya-upaya untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi produksi dan optimasi produksi. Selain itu, kebijakan fiskal tahun 2012 juga diarahkan untuk mendorong berbagai kebijakan dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam rangka perluasan akses lapangan pekerjaan sekaligus mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Terkait dengan kebijakan di bidang infrastruktur, kebijakan fiskal akan diarahkan untuk tiga hal, yaitu: (1) Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimum dalam rangka mempercepat peningkatan keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh masyarakat; (2) Mendorong peningkatan daya saing sektor riil dalam rangka menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi yang pada gilirannya bisa meningkatkan daya saing produk nasional; dan (3) Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah dan pihak swasta melalui skema *Public Private Partnership (PPP)* dalam rangka meningkatkan peran swasta dalam pembangunan nasional.

BAB II

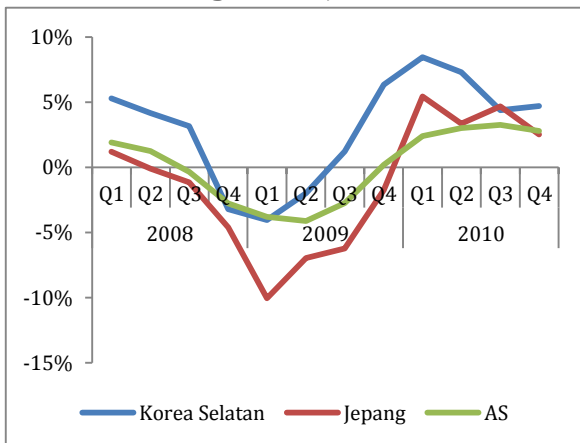
KINERJA PEREKONOMIAN 2010 DAN PROYEKSI 2011

A. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL

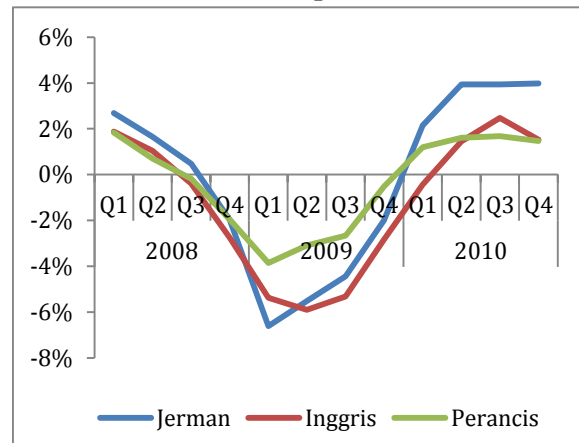
1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Di tahun 2010, fase pemulihan ekonomi dunia semakin terasa. Perbaikan pertumbuhan ekonomi terjadi baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Sebagian besar negara-negara maju telah meninggalkan laju pertumbuhan negatif sejak kuartal pertama tahun 2010 dan berlanjut hingga kuartal-kuartal berikutnya. Di tahun 2010 perekonomian negara maju tumbuh sebesar 3,0 persen, setelah mengalami kontraksi sebesar 3,4 persen di tahun sebelumnya.

Grafik II.1
Pertumbuhan Ekonomi AS dan Negara Maju Asia



Grafik II.2
Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju Eropa



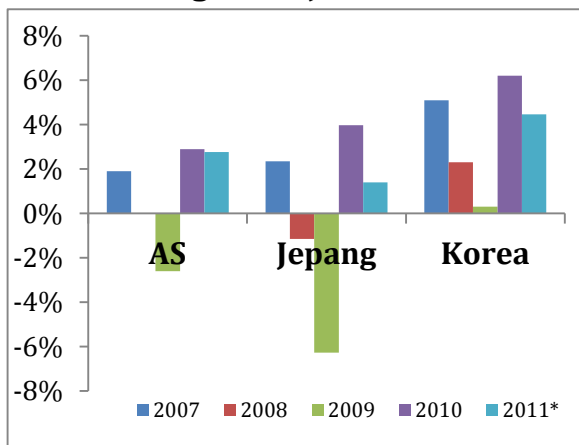
Sumber: Bloomberg, April 2011

Setelah mengalami pertumbuhan ekonomi negatif di tahun 2009, negara maju di kawasan Asia Pasifik yang juga merupakan mitra dagang penting Indonesia yaitu Amerika Serikat dan Jepang mampu kembali mencapai pertumbuhan ekonomi positif di tahun 2010 masing-masing sebesar 2,9 persen dan 4,0 persen, serta Korea Selatan

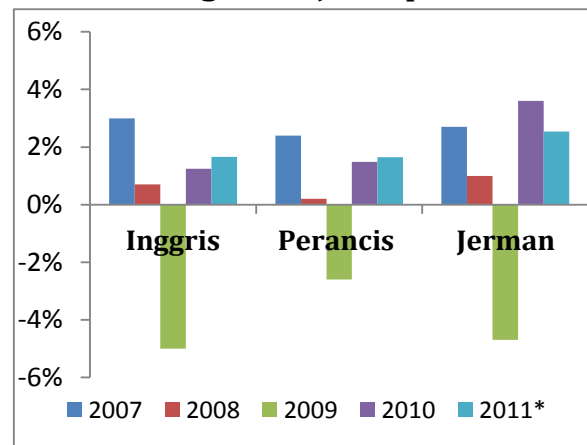
tumbuh sebesar 6,2 persen. Selama empat triwulan berturut-turut di tahun 2010, ekonomi Amerika, Korea Selatan dan Jepang selalu tumbuh positif.

Senada dengan yang terjadi pada ekonomi negara-negara maju Asia Pasifik, pertumbuhan ekonomi negara-negara maju di kawasan Eropa juga mengalami tren positif di tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi Jerman, Perancis, dan Inggris dalam empat kuartal 2010 selalu positif setelah pada tahun sebelumnya selalu mengalami pertumbuhan negatif. Hingga akhir tahun 2010 perekonomian Jerman, Perancis dan Inggris tumbuh masing-masing sebesar 3,6 persen, 1,5 persen, dan 1,3 persen.

Grafik II.3
Pertumbuhan Ekonomi AS dan Negara Maju Di Asia



Grafik II.4
Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju Eropa

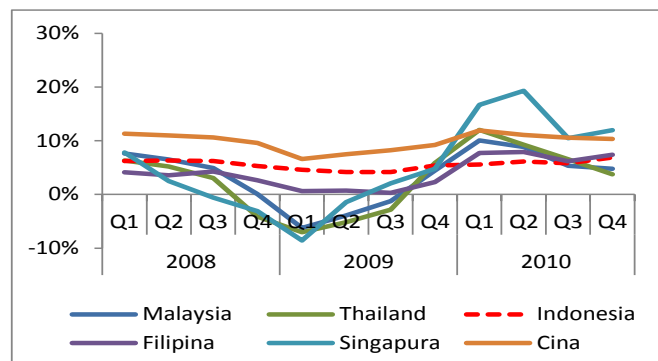


Sumber: WEO, April 2011

Perekonomian negara-negara berkembang telah menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding negara-negara maju.

Setelah mengalami perlambatan yang signifikan di tahun 2009, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang kembali berakselerasi di tahun 2010 hingga mencapai pertumbuhan sebesar 7,3 persen. Dalam kaitan ini, negara-negara berkembang di kawasan Asia telah menjadi kekuatan utama

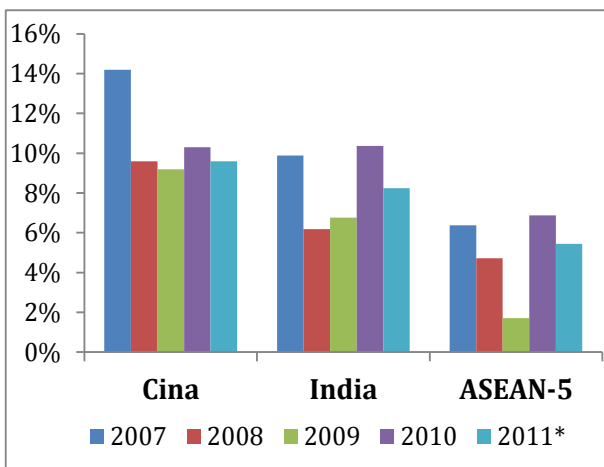
Grafik II.5
Pertumbuhan Ekonomi China dan ASEAN-5



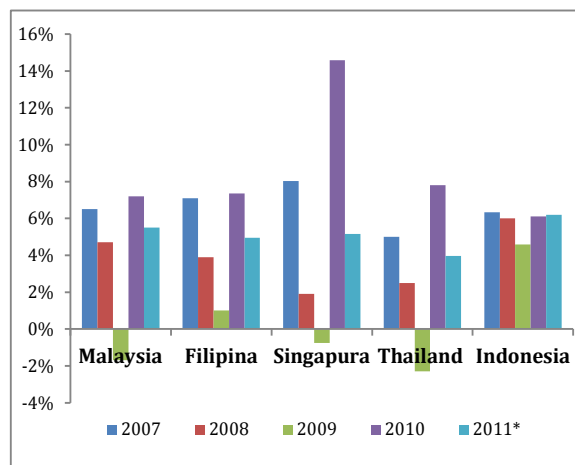
Sumber: Bloomberg, 2011

pemulihan perekonomian dunia. Ketika krisis ekonomi global terjadi dan berimbas pada pertumbuhan negatif yang dialami oleh Amerika dan Eropa, kawasan Asia masih tetap mampu mencapai pertumbuhan ekonomi positif. Di tahun 2010, negara-negara berkembang di kawasan tersebut tumbuh sebesar 9,5 persen dengan Cina dan India sebagai pendorong utama. Kokohnya perekonomian dua negara tersebut tercermin pada pertumbuhannya yang tetap tinggi ketika krisis terjadi pada tahun 2009. Untuk tahun 2010 Cina mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 10,3 persen dan India sebesar 10,4 persen.

Grafik II.6
Pertumbuhan di Kawasan Asia



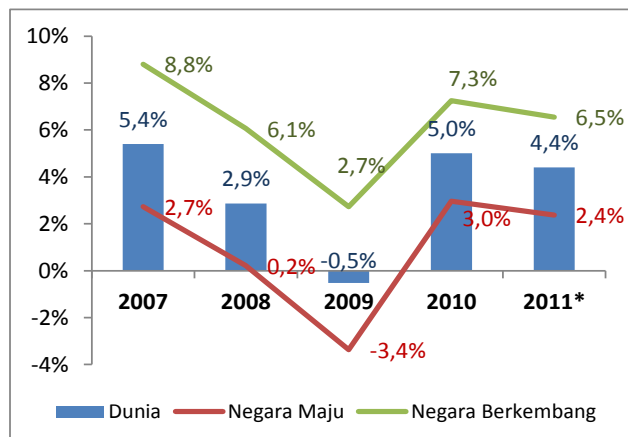
Grafik II.7
Pertumbuhan Ekonomi ASEAN-5



Sumber: WEO, April 2011

Untuk kawasan ASEAN, Indonesia dan Filipina merupakan dua negara yang memiliki daya tahan relatif baik terhadap krisis global 2008 - 2009. Kedua negara ini mampu menjaga pertumbuhannya tetap positif di tengah kontraksi yang terjadi pada negara-negara lain di kawasan ini, maupun di belahan dunia lainnya. Di tahun 2010, ekonomi Indonesia dan Filipina tumbuh masing-masing sebesar 6,1 persen dan 7,4 persen. Sedangkan bagi ketiga negara ASEAN-5 lainnya yaitu Singapura,

Grafik II.8
Pertumbuhan Ekonomi Dunia



Sumber: WEO April 2011

Thailand, dan Malaysia, perekonomiannya juga tumbuh positif sebesar 14,6 persen, 7,8 persen dan 7,2 persen di tahun 2010, setelah pada tahun sebelumnya ketiga negara ini mengalami kontraksi ekonomi sebagai imbas dari krisis global.

Di tahun 2011, pertumbuhan ekonomi negara-negara maju diperkirakan akan tetap positif namun sedikit melambat dibandingkan tahun 2010. Amerika Serikat akan tumbuh sebesar 2,8 persen, Jepang 1,4 persen, dan Korea 4,5 persen. Sementara di kawasan Eropa, perekonomian Jerman dan Inggris diprediksi akan tumbuh masing-masing sebesar 2,5 persen sedangkan Perancis 1,7 persen. Krisis utang yang masih mendera beberapa negara kawasan Eropa akan turut mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut di tahun 2011. Dengan sedikit melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara maju di tahun 2011, maka pertumbuhan ekonomi global di tahun 2011 diperkirakan sebesar 4,4 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2010.

Perekonomian Asia masih akan menjadi yang terbaik di dunia pada tahun 2011, meskipun laju pertumbuhannya juga diperkirakan akan sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Cina dan India akan kembali menjadi motor penggerak utama ekonomi Asia, kedua negara tersebut akan tumbuh masing-masing sebesar 9,6 persen dan 8,2 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi juga akan dialami oleh negara-negara utama di kawasan ASEAN yang diprediksi masih akan tumbuh sebesar 5,4 persen di tahun 2011.

Perbaikan kondisi ekonomi diberbagai belahan dunia mendasari pemulihan perekonomian global di tahun 2010. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi positif yang dicapai negara-negara dunia yang sempat mengalami kontraksi akibat krisis global yang terjadi pada tahun 2008 - 2009. Setelah mengalami kontraksi sebesar 0,5 persen di tahun 2009, pada tahun 2010 perekonomian global tumbuh sebesar 5,0 persen, dan diperkirakan tumbuh 4,4 persen di tahun 2011. Walaupun telah terjadi peningkatan pertumbuhan namun belum cukup kuat mengurangi tingkat pengangguran.

2. Volume Perdagangan Dunia

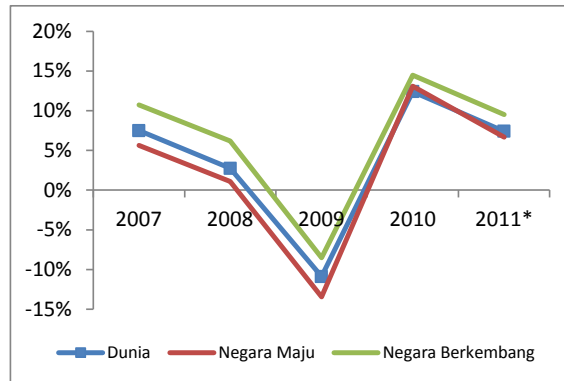
Peran perdagangan antar negara dalam perekonomian dan pertumbuhan global semakin penting. Globalisasi dan perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk mendapatkan pasar yang lebih luas sehingga terbuka peluang bagi industri untuk tumbuh lebih cepat dibanding bila negara tersebut hanya bertumpu pada pasar domestik. Namun demikian, meningkatnya peluang tersebut diiringi

pula dampak negatif, seperti semakin mudahnya gejolak global menyebar ke ekonomi domestik dan persaingan di pasar domestik yang lebih meningkat. Dengan menyadari hal-hal tersebut, kebijakan ekonomi perlu dikelola untuk mengoptimalkan peluang dari fenomena globalisasi tersebut serta mengantisipasi tekanan terhadap ekonomi domestik. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi global tercermin pula pada perkembangan dan intensitas perdagangan internasional. Selanjutnya perkembangan pola dan intensitas perdagangan perlu dicermati untuk dapat dimanfaatkan sebagai peluang oleh para pelaku pasar dalam negeri dan juga strategi kebijakan ekonomi.

Sebagaimana yang terjadi dengan pertumbuhan ekonomi global, perkembangan volume perdagangan dunia dalam periode 2007 hingga 2010 menunjukkan dampak tekanan krisis yang cukup berat di tahun 2009. Pertumbuhan volume perdagangan dunia yang mencapai 7,5 persen di tahun 2007 mulai melambat hingga hanya tumbuh 2,7 persen di tahun 2008. Dampak krisis global yang cukup parah di tahun 2009, menyebabkan penurunan permintaan dan daya beli global secara signifikan hingga menyeret laju pertumbuhan volume perdagangan ke tingkat minus 10,9 persen.

Sebagaimana yang terjadi dengan pertumbuhan ekonomi global, perkembangan volume perdagangan dunia dalam periode 2007 hingga 2010 menunjukkan dampak tekanan krisis yang cukup berat di tahun 2009. Pertumbuhan volume perdagangan dunia yang

Grafik II.9
Volume Perdagangan Dunia

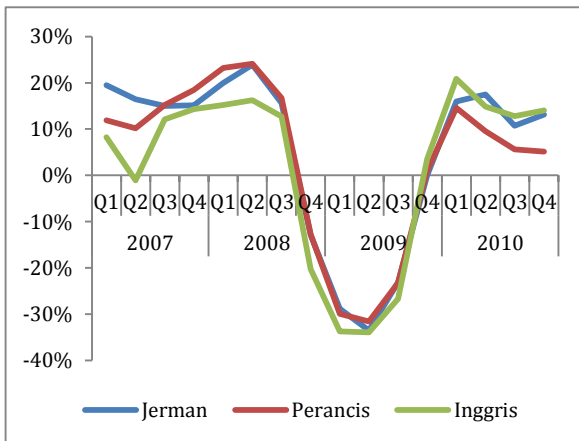


Sumber: WEO April 2011

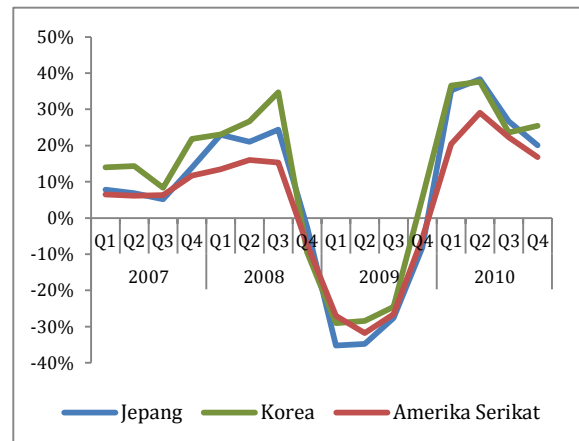
mencapai 7,5 persen di tahun 2007 mulai melambat hingga hanya tumbuh 2,7 persen di tahun 2008. Dampak krisis global yang cukup parah di tahun 2009, menyebabkan penurunan permintaan dan daya beli global secara signifikan hingga menyeret laju pertumbuhan volume perdagangan ke tingkat minus 10,9 persen.

Pemulihan ekonomi global yang mulai terlihat di tahun 2010 juga mendorong pertumbuhan aktivitas dan volume perdagangan dunia hingga tumbuh 12,4 persen. Pertumbuhan yang sangat tinggi tersebut tidak disebabkan oleh pulihnya daya beli ekonomi global secara penuh, melainkan lebih disebabkan kontraksi yang dalam di tahun 2009.

Grafik II.10
Total Perdagangan Negara Maju Eropa



Grafik II.11
Total Perdagangan Negara Maju Asia Pasifik

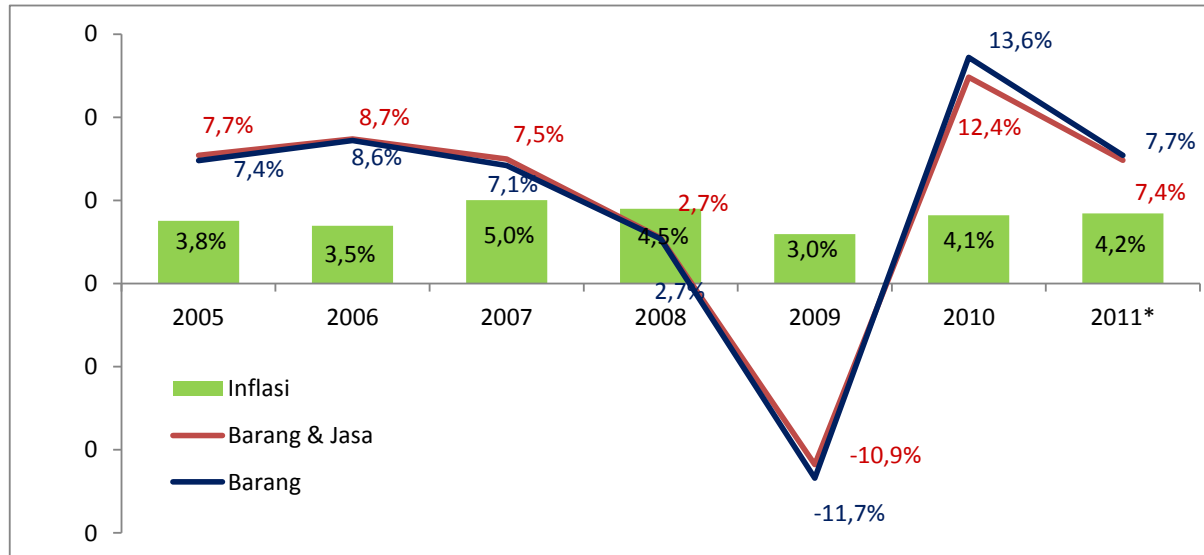


Sumber: CEIC April 2011, diolah

Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2011 tetap positif yang didukung oleh proyeksi pertumbuhan volume perdagangan seiring dengan meningkatnya permintaan dunia. Volume perdagangan dunia diperkirakan tetap meningkat di tahun 2011 namun lebih lambat bila dibandingkan 2010. Membaiknya permintaan dunia antara lain tercermin pada peningkatan laju inflasi global. Pertumbuhan volume perdagangan barang dan jasa diperkirakan akan melambat dari 12,4 persen di 2010 menjadi 7,4 persen di tahun berikutnya, sementara volume perdagangan barang melambat dari 13,6 persen menjadi 7,7 persen (lihat **Grafik II.12**). Peningkatan aktivitas perdagangan akan lebih terlihat di negara-negara berkembang yang tumbuh sekitar 9,5 persen, sementara volume perdagangan negara-negara maju tumbuh 5,6 persen. Pertumbuhan volume

perdagangan tertinggi diperkirakan akan terjadi di negara-negara berkembang Asia, yang diperkirakan tumbuh sekitar 13 persen.

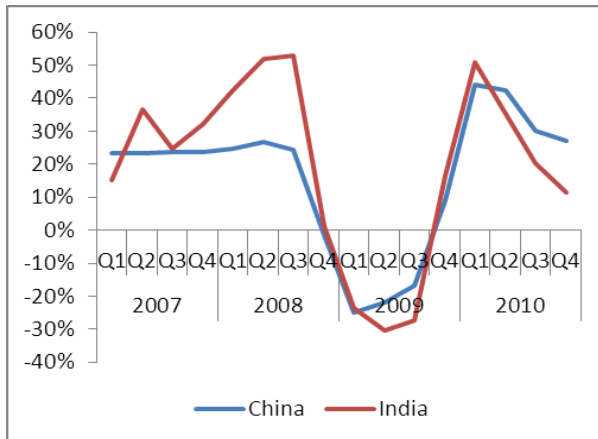
Grafik II.12
Perkembangan Neraca Perdagangan dan Inflasi Global



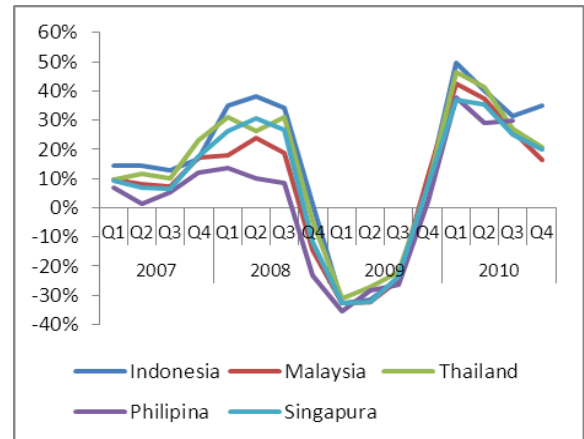
Sumber: WEO, Apr 2011

Pemulihan volume perdagangan terlihat sejak kuartal pertama 2010, dengan laju pertumbuhan perdagangan yang jauh lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya. Di antara negara-negara maju utama, Jepang dan Amerika Serikat yang masih mengalami pertumbuhan negatif di kuartal keempat 2009, telah mencatat pertumbuhan volume perdagangan positif di kuartal pertama 2010. Secara umum laju pertumbuhan volume perdagangan di negara-negara maju relatif lebih rendah dibanding negara-negara berkembang, khususnya negara berkembang di kawasan Asia. Di kuartal-kuartal berikutnya, pola pertumbuhan volume perdagangan di berbagai kawasan menunjukkan tren yang sama, yaitu pertumbuhan yang masih positif namun dengan laju pertumbuhan yang semakin menurun. Secara kumulatif selama tiga kuartal pertama 2010, pertumbuhan volume perdagangan tertinggi terjadi di negara-negara berkembang Asia, termasuk Indonesia, sementara pertumbuhan terendah terjadi di kawasan Eropa.

Grafik II.13
Total Perdagangan Cina dan India

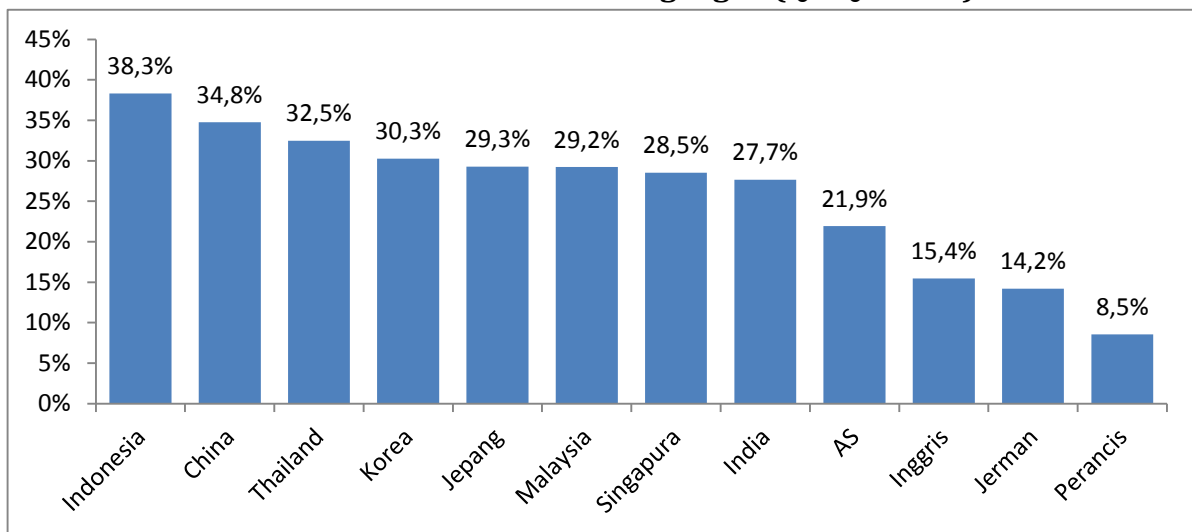


Grafik II.14
Total Perdagangan ASEAN



Sumber : CEIC April 2011, diolah

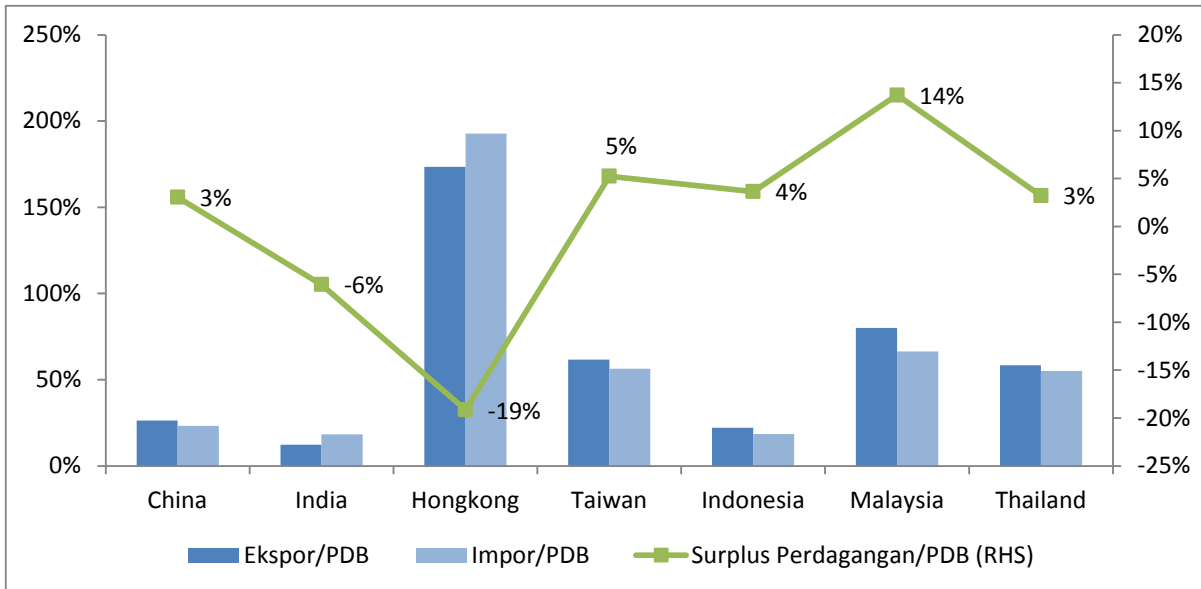
Grafik II.15
Pertumbuhan Volume Perdagangan (Q1-Q4 2010)



Sumber: WEO, April 2011

Di kawasan Asia, tantangan aktivitas perdagangan diperkirakan muncul sebagai dampak kebijakan pengetatan moneter Cina untuk mengatasi inflasi di negara tersebut. Dampak perlambatan ekonomi Cina diperkirakan akan mempengaruhi ekspor beberapa negara disekitarnya, khususnya Hongkong, Thailand, Malaysia, dan Taiwan. Keempat negara tersebut merupakan negara dengan peran ekspor yang cukup besar di dalam PDB-nya. Ekspor dan impor beberapa negara Asia dapat dilihat pada **grafik II.16** di bawah ini.

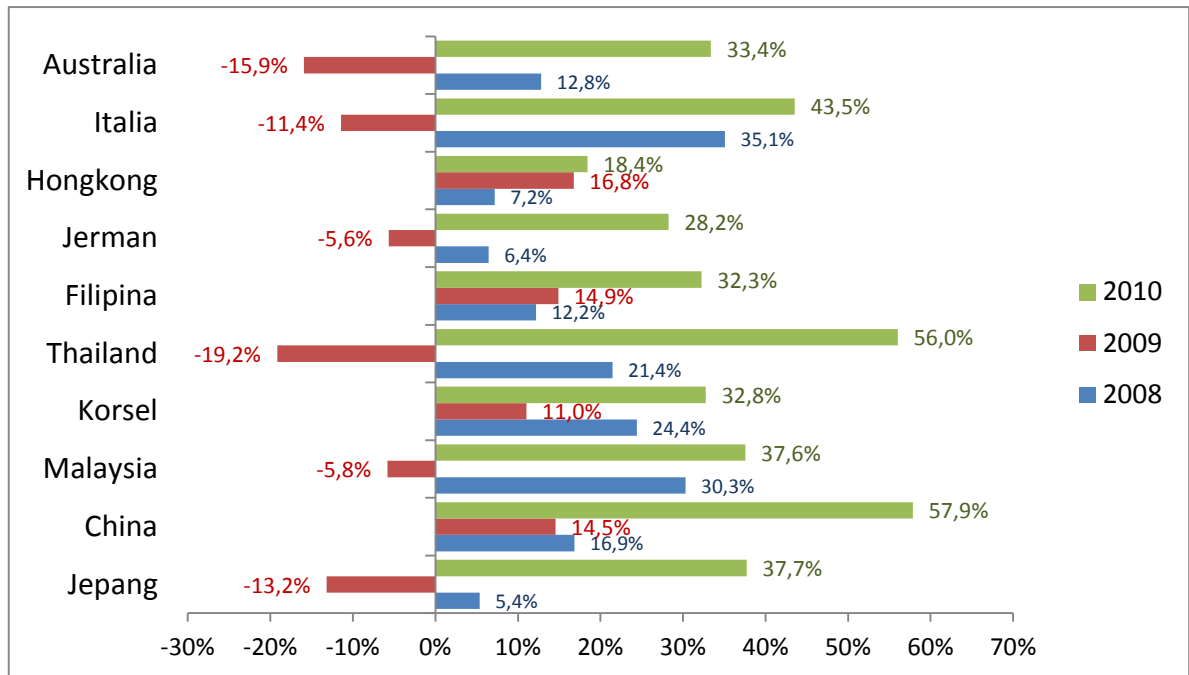
Grafik II.16
Ekspor dan Impor Beberapa Negara Asia Tahun 2010
 (persentase terhadap PDB)



Sumber: CEIC

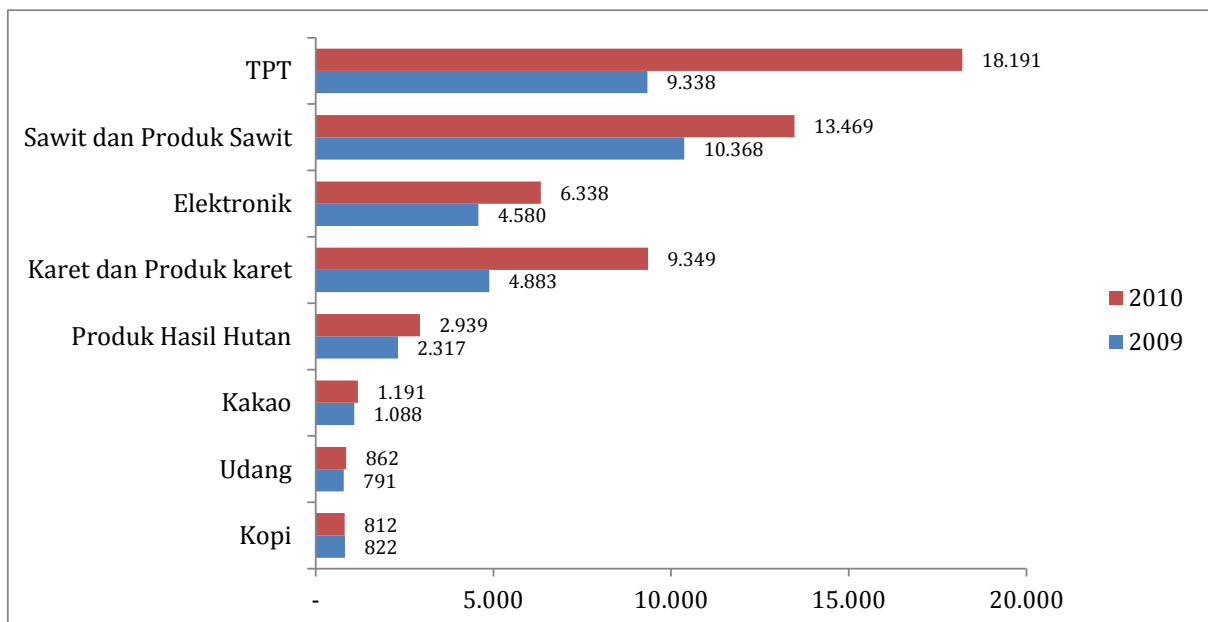
Pemulihan kondisi ekonomi di beberapa negara tujuan utama pasar ekspor Indonesia juga merupakan faktor yang sangat mendukung peningkatan ekspor Indonesia pada tahun 2010. Setelah mengalami pelemahan di tahun 2009, ekspor nonmigas Indonesia ke 10 negara tujuan utama memperlihatkan peningkatan signifikan. Kinerja ekspor ke negara-negara tersebut bahkan meningkat lebih tinggi dari tahun 2008, sebelum krisis. Beberapa negara tersebut merupakan negara tujuan utama ekspor Indonesia seperti Jepang meningkat sebesar 37,7 persen, Cina naik 57,9 persen, Jerman 28,2 persen dan Australia 33,4 persen serta beberapa negara ASEAN menguat sebesar 32 persen - 56 persen.

Grafik II.17
Pertumbuhan Ekspor Non Migas
(Januari-Desember 2008-2010)



Sumber: CEIC, diolah

Grafik II.18
Nilai Ekspor Komoditi Utama Indonesia
(Juta USD)



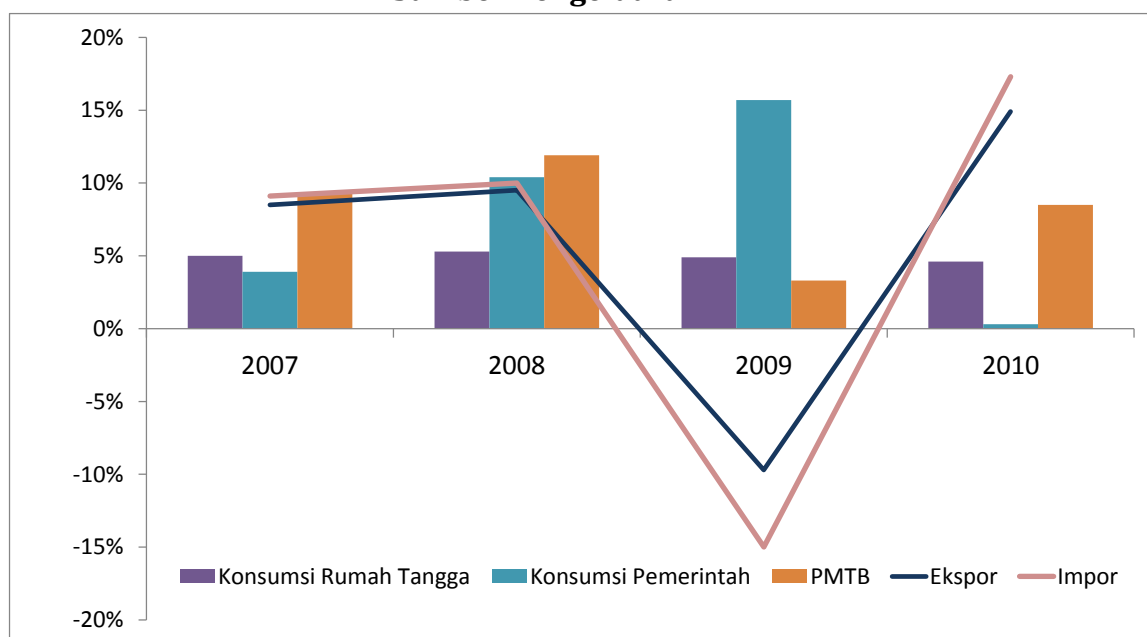
Sumber: CEIC, diolah

B. PEREKONOMIAN DOMESTIK

1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian nasional pada tahun 2010 menunjukkan kondisi yang cukup baik sebagai kelanjutan pemulihan ekonomi dari krisis keuangan global tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 tumbuh sebesar 6,1 persen (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,6 persen (yoy) dan mampu lebih tinggi dari tahun 2008 yaitu sebesar 6,0 persen (yoy). Peningkatan ini ditandai dengan membaiknya kinerja investasi dan sektor eksternal. Kinerja investasi pada tahun 2009 hanya mampu tumbuh sebesar 3,3 persen (yoy) kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi sebesar 8,5 persen seiring dengan membaiknya iklim investasi global dan tetap kuatnya fundamental ekonomi domestik. Sementara itu, ekspor dan impor yang pada tahun 2009 mengalami kontraksi masing-masing sebesar 9,7 persen dan 15,0 persen (yoy), pada tahun 2010 mulai pulih masing-masing tumbuh sebesar 14,9 persen (yoy) dan 17,3 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 juga didukung oleh pertumbuhan konsumsi masyarakat yang mencapai 4,6 persen dan konsumsi pemerintah sebesar 0,3 persen (Grafik II.19).

Grafik II.19
Sumber Pengeluaran PDB



Sumber: Badan Pusat Statistik

Konsumsi rumah tangga tahun 2010 (4,6 persen) tumbuh lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2008 (5,3 persen) dan 2009 (4,9 persen) karena masih belum pulihnya daya beli masyarakat dan adanya tekanan inflasi di tahun 2010. Untuk menahan laju penurunan konsumsi masyarakat tersebut, pemerintah melanjutkan beberapa kebijakan, antara lain program beras miskin (raskin), program keluarga harapan (PKH), pelayanan kesehatan masyarakat (Yankesmas), bantuan operasional sekolah (BOS), dan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM).

Konsumsi pemerintah hanya mampu tumbuh sebesar 0,3 persen (*yoy*), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 15,7 persen, karena pada tahun 2009 terdapat pencairan anggaran yang cukup besar sebagai antisipasi untuk mengurangi dampak krisis global (program stimulus fiskal) dan terdapat pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden.

Investasi mampu tumbuh cukup kuat dari 3,3 persen menjadi 8,5 persen (*yoy*) didukung oleh meningkatnya kegiatan produksi karena membaiknya aktivitas global dan permintaan domestik. Tingginya pertumbuhan investasi tersebut tercermin dari meningkatnya impor barang modal, penjualan semen, dan PMA-PMDN.

Dari sisi perdagangan internasional, kegiatan ekspor dan impor tahun 2010 telah mengalami pemulihan. Ekspor dan impor masing-masing tumbuh 14,9 persen dan 17,3 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 9,7 persen dan 15,0 persen. Pulihnya kinerja perdagangan internasional didorong oleh ekspor dan impor barang yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan ekspor impor jasa.

Dari sisi penawaran, kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2010 menunjukkan hal yang menggembirakan. Seluruh sektor ekonomi mencatat pertumbuhan positif, bahkan tiga diantaranya mengalami akselerasi dibanding pertumbuhan pada tahun 2009 (lihat tabel II.1). Ketiga sektor tersebut adalah Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran serta Sektor Keuangan. Sementara itu sektor Pengangkutan dan Komunikasi merupakan sektor yang tetap mengalami pertumbuhan tertinggi. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan.

Tabel II.1
Laju Pertumbuhan PDB Sektorial 2007 – 2010
 (persen, YoY)

LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN			
	2007	2008	2009	2010
1. PERTANIAN, PETERNAKAN,	3,5	4,8	4,0	2,9
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	1,9	0,7	4,4	3,5
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	4,7	3,7	2,2	4,5
4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH	10,3	10,9	14,3	5,3
5. KONSTRUKSI	8,5	7,6	7,1	7,0
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	8,9	6,9	1,3	8,7
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	14,0	16,6	15,5	13,5
8. KEUANGAN, REAL ESTAT & JASA PERSH.	8,0	8,2	5,1	5,7
9. JASA - JASA	6,4	6,2	6,4	6,0
PRODUK DOMESTIK BRUTO	6,3	6,0	4,6	6,1

Sumber: BPS

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi tumbuh sebesar 13,5 persen. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh Subsektor Komunikasi yang tumbuh 18,1 persen karena meningkatnya penggunaan telepon seluler dan internet. Subsektor lainnya yang tumbuh dua digit yakni Subsektor Angkutan Udara sebesar 19,0 persen yang didorong oleh meningkatnya jumlah penumpang dan rute penerbangan.

Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan tumbuh 2,9 persen, melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2009 sebesar 4,0 persen. Melambatnya pertumbuhan sektor tersebut lebih banyak disebabkan oleh pengaruh gangguan cuaca dan bencana alam terutama di kuartal III tahun 2010 sehingga produksi pertanian mengalami penurunan. Hal ini terlihat pada Subsektor Tanaman Bahan Makanan yang pada tahun 2009 mampu tumbuh 5,0 persen, pada tahun 2010 hanya tumbuh sebesar 1,8 persen.

Hal yang berbeda terjadi pada Sektor Industri Pengolahan yang pada tahun 2010 mengalami akselerasi dan tumbuh 4,5 persen, jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 2,2 persen. Subsektor Industri Migas memang turun sebesar minus 2,3 persen, namun penurunan tersebut mampu diimbangi oleh Subsektor Industri Bukan Migas yang tumbuh 5,1 persen. Pertumbuhan Subsektor Nonmigas lebih banyak ditopang oleh pertumbuhan industri alat angkutan, mesin dan perlengkapannya, industri pupuk, kimia dan barang dari karet serta industri makanan,

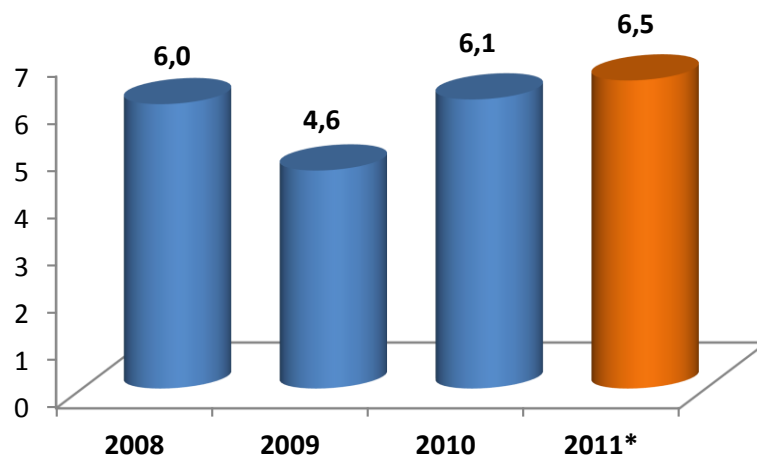
minuman dan tembakau yang masing-masing tumbuh sebesar 10,4 persen, 4,7 persen dan 2,7 persen.

Sektor lain yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 8,7 persen. Pertumbuhan ini juga menjadikan sektor tersebut sebagai sektor dengan akselerasi tertinggi dibanding sektor lainnya mengingat pertumbuhannya pada tahun 2009 yang hanya sebesar 1,3 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran yang tumbuh sebesar 9,7 persen.

Memasuki tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal ini didorong oleh membaiknya kinerja ekspor, investasi, dan relatif stabilnya konsumsi masyarakat. Peningkatan perekonomian global dan volume perdagangan dunia telah mendorong meningkatnya kinerja ekspor Indonesia.

Sementara itu, dengan terkendalinya laju inflasi dan meningkatnya keyakinan konsumen terhadap perekonomian nasional akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, kinerja investasi diharapkan akan tumbuh lebih tinggi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2011 diperkirakan sebesar 6,5 persen (Grafik II.20).

Grafik II.20
Pertumbuhan PDB 2008-2011 (Persen, yoy)



Sumber: BPS dan Kemenkeu

PDB Indonesia dalam triwulan I-2011 mengalami pertumbuhan sebesar 6,5 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 5,6 persen (yoy). Dari sisi penggunaan, pertumbuhan PDB antara lain didukung oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang naik sebesar 4,5 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,9 persen (yoy). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didorong oleh meningkatnya konsumsi non makanan yang tumbuh sebesar 5,3 persen dan konsumsi makanan sebesar 3,4 persen.

Konsumsi pemerintah tumbuh 3,0 persen (yoy) sebagai akibat dari masih rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi di awal tahun. Pada triwulan I-2011 belanja barang hanya tumbuh 2,9 persen dan belanja pegawai tumbuh 6,3 persen.

PMTB tumbuh sebesar 7,3 persen (yoy), sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan kuartal I tahun 2010 yang mencapai 8,0 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya investasi jenis mesin dan perlengkapan asing sebesar 22,8 persen serta investasi jenis alat angkutan domestik sebesar 9,9 persen. Investasi jenis bangunan yang merupakan komponen terbesar penyusun PMTB (86 persen) tumbuh 5,3 persen.

Ekspor dan impor pada triwulan I-2011 masing-masing tumbuh 12,3 persen dan 15,6 persen (yoy), melambat dibanding pertumbuhan triwulan I-2010 yang sebesar 20,0 persen dan 22,6 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya ekspor-impor barang masing-masing sebesar 12,4 persen dan 17,0 persen, sedangkan ekspor-impor jasa tumbuh 11,5 persen dan 11,2 persen.

Perkembangan positif yang terjadi dalam triwulan I-2011 diharapkan akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2011. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, laju pertumbuhan PDB tahun 2011 diperkirakan sebesar 6,5 persen (yoy). Angka perkiraan tersebut didukung oleh meningkatnya sumber-sumber pertumbuhan, yaitu pengeluaran konsumsi masyarakat sebesar 4,9 persen, konsumsi pemerintah sebesar 5,1 persen, PMTB sebesar 9,5 persen, serta ekspor dan impor yang masing-masing diperkirakan tumbuh sebesar 14,1 persen dan 17,3 persen (lihat tabel II.2.).

Tabel II.2
Perkiraan Pertumbuhan Komponen PDB 2011 (persen)

Pengeluaran	2011
Konsumsi Masyarakat	4,9
Konsumsi Pemerintah	5,1
PMTB	9,5
Ekspor	14,1
Impor	17,3
PDB	6,5

Sumber: Kementerian Keuangan

Dari sisi sektoral, semua sektor ekonomi pada triwulan I-2011 mengalami peningkatan, sebagian sektor bahkan tercatat mengalami akselerasi pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh Sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Kenaikan tajam yang terjadi di Subsektor Angkutan Udara dan Subsektor Komunikasi mendorong sektor tersebut mampu tumbuh sebesar 13,8 persen (yoy).

Dua sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja yakni Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan tumbuh cukup kuat. Sektor Pertanian tumbuh 3,4 persen (yoy) yang didorong oleh peningkatan Subsektor Tanaman Perkebunan dan Subsektor Perikanan yang masing-masing tumbuh sebesar 6,1 persen dan 5,6 persen. Sedangkan Subsektor Kehutanan mengalami kontraksi sebesar 0,4 persen.

Sedangkan Sektor Industri Pengolahan tumbuh sebesar 5,0 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada kuartal I tahun 2010 yang sebesar 3,9 persen (yoy). Subsektor Migas berkontraksi sebesar 3,8 persen, namun penurunan tersebut mampu ditutupi oleh kinerja pertumbuhan Subsektor Industri Nonmigas yang tumbuh 5,8 persen. Industri Nonmigas yang mengalami peningkatan tajam yakni industri logam dasar, besi dan baja yang tumbuh sebesar 18,2 persen dan industri tekstil, barang kulit dan alas kaki sebesar 10,4 persen.

Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran kali ini meskipun melambat tetapi masih tumbuh cukup tinggi sebesar 7,9 persen yang utamanya didorong oleh pertumbuhan

Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Subsektor Hotel masing-masing sebesar 8,3 persen dan 8,8 persen.

Tabel II.3
Laju Pertumbuhan dan Struktur PDB Sektoral
(persen, yoy)

LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN		STRUKTUR	
	2010	2011*	2010	2011*
1. PERTANIAN, PETERNAKAN,	2,9	3,7	15,3	15,0
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	3,5	3,9	11,2	10,9
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	4,5	4,9	24,8	24,3
4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH	5,3	6,5	0,8	0,8
5. KONSTRUKSI	7,0	8,0	10,3	10,6
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	8,7	8,6	13,7	13,6
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	13,5	13,3	6,5	6,7
8. KEUANGAN, REAL ESTAT & JASA PERSH.	5,7	5,9	7,2	7,2
9. JASA - JASA	6,0	6,0	10,2	10,8
PRODUK DOMESTIK BRUTO	6,1	6,5	100	100

Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan

Hingga akhir tahun 2011, diperkirakan akan terjadi peningkatan disemua sektor dimana Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, serta Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran masih tetap menjadi penopang utama perekonomian nasional. Hal ini terkait dengan meningkatnya permintaan domestik seiring dengan membaiknya perekonomian global. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan diharapkan lebih tinggi daripada tahun 2010 dan tumbuh 4,9 persen. Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan diperkirakan mampu tumbuh setidaknya di level 3,7 persen. Sementara itu, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran diperkirakan akan tumbuh sebesar 8,6 persen.

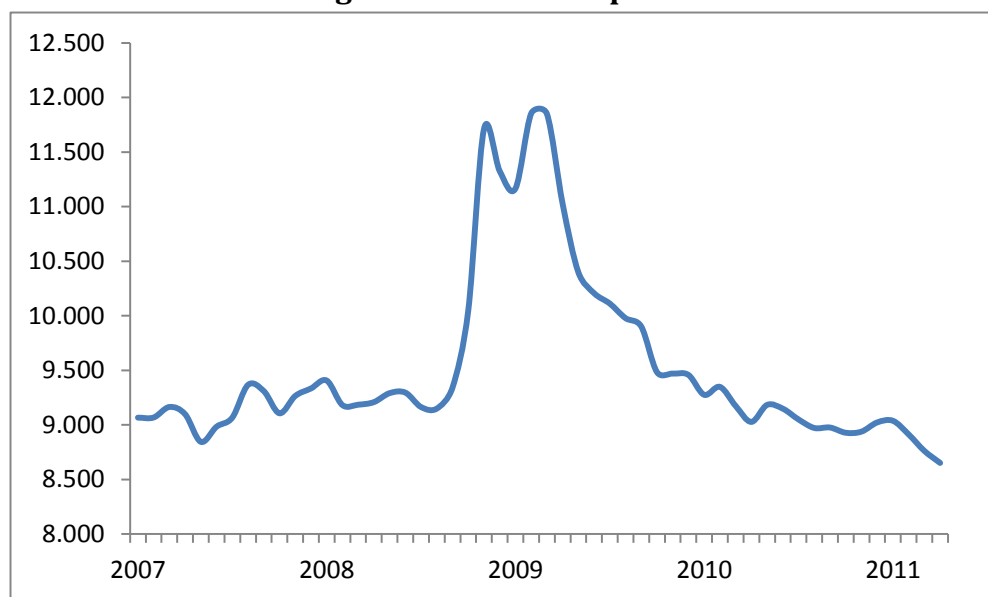
Sektor lain yang diperkirakan akan tumbuh signifikan adalah Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 13,3 persen. Hal ini terutama didukung oleh semakin menariknya penggunaan pesawat komersil sebagai alat transportasi dan meningkatnya intensitas kegiatan komunikasi melalui ponsel dan internet.

2. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sepanjang tahun 2007-2010 bergerak fluktuatif. Pada tahun 2007, rata-rata nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp9.139 per dolar AS, terapresiasi sebesar 0,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga akhir

September 2008, nilai tukar rupiah masih bergerak relatif stabil pada kisaran Rp 9.246 per dolar AS. Pada triwulan keempat 2008, nilai tukar rupiah merosot tajam pada kisaran Rp11.002 per dolar AS, bahkan sempat menyentuh level terendah Rp12.650 pada 24-25 November 2008, terendah sejak tahun 2005. Hingga triwulan pertama 2009, pelemahan nilai tukar rupiah masih berlanjut sebagai dampak lanjutan memburuknya krisis keuangan global yang terjadi sejak triwulan keempat tahun 2008. Namun sejak April 2009, nilai tukar rupiah kembali menunjukkan tren penguatan hingga mencapai rata-rata Rp9.458 per dolar AS pada akhir tahun 2009.

Grafik II.21
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah 2007–2011



Sumber: Bank Indonesia

Penguatan nilai tukar rupiah yang dimulai sejak tahun 2009 terus berlanjut hingga triwulan I tahun 2011. Proses pemulihan ekonomi global yang terus berlangsung, yang dimotori oleh pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia, serta semakin kuatnya fundamental ekonomi domestik yang tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekspor dan investasi telah mendorong apresiasi rupiah. Sentimen positif penguatan rupiah juga ditopang oleh masih menariknya investasi dalam rupiah serta meningkatnya *rating* Indonesia satu *notch* di bawah *investment grade*. Kuatnya fundamental ekonomi domestik tersebut mendorong meningkatnya arus aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik serta menjadikan pergerakan rupiah relatif stabil dengan kecenderungan menguat. Setelah sempat mengalami tekanan pada

bulan Mei 2010 terkait dengan krisis utang dan defisit fiskal yang melanda beberapa negara kawasan Eropa, rupiah kembali mengalami pembalikan tren pada bulan-bulan berikutnya. Pada paruh pertama tahun 2010, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp9.193 per dolar AS, mengalami apresiasi sebesar 17,0 persen dibanding periode yang sama tahun 2009 sebesar Rp11.083 per dolar AS. Tren penguatan tersebut berlanjut hingga enam bulan terakhir tahun 2010, dengan rata-rata sebesar Rp8.982 per dolar AS. Secara tahunan, nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil pada kisaran Rp9.087 per dolar AS, terapresiasi 12,69 persen dibanding tahun sebelumnya.

Pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menjaga volatilitas nilai tukar rupiah melalui penguatan sinergi kebijakan moneter dan fiskal, penerapan kebijakan moneter yang berhati-hati serta pengawasan lalu lintas devisa. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar dan mencegah volatilitas yang berlebihan serta menjaga kecukupan cadangan devisa untuk memenuhi kebutuhan fundamental perekonomian. Di samping itu, peningkatan efektivitas peraturan dan monitoring lalu lintas devisa terus dilakukan untuk menopang kebijakan moneter tersebut. Di tingkat internasional dan regional, komitmen untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan perjanjian kerja sama bidang keuangan semakin memperkuat upaya pemulihan ekonomi global dan regional. Masih menariknya imbal hasil surat berharga juga menjadi daya tarik bagi masuknya arus modal asing ke negara-negara *emerging market* termasuk Indonesia.

Nilai tukar rupiah pada tahun 2011 terus mengalami penguatan terhadap dolar AS. Sampai dengan akhir April tahun 2011, rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp8.841 per dolar AS, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp9.206 per dolar AS. Nilai tukar rupiah sepanjang periode tersebut terus menguat dan menembus angka Rp8.574 pada akhir April 2011. Diperkirakan penguatan ini akan terus berlanjut di tahun 2011, seiring dengan masih tingginya arus modal masuk yang terjadi baik di pasar ekuitas maupun pasar obligasi. Selain itu meningkatnya ekspor dan investasi langsung (FDI) sejalan dengan membaiknya ekonomi global juga mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Dengan terjaganya fundamental ekonomi domestik yang didukung oleh sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang semakin kuat serta komitmen kerjasama di bidang keuangan internasional maka rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2011 diperkirakan sekitar Rp8.800-9.000 per dolar AS .

3. Laju Inflasi

Tahun 2010, laju inflasi meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2010 terjadi inflasi kecuali pada bulan Maret yang mengalami deflasi sebesar 0,14 persen (*mtm*). Dari pemantauan BPS di 66 kota, sampai akhir tahun 2010 tercatat laju inflasi kumulatif mencapai 6,96 persen (*yoy*), meningkat dibandingkan tahun 2009 yang hanya 2,78 persen. Namun, inflasi tahun 2010 tersebut masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 11,06 persen.

Hingga triwulan I tahun 2011, perkembangan harga-harga secara umum cukup terkendali. Laju inflasi menunjukkan penurunan dibandingkan dengan akhir triwulan IV tahun 2010. Sampai dengan Maret 2011, laju inflasi tahunan tercatat sebesar 6,65 persen (*yoy*), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi akhir triwulan IV 2010 sebesar 6,96 persen. Selama triwulan I tahun 2011, inflasi pada Januari 2011 masih relatif tinggi sebagai dampak lanjutan dari masih tingginya harga beberapa komoditas utama dunia sehingga mendorong kenaikan harga komoditas sejenis di dalam negeri. Namun, sejak Februari 2011, harga komoditas beras dan bumbu-bumbuan domestik mulai mengalami penurunan sehingga mendorong penurunan inflasi kelompok bahan pangan, yang selanjutnya turut mendorong penurunan inflasi komponen *volatile foods*. Musim panen yang terjadi di beberapa daerah sentra produksi telah menekan harga beras dan komoditas bahan pangan nasional lainnya. Penurunan harga beras ini memberikan kontribusi terjadinya deflasi pada Maret 2011 sebesar 0,32 persen (*mtm*), terbesar dalam 10 tahun terakhir. Laju inflasi kumulatif sampai dengan triwulan I tahun 2011 menjadi 0,70 persen (*ytd*), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 0,99 persen (*ytd*).

Berdasarkan kelompok pengeluarannya hingga triwulan I tahun 2011 (*yoy*), menurunnya indeks harga kelompok pengeluaran untuk bahan pangan merupakan pendorong utama terjadinya deflasi pada Maret 2011. Penurunan laju inflasi kumulatif tersebut disebabkan oleh penurunan harga beberapa komoditas bahan pangan utama yaitu beras dan bumbu-bumbuan. Penurunan harga beras diperkirakan masih akan berlangsung hingga triwulan II tahun 2011 seiring masih berlangsungnya panen raya di beberapa sentra beras nasional. Sebaliknya, lima kelompok pengeluaran lainnya menunjukkan tren peningkatan, dengan kelompok sandang menyumbang kenaikan

tertinggi sebesar 7,71 persen, yang didorong oleh peningkatan harga emas di pasar internasional dan domestik. Kenaikan inflasi lain didorong oleh inflasi pada kelompok pengeluaran untuk pendidikan sebesar 3,84 persen dan kesehatan sebesar 3,17 persen.

Tabel II.4
Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

	Bahan Makanan	Makanan Jadi	Perumahan	Sandang	Kesehatan	Pendidikan	Transpor & Komunikasi
2007	10,48	5,32	4,72	7,12	3,38	5,54	0,23
2008	16,35	12,53	10,92	7,33	7,96	6,66	7,49
2009	3,88	7,81	1,83	6,00	3,89	3,89	-3,67
2010	15,64	6,96	4,08	6,51	2,19	3,29	2,69
2011-Q1	13,60	5,57	4,61	7,71	3,17	3,84	2,90

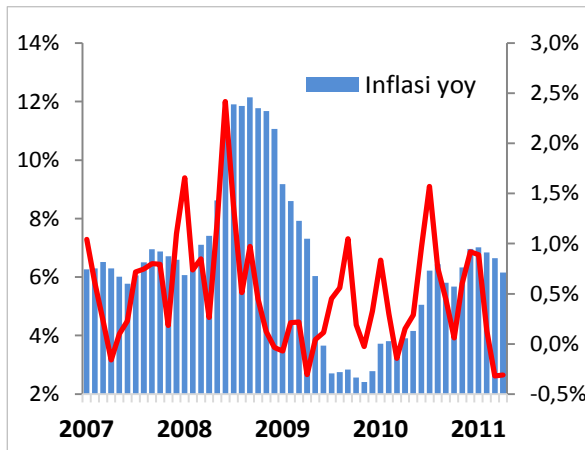
Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara itu hingga triwulan I tahun 2011, disagregasi inflasi berdasarkan komponennya, inflasi komponen harga bergejolak (*volatile food*) tercatat sebesar 15,17 persen (*yoy*), lebih rendah bila dibandingkan posisi pada triwulan IV tahun 2010 sebesar 17,74 persen (*yoy*). Penurunan komponen inflasi tersebut disebabkan oleh penurunan harga bahan pangan, terutama penurunan harga beras sebesar 3,59 persen (*yoy*), dan harga bumbu-bumbuan yang mengalami penurunan rata-rata 15 persen dibanding harga pada triwulan IV tahun 2010. Sementara itu, laju inflasi komponen harga yang diatur pemerintah (*administered price*) menunjukkan tren meningkat dan tercatat sebesar 5,48 persen (*yoy*), sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan IV tahun 2010 sebesar 5,40 persen (*yoy*). Relatif minimnya perubahan kebijakan pemerintah di bidang pangan dan energi menjadikan inflasi komponen yang diatur pemerintah bergerak relatif stabil.

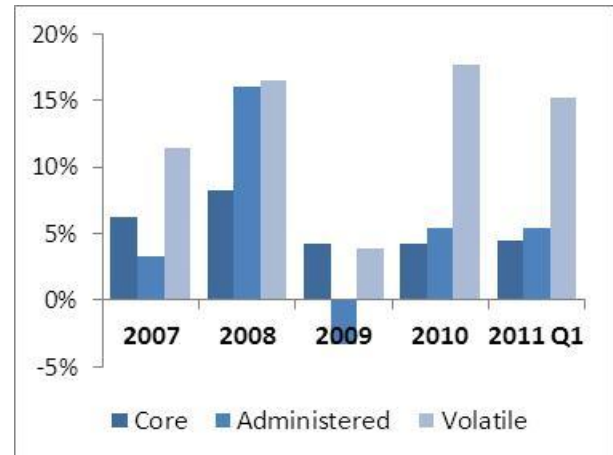
Laju inflasi komponen inflasi inti (*core inflation*) juga mengalami tren peningkatan dan tercatat sebesar 4,45 persen (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan laju inflasi komponen inflasi inti triwulan IV tahun 2010 sebesar 4,28 persen (*yoy*). Kenaikan komponen inflasi inti didorong oleh meningkatnya harga emas, biaya perumahan, biaya kesehatan dan biaya pendidikan, serta ekspektasi inflasi yang cenderung meningkat. Namun, pada

periode yang sama, nilai tukar rupiah yang bergerak relatif stabil dengan kecenderungan menguat mampu meredam peningkatan komponen inflasi inti.

Grafik II.22
Perkembangan Inflasi 2007-2010



Grafik II.23
Perkembangan Inflasi Tahunan (yoy)
Berdasarkan Komponen



Sumber: Badan Pusat Statistik

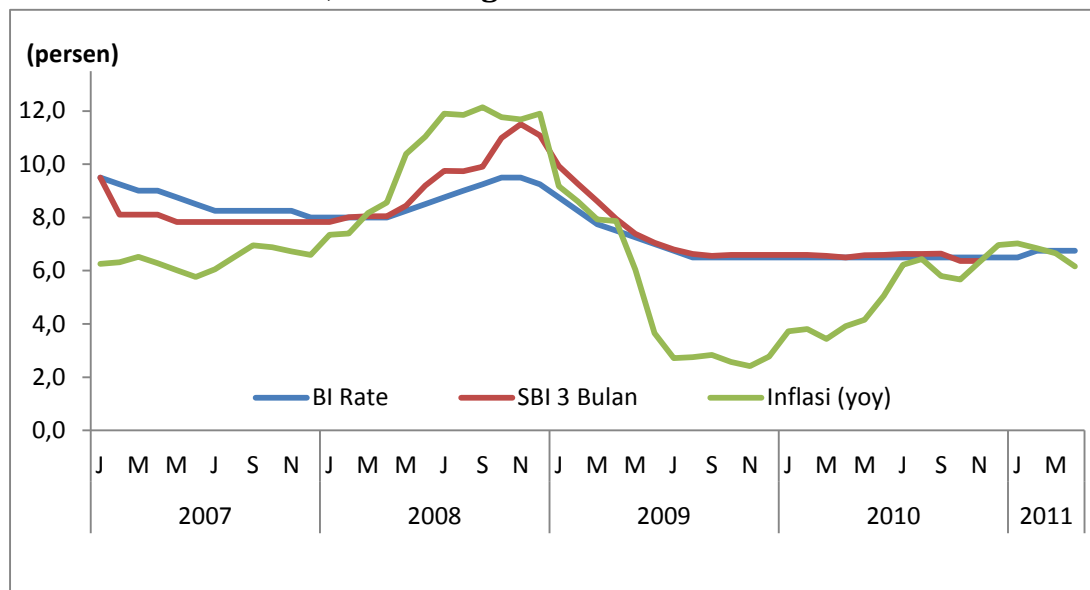
Potensi tekanan inflasi tahun 2011 diperkirakan masih bersumber pada kenaikan harga bahan pangan dan energi yang terjadi baik di pasar internasional maupun domestik. Namun, Pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil di tingkat pusat dan daerah guna mengendalikan inflasi. Berdasarkan perkembangan ekonomi domestik dan internasional tersebut, laju inflasi tahun 2011 diperkirakan sekitar 6,0 persen.

4. Suku Bunga SBI dan SPN 3 Bulan

Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan cenderung menurun dan relatif stabil pada level 7,8 persen sejak bulan Mei sampai akhir tahun 2007. Kondisi ini sejalan dengan stabilnya suku bunga acuan dan inflasi sehingga rata-rata suku bunga SBI 3 bulan tahun 2007 mencapai 8,04 persen. Pada tahun 2008 rata-rata suku bunga SBI 3 bulan mencapai 9,34 persen sebagai dampak dari meningkatnya inflasi pada tahun tersebut. Memasuki tahun 2009 suku bunga SBI 3 bulan mengalami penurunan, yaitu dari 10,39 persen pada Januari menjadi 6,58 persen pada Desember 2009 sehingga rata-rata suku bunga SBI 3 bulan tahun 2009 sebesar 7,59 persen.

Perkembangan suku bunga SBI 3 bulan selama Januari - Oktober 2010 cenderung stabil sehingga mencapai rata-rata 6,57%, lebih rendah dibanding rata-rata suku bunga SBI 3 bulan pada tahun 2009. Dilihat dari kepemilikan SBI pada bulan Oktober 2010, sebesar 32,2 persen dimiliki oleh asing dan sisanya dimiliki domestik sebesar 67,8 persen. Kepemilikan asing dalam SBI 3 bulan cenderung meningkat selama tahun 2010. Sejak bulan November tahun 2010 Bank Indonesia menghentikan sementara lelang SBI 3 bulan.

Grafik II.24
SBI 3 Bulan, Suku Bunga Acuan dan Inflasi 2007-2011



Sumber: Bank Indonesia dan BPS

Kebijakan Bank Indonesia menghentikan sementara lelang SBI tenor 3 bulan tersebut dimaksudkan untuk menahan dana asing yang terus menerus masuk kedalam instrumen SBI dan mengarahkan arus likuiditas agar masuk ke instrumen moneter dengan tenor yang lebih panjang. Untuk mengganti SBI 3 bulan tersebut, pada saat yang sama Bank Indonesia mulai menawarkan instrumen moneter berupa *term deposit* berjangka waktu dua bulan. Kebijakan Bank Indonesia tersebut juga dilakukan untuk mempermudah pengelolaan kelebihan likuiditas sistem keuangan. *Term deposit* tersebut merupakan instrumen moneter *non-securities* atau instrumen pengelolaan likuiditas tanpa *underlying* surat berharga yang dapat dibeli oleh bank umum namun tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan ke pihak lain kecuali kepada Bank Indonesia.

Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah memperkenalkan *term deposit* berjangka waktu 1 bulan pada bulan Juli 2010. Penerapan kebijakan tersebut merupakan bagian dari enam paket kebijakan moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia pada bulan Juni 2010. Enam paket kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia pada bulan Juni 2010 merupakan kelanjutan dari kebijakan perpanjangan profil jatuh tempo (*maturity profile*) SBI yang mulai diterapkan secara penuh pada Juni 2010. Kebijakan tersebut mencakup: (1) Pelebaran koridor suku bunga PUAB O/N, yang diimplementasikan mulai 17 Juni 2010. (2) Penerapan minimum *one month holding period* SBI yang diimplementasikan mulai Juli 2010. (3) Penambahan instrumen moneter *non-securities* dalam bentuk *term deposit* yang berlaku mulai Juli 2010, (4) Penyempurnaan ketentuan mengenai Posisi Devisa Netto (PDN) yang berlaku mulai Juli 2010, (5) Penerbitan SBI berjangka waktu 9 bulan dan 12 bulan yang masing-masing diimplementasikan pada Agustus dan September 2010. (6) Penerapan mekanisme *three party repurchase* (repo) Surat Berharga Negara (SBN) yang akan diimplementasikan tahun 2011.

Mengingat Bank Indonesia tidak menyelenggarakan lelang SBI 3 bulan sejak bulan November 2010 sampai dengan Maret 2011, maka sesuai dengan Ketentuan dan Persyaratan (*terms and condition*) Surat Utang Negara (SUN) dengan tingkat bunga mengambang (*Variable Rate/VR*), penentuan tingkat bunga SUN tersebut dapat didasarkan pada hasil lelang Surat Utang lain dari Pemerintah dengan jangka waktu tiga bulan dimana sistem pelelangannya setara dengan SBI.

Adapun dalam bulan Maret dan April 2011, Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan yang telah diterbitkan oleh pemerintah yaitu SPN dengan maturity 23 Juni 2011 (dengan *Yield/price* rata-rata tertimbang 5,18594%), SPN dengan maturity 6 Juli 2011 (dengan *Yield/price* rata-rata tertimbang 5,02375%), SPN dengan maturity 20 Juli 2011 (dengan *Yield/price* rata-rata tertimbang 5,19271%).

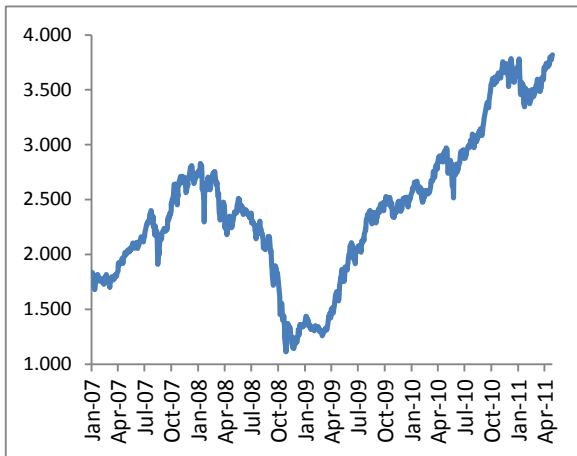
Seiring dengan kenaikan BI *rate* dari 6,5 persen menjadi 6,75 persen, suku bunga SPN ke depan akan mendekati suku bunga kebijakan sehingga suku bunga SPN tahun 2011 diperkirakan akan berkisar antara 5,5 - 6,5 persen.

Pasar Modal

Selama periode 2007-2009 indeks harga saham gabungan (IHSG) berfluktuasi. IHSG pada akhir tahun 2007 tercatat sebesar 2745,83, menurun cukup tajam pada akhir tahun 2008 yang ditutup pada 1355,41. Jatuhnya IHSG pada tahun 2008 disebabkan oleh dampak guncangan di pasar keuangan Amerika Serikat sehingga terjadi penarikan dana besar-besaran dari negara-negara *emerging market* termasuk Indonesia. Pada tahun 2009 IHSG kembali menguat yang ditutup pada 2534,36, seiring dengan meningkatnya kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia yang mendorong masuknya arus modal ke pasar saham.

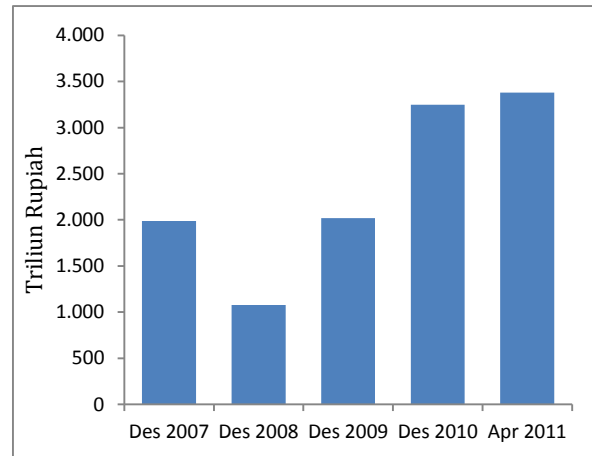
Grafik II.25

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Grafik II.26

Kapitalisasi Pasar



Sumber: Bloomberg

Derasnya arus modal masuk ke pasar finansial terus berlanjut di tahun 2010. Kondisi ini mampu mengangkat IHSG hingga di akhir tahun 2010 ditutup pada 3703.51 atau menguat 46,13 persen dibandingkan dengan penutupan tahun 2009. Ini merupakan kenaikan indeks terbesar di Asia Pasifik, diikuti dengan bursa Thailand dan Philipina. Selama tahun 2010 terjadi arus modal asing masuk ke pasar modal sebesar Rp20,98 triliun yang antara lain disebabkan oleh melemahnya perekonomian di Amerika serta krisis utang yang melanda negara-negara di kawasan Eropa, terutama di Yunani dan Irlandia, sedangkan perekonomian negara-negara *emerging market* termasuk Indonesia relatif lebih baik. Dari sisi sektoral, indeks LQ 45 dan Jakarta Islamic Index (JII) pada akhir tahun ditutup pada level 661,38 dan 532,9 atau menguat masing-masing 32,73 persen dan 27,74 persen. Sektor perdagangan dan sektor barang konsumsi adalah

pendorong utama peningkatan IHSG pada tahun 2010 yang masing-masing meningkat sebesar 71,91 persen dan 63,06 persen.

Indeks harga saham yang terus meningkat memacu perusahaan untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dan *right issue*. Selama tahun 2010 tercatat 24 emiten melakukan IPO dengan nilai emisi mencapai Rp29,7 triliun dan 30 emiten melakukan *right issue* dengan nilai emisi Rp43,7 triliun. Jumlah ini melebihi tahun 2009 dimana terdapat 12 emiten yang melakukan IPO dengan nilai Rp4,09 triliun, dan 13 emiten yang melakukan *right issue* dengan nilai Rp15,67 triliun.

Seiring dengan peningkatan harga dan jumlah saham, kapitalisasi pasar pada periode yang sama juga meningkat tajam hingga mencapai Rp3.247,10 triliun atau naik 60,79 persen dibandingkan akhir tahun 2009 yang sebesar Rp2.019,38 triliun.

Memasuki tahun 2011, IHSG bergerak sangat fluktuatif. Pada awal tahun IHSG sempat jatuh hingga level terendahnya yaitu 3346,06 atau turun 9,65 persen dari angka penutupan tahun 2010, akibat tingginya kekhawatiran investor akan inflasi di dalam negeri. Pada Februari, IHSG kembali naik karena respon positif pelaku pasar akan keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level 6,75 persen. Setelah kekhawatiran akan inflasi mereda, IHSG kembali dihantam oleh bencana gempa dan tsunami yang melanda Jepang. Namun demikian, dampak bencana di Jepang hanya bersifat sementara dan IHSG kembali menguat dan pada akhir bulan Maret 2011 IHSG berada pada level 3678,67. Pada akhir bulan Maret 2011 IHSG berada pada level 3678,67. Penguatan IHSG terus berlanjut pada bulan April hingga menembus level 3800 dan pada akhir bulan April 2011 berada pada level 3819,62. Kapitalisasi pasar per tanggal 29 April 2011 telah mencapai Rp3.431,15 triliun atau naik 5,67 persen dibandingkan akhir tahun 2010.

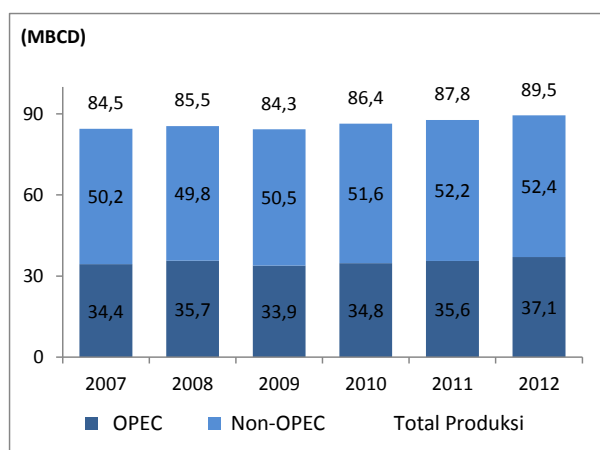
5. Harga dan Lifting Minyak

Sepanjang empat tahun terakhir, rata-rata konsumsi minyak dunia mengalami peningkatan yaitu dari 86,3 juta barel per hari pada tahun 2007 menjadi 86,7 juta barel per hari pada tahun 2010 (Grafik II.29). Peningkatan konsumsi ini terutama terjadi di negara-negara non-OECD yang naik menjadi 46,0 juta barel per hari pada tahun 2010 dan kembali menguatnya permintaan negara-negara OECD terutama dalam memenuhi

konsumsi *heating oil* dalam menghadapi musim dingin yang ekstrim. Pergerakan permintaan minyak dunia selama periode tersebut juga diimbangi oleh meningkatnya produksi minyak dunia, terutama produksi minyak yang berasal dari negara-negara non-OPEC. Rata-rata produksi minyak dunia yang pada tahun 2007 sebesar 84,5 juta barel per hari naik hingga menjadi 86,4 juta barel per hari pada tahun 2010 atau mengalami kenaikan sebesar 2,2 persen (Grafik II. 27).

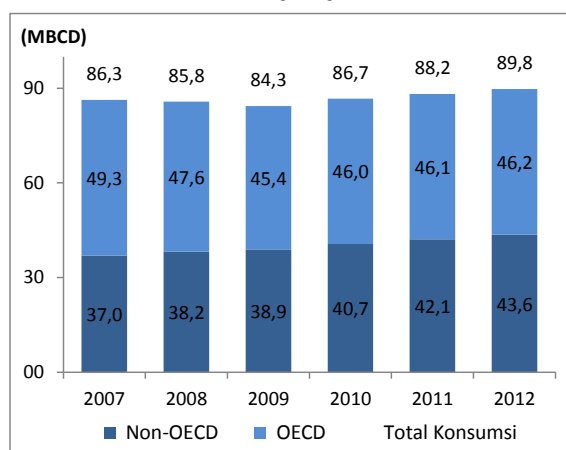
Grafik II.27

Perkembangan Produksi Minyak Dunia



Grafik II.28

Perkembangan Konsumsi Minyak Dunia



Sumber: IEA

Sampai dengan bulan Maret 2011, baik konsumsi maupun produksi minyak dunia menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan konsumsi di awal tahun ini antara lain dipicu oleh langkah Amerika Serikat untuk menjaga * * * persediaan minyak di Amerika Serikat, musim dingin yang ekstrem dan meningkatnya aktivitas manufaktur di negara-negara OECD. Sementara dari sisi produksi, instabilitas kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah telah memicu penurunan produksi minyak OPEC. Namun, naiknya produksi minyak negara non OPEC seperti Rusia dan negara-negara kawasan Laut Utara telah memberikan kontribusi pada peningkatan produksi minyak dunia pada tiga bulan pertama tahun 2011.

Harga minyak mentah dunia bergerak dengan volatilitas yang relatif tinggi. Rata-rata harga minyak mentah WTI pada tahun 2007 relatif tinggi. Bergejolaknya harga minyak dunia pada akhir tahun 2007 terus berlanjut hingga menyentuh titik tertinggi pada bulan Juni 2008 dengan rata-rata pada bulan tersebut mencapai US\$133,6 per barel.

Selanjutnya harga minyak merosot menuju titik terendahnya dalam kurun empat tahun pada Februari tahun 2009 sebesar US\$39,2 per barel. Rata-rata harga minyak WTI pada tahun 2009 menjadi US\$61,7 per barel atau lebih rendah 38,0 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar US\$99,6 per barel.

Tren harga rata-rata ICP juga mengikuti tren pergerakan harga minyak dunia, dengan level tertingginya terjadi pada Juli 2008 dengan rata-rata sebesar US\$135,0 per barel yang kemudian menyentuh level terendahnya rata-rata sebesar US\$38,5 per barel pada Desember 2008. Pada bulan-bulan berikutnya harga ICP secara berangsur-angsur mengalami kenaikan sehingga selama tahun 2009 secara rata-rata mencapai US\$61,6 per barel atau lebih rendah 36,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar US\$97,0 per barel.

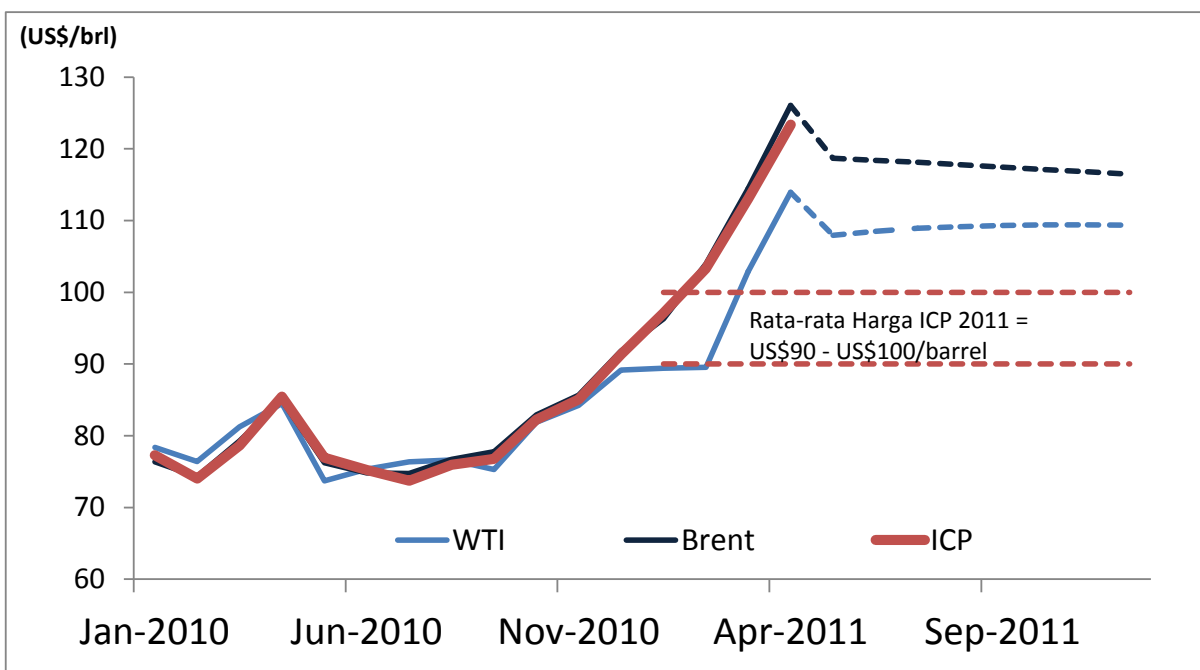
Memasuki tahun 2010, harga minyak WTI mengalami kenaikan seiring dengan mulai pulihnya perekonomian global yang mendorong meningkatnya permintaan minyak mentah. Selain itu, kenaikan harga minyak juga dipicu oleh terjadinya penurunan stok minyak mentah Amerika Serikat. Sejalan dengan meningkatnya harga minyak dunia, rata-rata harga ICP pada periode yang sama juga meningkat menjadi US\$79,4 per barel atau naik 27,2 persen dibanding rata-rata harga ICP pada tahun sebelumnya.

Krisis geopolitik di kawasan Timur Tengah memicu Libya, sebagai salah satu produsen minyak mentah dunia, menurunkan produksinya hingga 1,6 juta barel per hari. Kondisi ini telah mengganggu pasokan minyak dunia. Selain itu, perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia yang sebesar 4,4 persen (WEO April, IMF) juga mendorong kenaikan harga minyak yang menurut Badan Energi Amerika Serikat (EIA) akan menyentuh rata-rata US\$106,4 per barel (STEO April, EIA). Dampak dari krisis geopolitik dan perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tersebut telah berpengaruh pada harga minyak mentah dunia pada tahun 2011, termasuk harga minyak ICP.

Sampai dengan bulan April tahun 2011, harga minyak ICP menunjukkan volatilitas kenaikan yang cukup tinggi. Rata-rata harga minyak ICP selama periode Januari–April 2011 mencapai US\$109,2 per barel atau meningkat 38,5 persen dibanding rata-rata harga ICP pada periode yang sama tahun lalu. Sementara itu untuk periode yang sama, harga minyak mentah WTI dan Brent masing-masing sebesar US\$98,0 per barel dan US\$109,4 per barel. Pergerakan harga ICP selama tahun 2011 menunjukkan adanya

perubahan tren. Selama ini harga ICP mengikuti pergerakan harga minyak mentah khususnya WTI, berubah menjadi mengikuti pergerakan harga minyak mentah Brent. Dengan memperhatikan perkembangan faktor-faktor tersebut dan perkiraan harga minyak mentah WTI dan Brent, rata-rata harga ICP tahun 2011 diperkirakan akan berada sekitar US\$90-US\$100 per barel, sedikit lebih tinggi dari asumsi harga ICP pada APBN 2011 yang sekitar US\$80 per barel.

Grafik II.29
Perkembangan Harga Minyak Dunia
2010-2011

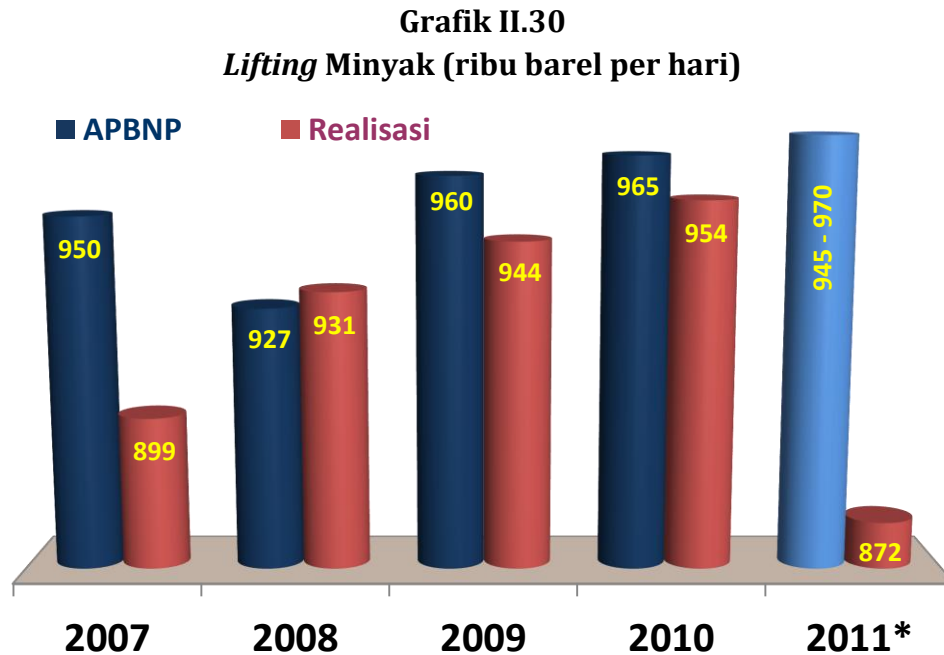


Sumber: EIA, Bloomberg, ESDM dan Kemenkeu

Sementara itu, realisasi *lifting* minyak sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan peningkatan yaitu dari 899 ribu barel per hari menjadi 954 ribu barel per hari. Namun bila dilihat dari target yang ditetapkan, pencapaian realisasi tersebut masih lebih rendah (lihat Grafik.II.30). Beberapa kendala yang dihadapi pada sepanjang tahun 2007–2010 dalam kegiatan produksi minyak diantaranya adalah faktor penurunan produksi alamiah, tertundanya pembangunan fasilitas produksi dan pengadaan fasilitas produksi apung serta terjadinya kebocoran pipa dan kerusakan pada anjungan KKKS akibat tabrakan.

Realisasi *lifting* diperkirakan akan mengalami penurunan dibanding target APBN 2011 yang sebesar 970 ribu barel per hari. *Lifting* minyak periode Januari–Maret 2011 baru

mencapai 872 ribu barel per hari. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu belum optimalnya sumur-sumur baru, terbatasnya investasi di sektor migas, *unplanned shutdown*, keterbatasan peralatan dan teknologi, cuaca buruk dan perubahan iklim, serta dampak penerapan asas *cabotage*. Berdasarkan kondisi tersebut, lifting minyak pada tahun 2011 diperkirakan mencapai 945 ribu – 970 ribu barel per hari.



*realisasi tahun 2011, periode Jan-Mar 2011.

Sumber: Kementerian ESDM dan Kemenkeu

6. Neraca Pembayaran

Kinerja neraca pembayaran Indonesia dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Perbaikan kinerja ini ditunjukkan oleh kinerja transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial yang meningkat. Membaiknya kinerja neraca pembayaran tersebut antara lain disebabkan oleh mulai meningkatnya permintaan ekspor dan masuknya arus modal baik berupa investasi langsung maupun portofolio.

Neraca transaksi berjalan pada tahun 2010 mencatat surplus US\$6,3 miliar, yang didorong oleh surplus pada neraca perdagangan dan transfer. Neraca perdagangan dalam tahun 2010 mengalami surplus US\$31,1 miliar lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada tahun 2009 sebesar US\$30,1 miliar. Sementara itu, neraca jasa dan neraca

pendapatan masing-masing mengalami defisit sebesar US\$9,5 miliar dan US\$20,3 miliar, sedangkan neraca transfer mengalami surplus sebesar US\$5,0 miliar.

Neraca transaksi modal dan finansial pada tahun 2010 mencatat surplus sebesar US\$26,2 miliar jauh lebih tinggi dari surplus tahun sebelumnya yang hanya mencapai sebesar US\$5,0 miliar. Surplus tersebut terutama bersumber dari tingginya surplus pada investasi portofolio dan investasi langsung, sejalan dengan membaiknya persepsi risiko sehingga dana asing yang masuk semakin meningkat.

Berdasarkan perkembangan besaran-besaran neraca pembayaran tersebut, dalam tahun 2010 keseimbangan umum mengalami surplus US\$30,3 miliar sehingga cadangan devisa mencapai US\$96,2 miliar. Ringkasan neraca pembayaran Indonesia tahun 2007–2011 dapat dicermati pada Tabel II.5.

Tabel II.5
Neraca Pembayaran Indonesia, 2007 – 2011
(miliar USD)

ITEM	2007	2008	2009	2010	2011
A. TRANSAKSI BERJALAN	10,5	0,1	10,2	6,3	4,2
1. Neraca Perdagangan	32,8	22,9	30,1	31,1	37,0
a. Ekspor, fob	118,0	139,6	119,6	158,2	196,0
b. Impor, fob	-85,3	-116,7	-89,5	-127,1	-159,0
2. Jasa-jasa	-11,8	-13,0	-9,7	-9,5	-12,0
3. Pendapatan	-15,5	-15,2	-15,1	-20,3	-25,9
4. Transfer berjalan	5,1	5,4	4,9	5,0	5,2
B. TRANSAKSI MODAL DAN FINANSIAL	3,6	-1,8	5,0	26,2	18,0
- Neraca modal	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0
- Neraca finansial:	3,0	-2,1	4,9	26,2	18,0
a. Investasi langsung	2,3	3,4	2,6	9,8	10,0
b. Investasi portofolio	5,6	1,8	10,3	15,2	13,3
b. Investasi lainnya	-4,8	-7,3	-8,1	1,1	-5,3
C. TOTAL (A + B)	14,1	-1,7	15,2	32,5	22,2
D. SELISIH YANG BELUM DIPERHITUNGKAN	-1,4	-0,2	-2,7	-2,2	0,6
E. KESEIMBANGAN UMUM (C + D)	12,7	-1,9	12,5	30,3	22,9
Cadangan devisa	56,9	51,6	66,1	96,2	120,9

Sumber: Bank Indonesia

Pada tahun 2011, kinerja neraca pembayaran diperkirakan masih cukup baik yang ditopang oleh perbaikan kinerja ekspor dan aliran modal masuk, walaupun pada saat

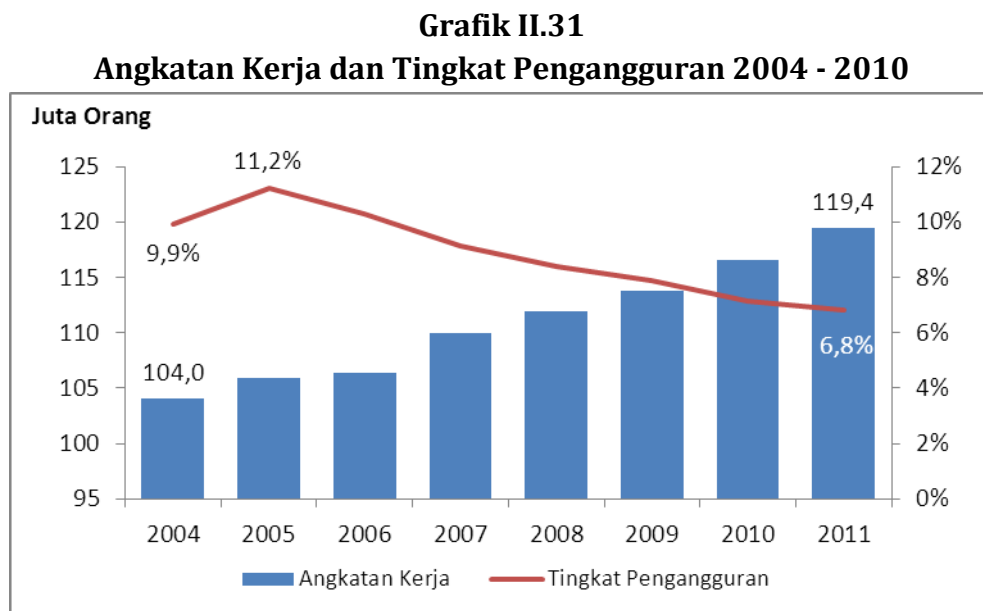
yang sama impor juga diperkirakan meningkat. Ekspor diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 23,9 persen menjadi US\$196,0 miliar. Di sisi lain, meningkatnya kegiatan ekonomi dan investasi yang cukup tinggi akan mendorong peningkatan impor bahan baku dan barang modal. Dalam tahun 2011 impor diperkirakan tumbuh sebesar 25,1 persen lebih tinggi dari ekspor menjadi US\$159,0 miliar. meskipun pertumbuhan impor lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor, neraca perdagangan tetap surplus US\$37,0 miliar. Sementara itu, defisit neraca jasa-jasa diperkirakan mencapai US\$12,0 miliar, lebih tinggi sekitar 26,8 persen dibandingkan tahun 2010, terutama akibat meningkatnya angkutan impor (*freight*) dan pengeluaran jasa-jasa lainnya. Defisit neraca pendapatan diperkirakan mencapai US\$25,9 miliar, lebih tinggi 27,8 persen dibandingkan tahun 2010. Sebaliknya, neraca transfer diperkirakan surplus US\$5,2 miliar atau naik 4,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya transfer dari tenaga kerja Indonesia (TKI). Dengan kondisi tersebut, transaksi berjalan pada tahun 2011 diperkirakan mengalami surplus US\$4,2 miliar.

Transaksi modal dan finansial tahun 2011 diperkirakan mengalami surplus cukup tinggi sebesar US\$18,0 miliar, walaupun lebih rendah dibandingkan dengan surplus tahun 2010 sebesar US\$26,2 miliar. Arus masuk modal asing diperkirakan masih berlanjut dengan kontribusi arus modal jangka panjang (investasi langsung) yang semakin besar dibandingkan arus modal jangka pendek (investasi portofolio). Kinerja penanaman modal langsung diperkirakan terus mengalami peningkatan dengan surplus US\$10,0 miliar atau naik 1,6 persen dibandingkan surplus tahun sebelumnya. Sementara itu, arus masuk investasi portofolio diperkirakan masih tinggi, walaupun tidak sebesar tahun sebelumnya sehingga kinerja investasi portofolio diperkirakan turun dibandingkan tahun 2010 sebesar 12,7 persen.

Membaiknya kinerja neraca pembayaran yang tercermin pada peningkatan cadangan devisa diharapkan mampu mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi domestik. Cadangan devisa dalam tahun 2011 diperkirakan mencapai US\$120,9 miliar. Peningkatan cadangan devisa sebesar US\$24,7 miliar dibandingkan posisi pada tahun sebelumnya ini bersumber dari surplus transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial.

7. Ketenagakerjaan dan Kemiskinan

Semakin membaiknya kondisi perekonomian nasional memberikan sentimen positif terhadap akses penciptaan lapangan kerja baru dan penurunan pengangguran. Sejak tahun 2007 hingga 2010, jumlah pengangguran terbuka tercatat terus mengalami penurunan baik secara absolut maupun secara relatif. Pada tahun 2007, jumlah pengangguran terbuka masih sebesar 10,0 juta orang (9,1 persen) dan turun menjadi 9,39 juta orang (8,39 persen) pada tahun 2008. Pada tahun 2009, jumlah pengangguran terbuka turun lagi menjadi 8,96 juta orang atau sekitar 7,87 persen dan pada tahun 2010 jumlah pengangguran terbuka tercatat menjadi 8,32 juta orang atau sebesar 7,14 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik

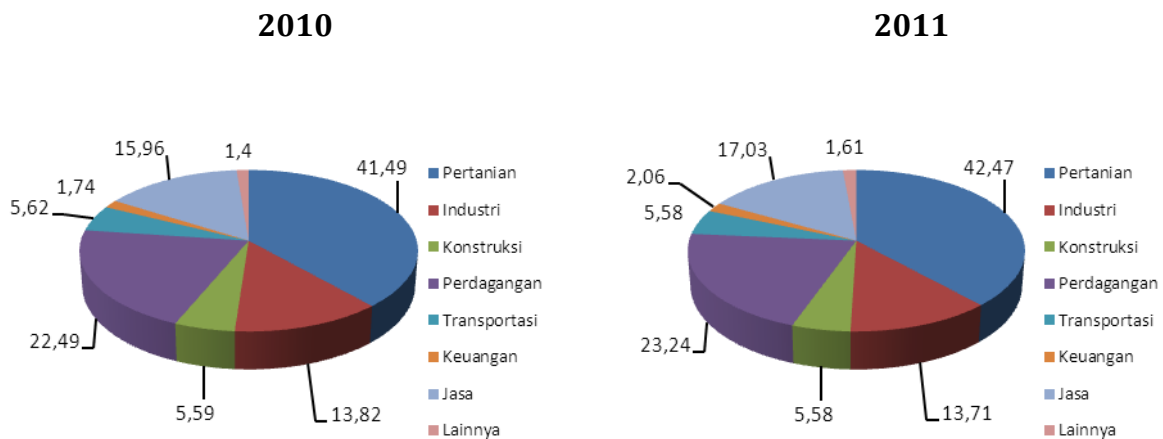
Di sepanjang tahun 2011, kinerja perekonomian nasional diperkirakan akan semakin membaik seiring dengan pengaruh positif ekonomi global. Hal ini berpotensi semakin memperluas kesempatan kerja baru dan akan menurunkan jumlah pengangguran. Berdasarkan data per Februari 2011, jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 6,8 persen.

Berdasarkan komposisi pekerja menurut lapangan kerja utama, beberapa sektor yang mengalami peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja diantaranya pertanian, perdagangan, keuangan, dan jasa kemasyarakatan. Jika dibandingkan dengan kondisi

bulan Agustus 2010, jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2011 mengalami kenaikan terutama di Sektor Jasa Kemasyarakatan yang naik sebesar 1,1 juta orang (6,70 persen) dan Sektor Pertanian sebesar 980 ribu orang (2,36 persen). Sementara, sektor-sektor yang mengalami penurunan dalam penyerapan tenaga kerja diantaranya Sektor Industri sebesar 110 ribu orang (0,80 persen) dan Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi sebesar 40 ribu orang (0,71 persen).

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta revitalisasi pertanian dan industri maka lapangan kerja yang tercipta diharapkan akan meningkat melebihi jumlah angkatan kerja. Kebijakan pemerintah untuk terus mendorong dan menggerakkan sektor riil telah mampu menekan tingkat pengangguran terbuka menjadi 6,8 persen di awal tahun 2011 atau menurun jika dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 7,1 persen dan tahun 2009 yang sebesar 7,87 persen.

Grafik II.32
Komposisi Lapangan Kerja tahun 2010 – 2011 (persen)



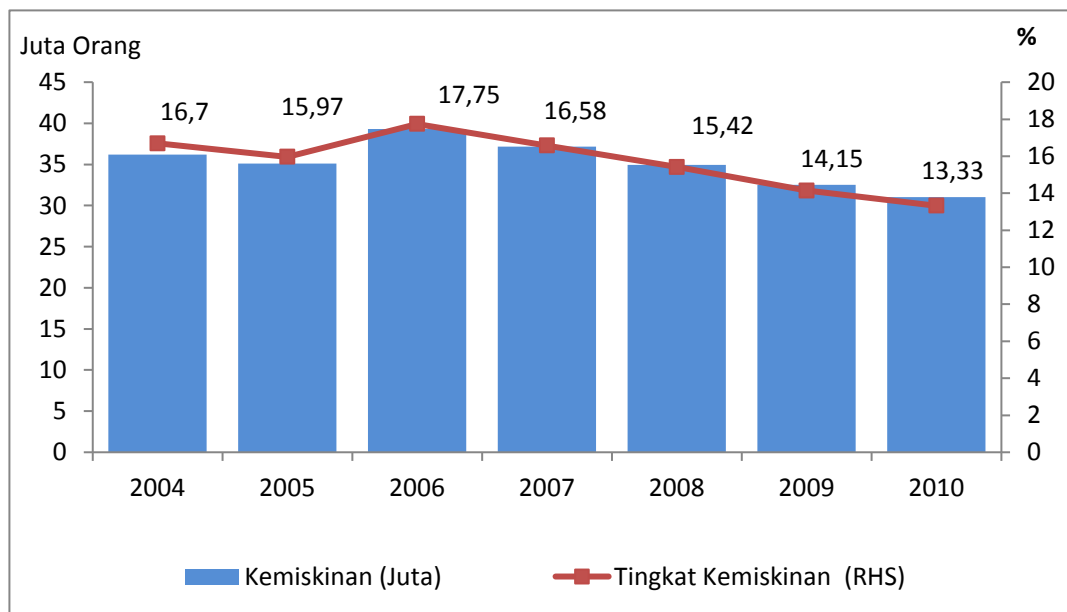
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari sisi kemiskinan, strategi pembangunan *pro-poor* telah memberikan hasil yang cukup memuaskan, sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Berdasarkan garis kemiskinan, tingkat kemiskinan pada Maret 2009 adalah 14,1 persen (atau 32,5 juta orang) lebih rendah dibandingkan dengan Maret 2008 yakni sebesar 15,4 persen (34,9 juta orang). Laju pertumbuhan ekonomi juga memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Pada akhir 2009, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia telah mencapai US\$2.339 atau meningkat

4,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kenaikan ini, Indonesia telah masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah (*lower middle income countries*).

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan, selain merupakan hasil dari tercapainya laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi juga didukung oleh berbagai program pemberdayaan masyarakat yang merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar rakyat. Program tersebut terus dilakukan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat menikmati lajunya percepatan pertumbuhan ekonomi. Langkah ini ditempuh antara lain melalui pemberian subsidi, bantuan sosial dan PKH, PNPM Mandiri, dan dana penjaminan kredit/pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini dilaksanakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak atau belum mampu dipenuhi oleh kemampuan sendiri. Berbagai program dan upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah tersebut mampu menurunkan tingkat kemiskinan di tahun 2010 menjadi 13,3 persen. Pada tahun 2011 tingkat kemiskinan diperkirakan akan menurun menjadi 11,5 – 12,5 persen.

Grafik II.33
Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
2004 - 2010



Sumber: Badan Pusat Statistik

BAB III

TANTANGAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2012

A. TANTANGAN

1. Tantangan Perekonomian Global 2012

Pertumbuhan Ekonomi

Di tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2011 dengan laju pertumbuhan 4,5 persen. Peningkatan ini lebih didorong oleh kondisi ekonomi negara negara maju yang lebih baik. Sementara negara negara berkembang tetap tumbuh dengan kecepatan yang relatif stabil.

Perekonomian kawasan Eropa diperkirakan akan tumbuh lebih cepat dibanding tahun 2011, yang antara lain didorong oleh pertumbuhan ekonomi negara negara maju seperti Inggris, Perancis. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju kawasan Asia Pasifik juga terlihat, terutama Jepang yang tumbuh sebesar 2,1 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,4 persen. Amerika Serikat tumbuh sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 2,9 persen. Gambaran kondisi ekonomi negara negara maju tersebut dapat diartikan sebagai sinyal membaiknya demand di negara maju, yang dapat menjadi peluang bagi kegiatan perdagangan dunia.

Pertumbuhan ekonomi untuk negara negara berkembang baik di dunia maupun kawasan Asia diperkirakan relatif stabil, yaitu masing masing 6,5 persen dan 8,4 persen. Dua ekonomi berkembang di kawasan Asia, yaitu China dan India, tumbuh dengan kecepatan relatif melambat dibanding tahun 2011. Perkiraan perkiraan di atas mengisyaratkan potensi ekonomi negara berkembang Asia lainnya, termasuk ASEAN-5, untuk tumbuh lebih tinggi di tahun 2012.

Tabel III.1
Pertumbuhan Ekonomi Berbagai Kawasan (% YOY)

	2007	2008	2009	2010	2011*	2012**
Dunia	5,4	2,9	-0,5	5,0	4,4	4,5
Negara Maju	2,7	0,2	-3,4	3,0	2,4	2,6
Kawasan Eropa	2,9	0,4	-4,1	1,7	1,6	1,8
Negara Berkembang	8,8	6,1	2,7	7,3	6,5	6,5
Kawasan Asia	11,4	7,7	7,2	9,5	8,4	8,4
ASEAN-5	6,4	4,7	1,7	6,9	5,4	5,7
Inggris	3,0	0,7	-5,0	1,3	1,7	2,3
Perancis	2,4	0,2	-2,6	1,5	1,6	1,8
Jerman	2,7	1,0	-4,7	3,5	2,5	2,1
Amerika Serikat	1,9	0,0	-2,6	2,9	2,8	2,9
Jepang	2,4	-1,2	-6,3	4,0	1,4	2,1
Korea Selatan	5,1	2,3	0,2	6,1	4,5	4,2
China	14,2	9,6	9,2	10,3	9,6	9,5
India	9,9	6,2	6,8	10,4	8,2	7,8
Malaysia	6,5	4,7	-1,7	7,2	5,5	5,2
Filipina	7,1	3,9	1,0	7,4	5,0	5,0
Singapura	8,0	1,9	-0,8	14,6	5,2	4,4
Thailand	5,0	2,5	-2,3	7,8	4,0	4,5
Indonesia	6,3	6,0	4,6	6,1	6,2	6,5

Sumber: WEO, April 2011

Perdagangan Dunia

Dalam hal aktivitas perdagangan tahun 2012, pertumbuhan volume perdagangan global diperkirakan tumbuh sebesar 6,9 persen, lebih rendah dibanding tahun 2011. Penurunan aktivitas perdagangan terutama didorong oleh menurunnya volume perdagangan di negara maju yang melambat dari 6,7 persen di tahun 2011 menjadi 5,5 persen di 2012. Sementara di negara berkembang sedikit melambat dari 9,5 persen menjadi 9,1 persen.

Tabel III.2
Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia (% YOY)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Volume Perdagangan Barang dan Jasa (% yoy)								
Dunia	7,7	8,7	7,5	2,7	-10,9	12,4	7,4	6,9
Negara Maju	5,7	8,7	6,1	1,9	-13,6	13,6	7,3	5,8
Negara Berkembang	10,9	8,9	8,7	4,1	-7,8	15,1	8,9	8,6
Current Account (% PDB)								
Negara Maju	-1,2	-1,2	-0,9	-1,1	-0,3	-0,2	-0,3	-0,2
Kawasan Eropa	0,4	0,4	0,2	-0,6	-0,2	0,1	0,0	0,0
Negara Berkembang	4,1	5,2	4,1	3,7	1,8	1,8	2,7	2,4

Sumber: WEO April 2011

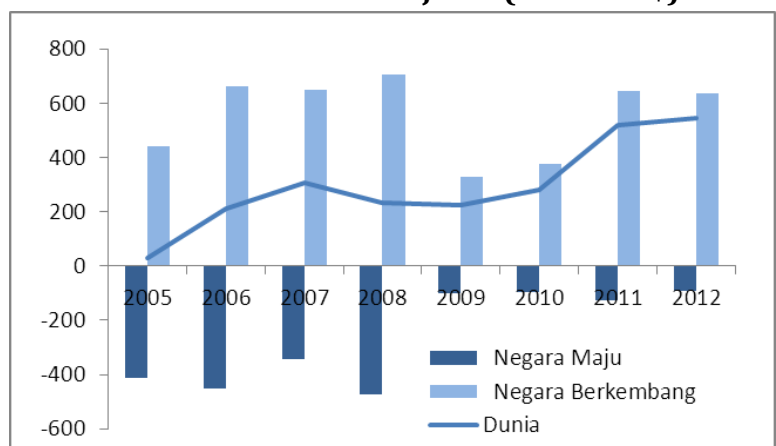
Melambatnya aktivitas perdagangan diperkirakan sejalan dengan mekanisme untuk mengurangi ketidakseimbangan perdagangan yang telah terjadi. Kondisi tersebut antara lain tercermin pada menurunnya defisit current account di negara maju, maupun penurunan surplus current account negara negara berkembang. Namun demikian perlu diingat pula bahwa, perlambatan aktivitas perdagangan dunia juga disebabkan oleh volume perdagangan tahun 2011 yang sudah cukup tinggi.

Dalam kaitan dengan keseimbangan perdagangan dunia, diperkirakan pola perdagangan akan semakin diwarnai oleh peningkatan peran perdagangan diantara negara negara berkembang. Dengan demikian, Pemerintah akan memberikan perhatian lebih pada langkah langkah memperluas pola perdagangan dan ekspor pada mitra mitra dagang baru.

Arus Modal

Salah satu isu penting yang telah menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir adalah arus modal dan likuiditas dunia. Isu isu terkait dengan derasnya arus modal,

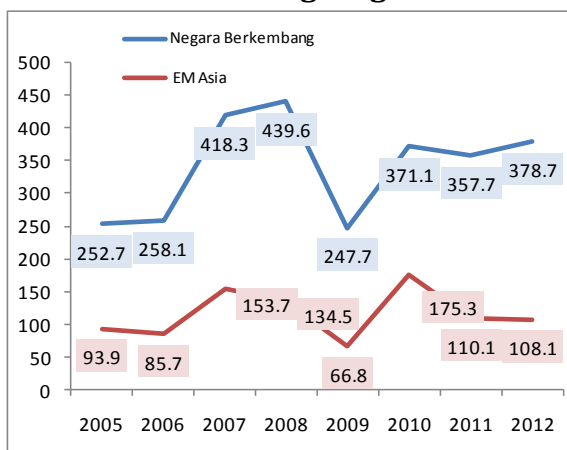
Grafik III.1
Neraca Transaksi Berjalan (Miliar US\$)



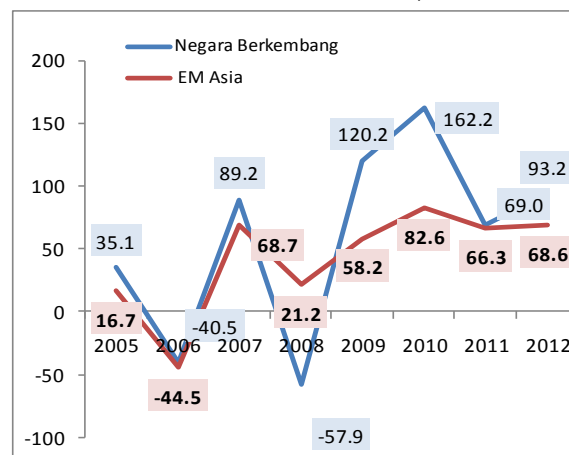
Sumber : WEO April 2011

khususnya modal jangka pendek ke negara berkembang kawasan Asia, telah mendorong diambilnya langkah langkah khusus dalam rangka memitigasi potensi dampak negatif bila terjadi capital reversal. Langkah dan kebijakan tersebut diperkirakan berdampak pada melambatnya arus modal masuk, baik FDI maupun Portofolio di tahun 2011. Pola aliran kedua arus modal masuk tersebut diperkirakan tidak banyak berubah di tahun 2012.

Grafik III.2
Investasi Langsung Netto



Grafik III.3
Arus Portofolio Swasta, netto



Sumber: WEO, April 2011

Kondisi di atas akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Menurunnya arus modal, khususnya untuk FDI, ke negara negara berkembang di kawasan Asia akan meningkatkan persaingan kebutuhan dana bagi investasi sektor riil di antara sesama negara berkembang Asia. Namun demikian, masih terdapat peluang untuk menarik dana dana yang masuk ke kawasan di luar Asia. Di sisi lain, arus modal portofolio diperkirakan tidak banyak berubah di tahun 2011 dan 2012. Hal tersebut memberikan sinyal positif bagi tekanan gejolak nilai tukar yang relatif kecil terkait dengan gejolak arus modal jangka pendek.

2. Tantangan Perekonomian Domestik

Seiring membaiknya kondisi perekonomian global, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan turut membaik di tahun 2012. Meningkatnya kepercayaan investor serta jumlah cadangan devisa yang memadai, akan menjadi faktor-faktor positif dalam mendukung pertumbuhan tersebut. Namun risiko gejolak pasar uang, pasar modal, dan

harga komoditas di pasar global masih perlu diwaspadai karena dapat mengganggu sasaran pertumbuhan ekonomi di tahun 2012.

Tingginya inflasi di tahun 2010 yang dipicu oleh kenaikan harga komoditas internasional, diperkirakan akan mulai stabil dan membaik di tahun 2012, sehingga daya beli masyarakat dapat meningkat dan diharapkan turut mendorong konsumsi dalam negeri yang masih cukup dominan dalam pembentukan produk domestik bruto. Dukungan terhadap investasi serta kegiatan ekspor dan impor yang menciptakan banyak lapangan kerja perlu lebih ditingkatkan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang (*sustainable growth*).

Di tahun 2012 ini, dukungan terhadap upaya menggerakkan sektor riil juga perlu ditingkatkan dengan meneruskan program-program pro rakyat agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga tingkat penangguran dan kemiskinan dapat menurun. Iklim investasi yang lebih baik juga perlu lebih ditingkatkan melalui upaya penegakan hukum, harmonisasi UU kebijakan penanaman modal, mengatasi kemacetan pada masalah pertanahan dan tata ruang, dan perbaikan birokrasi yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi yang sampai saat ini masih menjadi hambatan di sektor riil dan dunia usaha.

Dukungan infrastruktur diperkirakan tetap menjadi tantangan utama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan sektor riil di tahun 2012. Kekurangan infrastruktur dapat memicu terjadinya deindustrialisasi dan menurunkan daya saing global dalam menghadapi FTA dan ASEAN 2015. Dengan adanya dukungan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem jaringan infrastruktur yang mampu menghubungkan antarwilayah (*domestic connectivity*) serta meningkatkan pasokan energy sehingga daya saing produk dalam negeri meningkat. Selain itu, memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana di wilayah terpencil dan pedalaman akan membantu pemerintah dalam rangka menjaga tingkat inflasi dalam negeri.

Dukungan infrastruktur dari pemerintah melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti irigasi, bendungan dan perumahan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mendukung swasembada pangan, menjamin ketersediaan air baku,

mengendalikan banjir, serta memenuhi kebutuhan perumahan sehingga target *Millenium Development Goals* (MDG's) pada tahun 2015 diharapkan dapat tercapai.

B. SASARAN PEMBANGUNAN 2012

1. Pertumbuhan Ekonomi

Tema yang diusung dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012 adalah Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Saat ini kondisi perekonomian nasional sudah semakin membaik yang terbukti dengan laju pertumbuhan yang semakin cepat. Hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan kita sudah berada dalam arah yang benar.

Dengan tidak mengesampingkan berbagai tantangan eksternal yang dihadapi seperti tingginya harga minyak dunia dan kenaikan harga berbagai komoditi dunia, perekonomian Indonesia dalam tahun 2012 diyakini akan terus melaju dan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 diperkirakan berada pada kisaran 6,5 hingga 6,9 persen. Optimisme tersebut diperkirakan didukung oleh stabilnya konsumsi masyarakat, makin membaiknya kinerja investasi, perdagangan internasional, serta kinerja sektoral yang semakin meningkat

Tabel III.3
Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi 2012

Pengeluaran	2012
Konsumsi Masyarakat	4,8 - 5,2
Konsumsi Pemerintah	6,0 - 6,4
PMTB	10,0 - 10,4
Ekspor	14,9 - 15,3
Impor	18,0 - 18,4
PDB	6,5 - 6,9

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2012, konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,8 – 5,2 persen, dan konsumsi pemerintah pada 6,0 – 6,4 persen. Investasi akan semakin

meningkat bahkan mampu menembus level 2 digit pada kisaran sebesar 10,0 – 10,4 persen, sedangkan ekspor dan impor masing-masing diperkirakan tumbuh pada 14,9 – 15,3 persen dan 18,0 – 18,4 persen.

Laju pengeluaran konsumsi masyarakat pada tahun 2012 dipengaruhi oleh perekonomian global dan domestik. Perekonomian dunia yang semakin pulih diharapkan mampu mendorong kinerja dunia usaha sehingga mampu memberikan efek pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Disamping itu, laju inflasi juga diharapkan dapat terjaga pada level yang mampu mendorong tumbuhnya peningkatan konsumsi masyarakat.

Laju investasi di tahun 2012 diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibanding tahun 2011. Investasi diupayakan terus tumbuh sehingga mampu memberikan peran yang lebih besar dalam pembentukan PDB. Untuk itu, dalam RPJMN 2010-2014, antara lain disebutkan bahwa strategi pembangunan investasi diarahkan agar mampu menyebar ke berbagai sektor terutama pangan, energi, dan infrastruktur. Selain itu, pembangunan investasi juga diarahkan pada berkembangnya investasi yang berbasis keunggulan daerah. Untuk meningkatkan daya tarik investasi, perlu didorong terciptanya efektivitas kemitraan antara pemerintah dalam rangka percepatan ketersediaan infrastruktur. Dengan strategi tersebut maka prioritas investasi difokuskan pada peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan perijinan investasi, serta peningkatan fasilitasi investasi.

Meningkatnya perekonomian global diharapkan mampu mendorong kinerja sisi eksternal PDB. Ekspor Indonesia diharapkan akan terus meningkat, sementara impor juga akan meningkat seiring dengan kebutuhan industri domestik semakin meningkat untuk memenuhi kegiatan ekspor dan konsumsi dalam negeri. Upaya meningkatkan ekspor ditempuh melalui kebijakan perdagangan luar negeri yang diarahkan pada peningkatan daya saing produk ekspor nonmigas dan diversifikasi pasar. Strategi yang dilakukan antara lain dengan mendorong peningkatan ekspor nonmigas untuk produk-produk yang bernilai tambah lebih besar, berbasis pada sumber daya alam, serta permintaan pasarnya yang besar. Selain itu juga mendorong ekspor untuk produk kreatif terutama yang dihasilkan oleh UKM. Upaya lainnya adalah melakukan diversifikasi pasar tujuan ekspor, perluasan akses pasar, promosi, dan fasilitasi ekspor

nonmigas di kawasan Afrika dan Asia, serta mendorong pemanfaatan berbagai skema dan kerjasama perdagangan internasional yang lebih menguntungkan kepentingan nasional.

Dari sisi sektoral, sektor ekonomi yang diharapkan menjadi pendorong utama peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan. Dua sektor tersebut selama ini mampu memberikan sumbangan yang besar, baik kontribusinya dalam pertumbuhan maupun distribusi nominal PDB. Sektor Pertanian, meskipun keberhasilannya lebih banyak bergantung pada kondisi cuaca dan alam, namun masih menjadi andalan dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Demikian halnya dengan Sektor Industri Pengolahan yang selama ini mampu memberikan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja yang besar. Sektor lain yang diperkirakan tumbuh tinggi adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.

Pengembangan Sektor Industri Pengolahan dilakukan melalui langkah-langkah peningkatan daya saing dan kebijakan peningkatan iklim usaha, pengembangan kawasan industri khusus, kampanye penggunaan produk dalam negeri, restrukturisasi permesinan, pengembangan industri bahan bakar nabati, dan pengembangan standardisasi industri. Laju pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan diharapkan terus meningkat dan pada tahun 2012 diperkirakan tercapai pada kisaran 4,8 – 5,1 persen.

Tabel III.4
Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral 2012

LAPANGAN USAHA	2012
1. PERTANIAN, PETERNAKAN,	3,9 - 4,3
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	3,7 - 4,1
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	4,8 - 5,1
4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH	7,3 - 7,7
5. KONSTRUKSI	7,8 - 8,4
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	8,4 - 8,8
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	13,3 - 13,7
8. KEUANGAN, REAL ESTAT & JASA PERSH.	5,7 - 6,1
9. JASA - JASA	6,0 - 6,4
PRODUK DOMESTIK BRUTO	6,5 - 6,9

Sumber: Kementerian Keuangan

Sektor Pertanian selama ini menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi Indonesia dan merupakan kunci keberhasilan ketahanan pangan nasional. Sektor ini juga menjadi tempat penampungan terbesar dari tenaga kerja yang ada. Sedikitnya 40% tenaga kerja yang ada di Indonesia menggantungkan nasib di Sektor Pertanian. Pada tahun 2012, Sektor Pertanian diproyeksikan tumbuh pada kisaran 3,9 – 4,3 persen. Pencapaian pertumbuhan sektor tersebut antara lain didorong melalui peningkatan produksi pangan, produktivitas dan diversifikasi pertanian secara luas.

Strategi pengembangan Sektor Pertanian diupayakan melalui peningkatan produktivitas dan kualitas lahan pertanian, bantuan/subsidi bibit/benih dan pupuk, serta penanganan pasca panen. Hal lain yang tak kalah penting yakni tersedianya pendanaan bagi pertanian, pengembangan desa mandiri pangan dan penanganan rawan pangan, serta pembangunan irigasi. Strategi peningkatan produksi pangan tersebut didukung dengan penyempurnaan langkah-langkah koordinasi, monitoring, dan evaluasi cadangan pangan dan penanganan pangan strategis. Selain itu, peningkatan pertumbuhan subsektor perkebunan, perikanan, dan kehutanan dilakukan melalui peremajaan dan pengembangan perkebunan rakyat, perikanan, kehutanan; pengembangan hutan tanaman dan hutan tanaman rakyat; serta pengembangan SDM.

Sektor lain yang menjadi prioritas pengembangan adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang diperkirakan tumbuh sebesar 8,4 – 8,8 persen pada tahun 2012. Pertumbuhan sektor ini terutama didukung oleh pengembangan industri pariwisata, retail, dan industri-industri lain yang utamanya terkait dalam pemenuhan konsumsi domestik dan kegiatan impor.

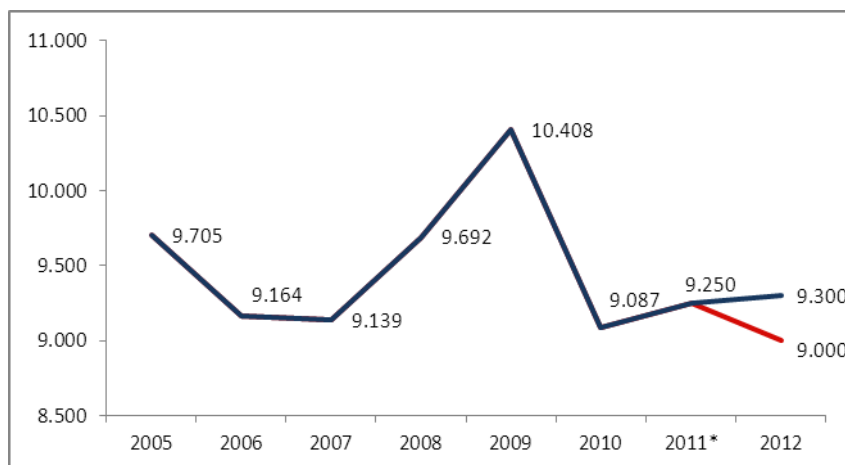
2. Nilai Tukar

Nilai tukar rupiah tahun 2012 dipengaruhi beberapa faktor yang berasal dari luar dan dalam negeri. Faktor yang mempengaruhi rupiah dari luar negeri antara lain berupa peningkatan arus modal masuk ke pasar domestik yang semakin membaik sebagai dampak dari semakin pulihnya perekonomian global. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia akan mendorong peningkatan ekspor dan investasi Indonesia yang pada akhirnya akan menambah cadangan devisa. Kondisi ini akan didukung dengan membaiknya rating Indonesia satu *notch* di bawah *investment grade* yang akan memicu peningkatan investasi jangka menengah dan jangka panjang sekaligus arus modal ke

dalam negeri. Namun, upaya menarik arus modal masuk diperkirakan akan semakin berat di tengah situasi meningkatnya suku bunga internasional.

Faktor dalam negeri yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tahun 2012 antara lain berasal dari membaiknya kondisi fundamental ekonomi. Sejalan dengan meningkatnya perekonomian domestik dan ekspor, kebutuhan akan impor khususnya impor bahan baku dan barang modal diperkirakan akan meningkat sehingga dapat mendorong depresiasi rupiah. Berdasarkan perkembangan dari dalam negeri dan luar negeri tersebut, pergerakan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tahun 2012 diperkirakan pada kisaran Rp9.000 – Rp9.300 per dolar AS.

Grafik III.4
Perkembangan dan Proyeksi Nilai Tukar
2005 – 2012



*2011 = APBN

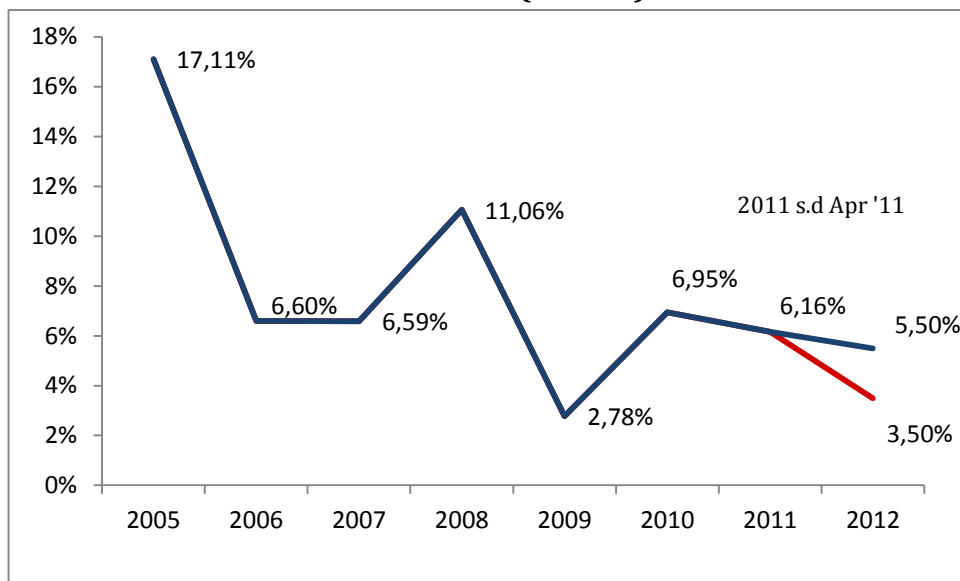
Sumber: Bank Indonesia dan Kemenkeu

3. Inflasi

Tekanan inflasi pada tahun 2012 diperkirakan menuju ke pola normal dengan kecenderungan menurun seiring dengan menurunnya sumber tekanan inflasi, baik dari sisi eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, inflasi negara mitra dagang utama Indonesia cenderung akan melemah dan perekonomian global akan terfokus pada upaya pemulihan ekonomi pasca krisis ekonomi di Uni Eropa. Menguatnya arus modal masuk (*capital inflow*) ke *emerging market* seperti Indonesia mendorong apresiasi nilai

tukar rupiah. Sementara itu, dari sisi internal, tekanan inflasi tahun 2012 cenderung menurun seiring semakin membaiknya pasokan dan distribusi bahan pangan, serta kebijakan yang diambil dalam rangka antisipasi perubahan iklim diharapkan dapat meredam kenaikan inflasi dari sisi *volatile foods*. Disamping itu, sinergi dan koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang semakin baik yang didukung oleh semakin meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi diharapkan dapat menciptakan kestabilan harga di dalam negeri.

Grafik III.5
Perkembangan dan Proyeksi Inflasi
2005 - 2012 (Persen)



Sumber: BPS dan Kemenkeu

Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi tersebut dan kebijakan fiskal, sektor riil dan moneter dalam pengendalian inflasi, maka tahun 2012 inflasi diperkirakan sebesar 3,5 - 5,5 persen.

4. Suku Bunga SBI dan SPN 3 Bulan

Pada tahun 2010 lelang terakhir SBI 3 bulan yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada bulan Oktober menghasilkan suku bunga sebesar 6,37 persen sehingga suku bunga rata-rata SBI 3 bulan selama tahun 2010 mencapai 6,57%. Mulai tahun 2011 Pemerintah menerbitkan SPN 3 bulan sebagai acuan pengganti SBI 3 bulan dan hingga

bulan Mei telah dilaksanakan lelang sebanyak 4 kali dengan rata-rata suku bunga sebesar 5,1 persen.

Adapun tahun 2012, faktor internal seperti tekanan inflasi, diperkirakan akan mengalami penurunan sejalan dengan terus membaiknya koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia. Harga komoditas dalam dan luar negeri diperkirakan tidak terlalu bergejolak walaupun ancaman perubahan iklim masih menjadi perhatian bagi kesinambungan pasokan. Sementara dari faktor eksternal diperkirakan suku bunga internasional seperti *The Fed* masih akan berada pada kisaran level yang rendah untuk mendorong pemulihan perekonomiannya.

Berdasarkan perkembangan beberapa indikator ekonomi tahun 2010 dan 2011 tersebut serta mencermati faktor-faktor yang akan mempengaruhinya di tahun 2012, maka suku bunga SPN 3 bulan dalam tahun 2012 diperkirakan berada pada kisaran 5,5 persen – 7,5 persen.

5. Harga dan *Lifting* Minyak

Pemulihan ekonomi dunia yang terus berlangsung sejak tahun 2010 akan berlanjut sampai dengan tahun 2011 dan akan memicu tingginya permintaan minyak dunia pada tahun 2011 dan tahun 2012. Di sisi lain persediaan dan distribusi minyak dunia diperkirakan akan cenderung stabil yang diikuti dengan tingginya tingkat kedisiplinan negara anggota OPEC untuk menjaga kapasitas produksi minyak. Menurut Badan Energi Amerika rata-rata harga minyak WTI pada tahun 2012 diperkirakan sekitar US\$113,5 per barel, sedikit lebih tinggi dari perkiraan tahun 2011 sebesar US\$106,4 per barel. Tingginya perkiraan tersebut antara lain didukung oleh meningkatnya perkiraan pertumbuhan ekonomi AS dari 2,8 persen pada tahun 2011 menjadi 2,9 persen pada tahun 2012. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka perkiraan harga minyak ICP tahun 2012 sekitar US\$75 – US\$95 per barel.

Sementara itu, pada tahun 2012 Pemerintah optimis adanya peningkatan pencapaian *lifting* minyak sebagai hasil meningkatnya investasi di sektor pertambangan minyak. Dengan hasil investasi baru tersebut dan optimalisasi terhadap sumber minyak yang telah ada maka *lifting* minyak tahun 2012 diperkirakan akan mencapai kisaran 950 ribu – 970 ribu barel per hari.

6. Ketenagakerjaan dan Kemiskinan

Pengangguran dan kemiskinan merupakan permasalahan penting yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Setiap tahun, Pemerintah selalu memfokuskan program pembangunannya pada penanganan kedua masalah tersebut. Indikator-indikator sosial yang ada telah mencerminkan perbaikan dalam pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Kondisi perekonomian dunia yang terus membaik diharapkan akan berimbas pada semakin membaiknya kinerja perekonomian domestik sehingga laju pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang ekspansif akan mampu memperluas terciptanya lapangan kerja baru. Sejak tahun 2006, secara rata-rata setiap satu persen pertumbuhan ekonomi, dapat menyerap tenaga kerja baru sekitar 400.000 orang. Penyerapan tenaga kerja ini diperkirakan akan semakin meningkat sejalan dengan program dan kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan investasi melalui perbaikan infrastruktur dan kebijakan lainnya. Dengan target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada tahun 2011 dan 2012, pertumbuhan lapangan kerja baru diperkirakan mencapai lebih dari 2 persen setiap tahunnya. Sementara itu, jumlah penduduk yang masuk angkatan kerja setiap tahun diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 1,76 persen. Laju pertumbuhan lapangan kerja baru yang lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan angkatan kerja akan berdampak pada semakin menurunnya tingkat pengangguran. Penurunan tingkat pengangguran ini juga ditopang oleh semakin tingginya angkatan kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sehingga pada tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka diperkirakan berada pada kisaran 6,4 – 6,7 persen.

Seperti halnya pengangguran, jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan juga menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Imbas dari krisis global memang menjadi hambatan bagi efektivitas implementasi kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan, namun pada tahun 2012 Pemerintah terus menyempurnakan strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan mencanangkan program untuk membantu masyarakat miskin baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang melalui program pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan semakin luasnya lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat diharapkan juga akan semakin meningkat dan

jumlah penduduk miskin akan semakin menurun. Dengan berbagai program dan kebijakan tersebut, tingkat kemiskinan tahun 2012 diperkirakan mencapai kisaran 10,5 persen - 11,5 persen.

BAB IV

POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2012

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2012 merupakan acuan sekaligus landasan awal bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2012. Secara garis besar, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012 ini berisikan mengenai empat hal pokok, yaitu: (a) pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2010 dan proyeksi tahun 2011; (b) perkiraan asumsi ekonomi makro tahun 2012; (c) arah kebijakan fiskal tahun 2012; dan (d) risiko fiskal.

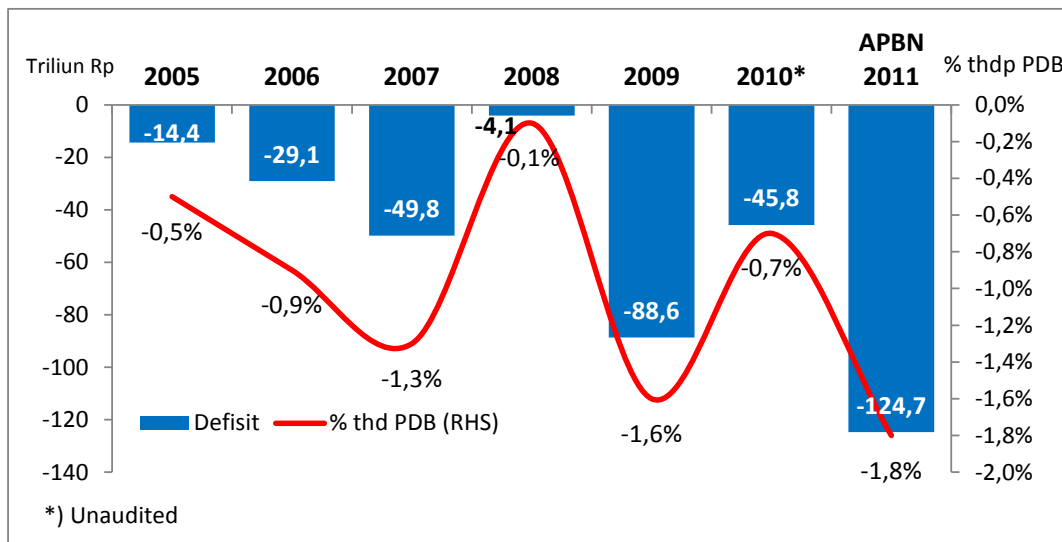
A. PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL 2010 DAN PROYEKSI 2011

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, mempunyai peran penting dan strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun. Peran strategis APBN tersebut terkait dengan tiga fungsi utama, yaitu untuk: (i) mengalokasikan sumber-sumber ekonomi; (ii) mendistribusikan barang dan jasa; serta (iii) menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi.

Defisit anggaran negara merupakan salah satu indikator kebijakan fiskal yang dipakai pemerintah. Melalui penetapan postur APBN, kebijakan fiskal yang ekspansif atau yang kontraktif menjadi pilihan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian, terlebih pada saat terjadi kegagalan pasar (*market failure*) dalam keseimbangan perekonomian. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dalam beberapa tahun terakhir, guna mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi serta pengurangan pengangguran dan kemiskinan, kebijakan fiskal yang ekspansif menjadi alat untuk mendukung sasaran pembangunan tersebut. Dalam tahun 2010, realisasi defisit mencapai negatif Rp45,8 triliun (0,7 persen terhadap PDB). Pencapaian ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan target APBN-P 2010 sebesar Rp133,7 triliun atau 2,1 persen terhadap PDB (lihat **Grafik IV.1**). Faktor utama yang menjadi penyebab rendahnya realisasi defisit adalah kurang optimalnya realisasi belanja negara yang hanya mencapai Rp1.062,9

triliun atau 94,4 persen dari target APBN-P 2010, sedangkan di sisi pendapatan negara terjadi peningkatan hingga mencapai Rp1.017,1 triliun atau 102,5 persen dari targetnya.

Grafik IV.1
Perkembangan Defisit Tahun 2005-2011



Sumber : Kementerian Keuangan

Secara umum, kurang optimalnya penyerapan anggaran belanja pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh kendala-kendala yang berasal dari perencanaan, pelaksanaan, dan faktor eksternal. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran dengan tetap menjaga kualitas *output* maupun *outcome*, antara lain melalui penyempurnaan mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyederhanaan mekanisme pelaksanaan anggaran dan revisi serta meningkatkan fleksibilitas bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dalam pelaksanaan anggaran.

Sementara itu, tingginya realisasi pendapatan negara pada tahun 2010 terutama dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan pada komponen pajak perdagangan internasional dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) nonmigas yang masing-masing dapat melampaui target APBN-P 2010. Membaiknya kondisi perekonomian global yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dunia merupakan salah satu faktor yang turut mendorong meningkatnya penerimaan pajak perdagangan internasional. Selain itu, kecenderungan kenaikan ICP dan *crude palm oil* (CPO) di bulan-bulan terakhir tahun 2010 mampu meningkatkan penerimaan pajak penghasilan

minyak bumi dan gas (PPH migas) dan PNBPN sumber daya alam (SDA) migas, serta bea keluar. Di sisi lain, tingginya realisasi pendapatan negara dan hibah pada tahun 2010 juga didukung oleh realisasi penerimaan PNBPN nonmigas yang mampu melebihi target yang ditetapkan dalam APBN-P 2010, khususnya untuk komponen SDA nonmigas, PNBPN lainnya, dan penerimaan badan layanan umum (BLU).

Di sisi pembiayaan, sejalan dengan rendahnya realisasi defisit tahun 2010 yang hanya mencapai Rp45,8 triliun atau 0,7 persen PDB, realisasi pembiayaan juga disesuaikan menjadi Rp90,5 triliun, terdiri dari pembiayaan dalam negeri Rp95,5 triliun dan pembiayaan luar negeri negatif Rp5,0 triliun. Hal ini berarti bahwa realisasi pembiayaan jauh lebih rendah dari target dalam APBN-P 2010 yang mencapai Rp133,7 triliun. Penyesuaian realisasi defisit dalam tahun 2010 tersebut dilakukan melalui pengurangan penerbitan surat berharga negara (SBN) neto yang ditargetkan dalam APBN-P 2010, dengan nilai sebesar Rp16,3 triliun. Selain itu pemerintah juga hanya menggunakan dana saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp17,3 triliun dari yang direncanakan dalam APBN-P 2010 sebesar Rp39,3 triliun.

Pada tahun 2011, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, kebijakan fiskal yang diambil bersifat lebih ekspansif berdasarkan target defisit sebesar 1,8 persen PDB. Pada posisi defisit tersebut, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp1.104,9 triliun dan belanja negara sebesar Rp1.229,6 triliun. Strategi kebijakan fiskal yang dijalankan adalah dengan menciptakan keseimbangan antara konsolidasi fiskal dan stimulus fiskal, dimana strategi tersebut menciptakan suatu stimulus fiskal dengan cara meningkatkan anggaran pembangunan, namun dengan tetap menjaga defisit anggaran pada level yang terkendali. Dengan strategi tersebut diharapkan tujuan pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui empat pilar utama pembangunan nasional yaitu *pro-poor*, *pro-growth*, *pro-job*, dan *pro-environment* dapat dicapai.

Sampai dengan triwulan I 2011, pelaksanaan APBN secara keseluruhan masih sesuai dengan target yang diharapkan. Meskipun perekonomian Indonesia mengalami tekanan dari tingginya harga minyak di pasar internasional dan harga komoditi pangan, namun kondisi fiskal tetap dapat dikendalikan pada tingkat yang aman. Realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp213,8 triliun atau 19,3 persen dari target, sedangkan

realisasi belanja negara mencapai Rp208,0 triliun atau 16,9 persen dari target. Dengan demikian, sampai dengan triwulan I 2011 terdapat surplus anggaran sebesar Rp5,7 triliun. Pada periode yang sama, realisasi pembiayaan mencapai Rp34,5 triliun, yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp39,3 triliun dan pembiayaan luar negeri sebesar negatif Rp4,9 triliun.

Dengan memperhatikan perkembangan indikator ekonomi makro pada triwulan I 2011 dan prospek perekonomian sampai dengan akhir tahun 2011, realisasi defisit APBN 2011 diperkirakan akan lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN 2011. Faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya adalah perkembangan harga minyak mentah terkini yang jauh melampaui asumsi APBN 2011. Selain itu, implementasi kebijakan yang telah direncanakan dan kebutuhan belanja yang meningkat juga mempengaruhi peningkatan defisit pada APBN 2011.

Realisasi pendapatan negara dan hibah diperkirakan akan melampaui rencana APBN, dengan didukung peningkatan penerimaan perpajakan dan PNBPN. Perkiraan peningkatan penerimaan perpajakan di tahun 2011 didukung dari penerimaan pajak perdagangan internasional yang diperkirakan akan jauh melampaui target APBN 2011 karena meningkatnya aktivitas perdagangan dunia dan tingginya harga CPO di pasar internasional. Di bidang PNBPN, kecenderungan kenaikan harga minyak diperkirakan akan membawa dampak positif bagi penerimaan migas.

Pencapaian realisasi belanja negara pada tahun 2011 diperkirakan akan lebih baik dari tahun 2010. Hal ini terutama didukung oleh perbaikan penyerapan belanja K/L, melalui: (i) implementasi anggaran berbasis kinerja secara konsisten; (ii) penyempurnaan mekanisme pengadaan barang dan jasa; (iii) penyederhanaan mekanisme revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); (iv) penyempurnaan mekanisme pelaksanaan anggaran; (v) peningkatan fleksibilitas K/L dalam pelaksanaan anggaran; (vi) penerbitan regulasi untuk mempercepat pencairan anggaran; serta (vii) penyempurnaan format DIPA.

Berdasarkan perkiraan realisasi defisit yang dapat melampaui target APBN 2011 tersebut, maka perkiraan realisasi pembiayaan diharapkan juga akan menyesuaikan dengan perubahan APBN 2011, dengan sumber utama berasal dari pembiayaan dalam negeri. Perkembangan APBN dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada **Tabel IV.1**

Tabel IV.1
Ringkasan APBN Tahun 2009-2011 (Triliun Rupiah)

Keterangan	2009	2010 Unaudited	2011 APBN
A Pendapatan Negara dan Hibah	848,8	1.017,1	1.104,9
I Penerimaan Dalam Negeri	847,1	1.014,3	1.101,2
1. Penerimaan Perpajakan	619,9	744,4	850,3
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	227,2	269,9	250,9
II. Hibah	1,7	2,8	3,7
B. Belanja Negara	937,4	1.062,9	1.229,6
I. Belanja Pemerintah Pusat	628,8	718,2	836,6
II. Transfer ke Daerah	308,6	344,7	393,0
C. Surplus/defisit Anggaran	(88,6)	(45,8)	(124,7)
% terhadap PDB	(1,6)	(0,7)	(1,8)
D. Pembiayaan	112,6	90,5	124,7
I. Dalam Negeri	128,1	95,5	125,3
II. Luar Negeri	(15,5)	(5,0)	(0,6)

Sumber : Kementerian Keuangan

1. Pendapatan Negara dan Hibah

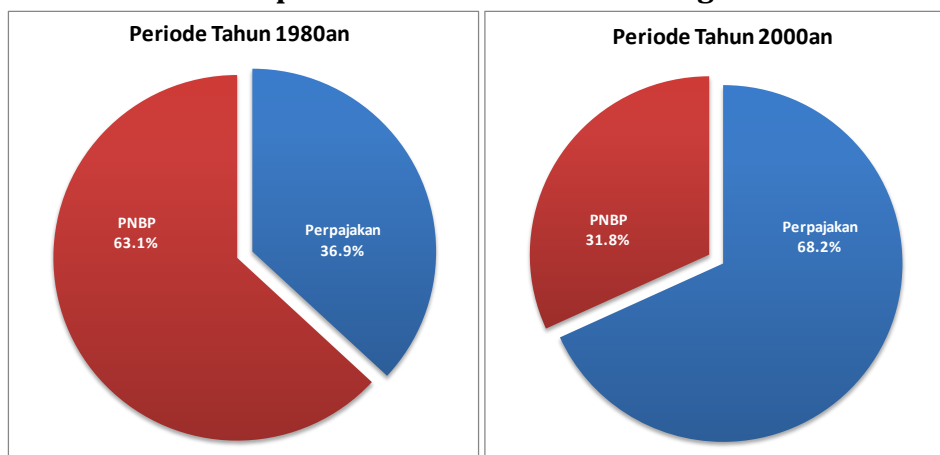
Pendapatan negara dan hibah terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Dilihat dari kontribusinya, penerimaan dalam negeri mampu memberikan kontribusi lebih besar dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang atau bantuan luar negeri dalam melaksanakan pembangunan.

Pada tahun 2010, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.017,1 triliun atau 102,5 persen dari target APBN-P 2010, dengan rincian penerimaan dalam negeri Rp1.014,3 triliun dan hibah Rp2,8 triliun. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2009, pencapaian pada tahun 2010 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 19,8 persen. Peningkatan tersebut terjadi, baik di sisi penerimaan perpajakan maupun PNBPN yang dipengaruhi oleh membaiknya kondisi perekonomian, global dan nasional. Hal ini dapat dilihat dari tingginya realisasi pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,1 persen, diatas target APBN-P 2010 sebesar 5,8 persen.

Sampai dengan triwulan I 2011, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp213,8 triliun, yaitu 19,3 persen dari target APBN 2011. Realisasi penerimaan dalam negeri adalah sebesar Rp213,7 triliun atau 19,4 persen target, sedangkan hibah Rp0,06 triliun atau 1,7 persen dari target. Penerimaan perpajakan memberikan kontribusi sebesar Rp170,3 triliun, sedangkan PNBPNP Rp43,4 triliun. Secara persentase terhadap target APBN 2011, pencapaian penerimaan perpajakan pada tiga bulan pertama tahun 2011 adalah 20,0 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan pencapaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 19,6 persen dari target APBN-P 2010. Peningkatan realisasi terbesar terjadi pada penerimaan pajak perdagangan internasional yang dipengaruhi oleh meningkatnya nilai impor dan tingginya harga komoditi CPO di pasar internasional. Sementara itu, pencapaian PNBPNP sampai dengan Maret 2011 adalah 17,3 persen dari target APBN 2011, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian tahun 2010 yang sebesar 11,9 persen dari target APBN-P 2010. Tingginya realisasi PNBPNP terutama berasal dari penerimaan SDA, khususnya SDA migas, yang sangat dipengaruhi oleh tren kenaikan harga ICP.

Berdasarkan perkembangan sampai dengan akhir bulan Maret 2011 tersebut, pendapatan negara dan hibah diperkirakan dapat mencapai target APBN 2011 dengan didukung pelaksanaan kebijakan perpajakan dan PNBPNP secara tepat. Penerimaan perpajakan akan sangat didukung oleh penerimaan pajak perdagangan internasional yang diperkirakan akan melampaui target, sedangkan PNBPNP akan sangat ditopang oleh penerimaan SDA migas.

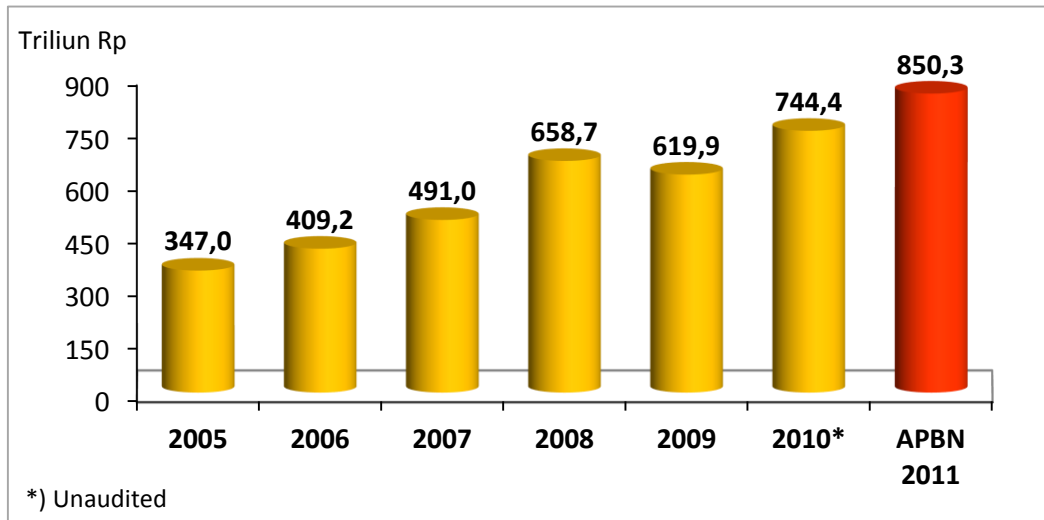
Grafik IV.2
Komposisi Penerimaan Dalam Negeri



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam periode 2005-2011, pemerintah telah berhasil meningkatkan penerimaan perpajakan lebih dari dua kali lipat dari Rp347,0 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp744,4 triliun pada tahun 2010. Dalam kurun waktu tersebut, total penerimaan perpajakan cenderung meningkat, seperti terlihat dalam **Grafik IV.3**, kecuali tahun 2009 karena melemahnya perekonomian dunia yang berpengaruh terhadap melambatnya laju perekonomian Indonesia pada tahun tersebut.

Grafik IV.3
Grafik Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2005 s.d. 2011



Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2010, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp744,4 triliun yang berarti terjadi kenaikan sebesar Rp124,5 triliun atau 20,1 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2009. Pencapaian tersebut merupakan 100,2 persen dari target APBN-P 2010. Kontribusi terbesar bagi penerimaan perpajakan berasal dari penerimaan PPh, khususnya PPh nonmigas, serta PPN dan PPnBM. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2009, realisasi PPh nonmigas pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 11,3 persen. Faktor utama yang mendorong peningkatan tersebut adalah meningkatnya tingkat pendapatan nasional yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan ekonomi (6,1 persen) dan didukung pula oleh peningkatan kegiatan ekspor (17 persen). Sementara itu, sebagai penyumbang kedua terbesar, realisasi PPN dan PPnBM pada tahun 2010 mengalami peningkatan 30,5 persen dibanding tahun 2009, terutama berasal dari PPN dan PPnBM impor.

Di sisi penerimaan kepabeanan dan cukai, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada penerimaan cukai dan bea keluar pada tahun 2010, yaitu masing-masing meningkat 16,7 persen dan 1.475,1 persen. Selain karena adanya kenaikan tarif pada tahun 2010, peningkatan penerimaan cukai juga didukung oleh upaya tambahan (*extra effort*) melalui pemberantasan cukai ilegal dan penanggulangan peredaran rokok polos (rokok yang tidak dilekati pita cukai). Sementara itu, tingginya penerimaan bea keluar disebabkan oleh kenaikan tarif bea keluar yang bergerak seiring dengan kenaikan harga CPO di pasar internasional.

Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, pencapaian penerimaan perpajakan pada tahun 2010 juga didukung oleh dilaksanakannya kebijakan di bidang penerimaan perpajakan secara konsisten. Di bidang penerimaan pajak, pemerintah telah melakukan langkah-langkah pembaharuan dan penyempurnaan administrasi perpajakan (*tax policy and administration reform*) melalui: (i) reformasi di bidang administrasi; (ii) reformasi di bidang peraturan dan perundang-undangan; dan (iii) reformasi di bidang pengawasan dan penggalan potensi.

Di bidang kepabeanan dan cukai, optimalisasi penerimaan telah didukung dengan upaya: (i) peningkatan tarif cukai hasil tembakau berkisar antara 9,6 persen sampai dengan 21,0 persen sesuai dengan jenis hasil tembakau (SKM, SKT, dan SPM)¹; (ii) peningkatan tarif cukai minuman mengandung ethil alkohol (MMEA) rata-rata sebesar 228,1 persen untuk MMEA dalam negeri dan 110,5 persen untuk MMEA impor; (iii) penyederhanaan golongan pengusaha dan tarif cukai; (iv) pengenaan bea keluar atas ekspor biji kakao (April 2010). Selain itu, pemerintah juga telah melaksanakan peningkatan pengawasan melalui: (i) peningkatan operasi pasar; (ii) pemeriksaan lokasi pabrik; (iii) peningkatan *security features* (pita cukai); (iv) peningkatan pengawasan peredaran MMEA impor; (v) peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor; (vi) pengembangan manajemen risiko kepabeanan dan cukai; (vii) monitoring pelaksanaan audit; dan (viii) penyempurnaan aplikasi sistem audit.

Selain dengan langkah optimalisasi penerimaan perpajakan, pada tahun 2010 pemerintah juga telah memberikan berbagai insentif di bidang perpajakan, antara lain: (i) penurunan tarif PPh badan dari 28 persen menjadi 25 persen, sebagaimana

¹ Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Mesin (SPM)

diamanatkan dalam UU No 36 Tahun 2008; (ii) pemberian keringanan tarif PPh badan 5 persen lebih rendah dari tarif normal bagi perusahaan yang minimal 40 persen sahamnya dimiliki oleh publik; (iii) pelaksanaan amandemen undang-undang PPN yang secara umum lebih memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan meningkatkan daya saing bagi pengusaha Indonesia di luar daerah pabean; dan (iv) pemberian insentif berupa pajak ditanggung pemerintah (DTP) atas PPh, PPN dan bea masuk guna mendorong investasi dan kegiatan dunia usaha serta stabilisasi harga di dalam negeri.

Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan tahun 2011 sebesar Rp850,3 triliun atau meningkat sebesar 14,2 persen dibandingkan realisasi tahun 2010. Penerimaan perpajakan tersebut terutama diharapkan berasal dari penerimaan PPh nonmigas dan PPN dan PPnBM, masing-masing ditargetkan sebesar Rp364,9 triliun dan Rp312,1 triliun. Sementara itu, PBB dan pajak lainnya ditargetkan mencapai Rp31,9 triliun, dan cukai Rp62,8 triliun. Untuk pajak perdagangan internasional, target yang ditetapkan adalah sebesar Rp23,0 triliun terdiri dari bea masuk Rp17,9 triliun dan bea keluar Rp5,1 triliun.

Untuk mencapai target penerimaan perpajakan yang ditetapkan dalam APBN 2011 tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan perpajakan yang sebagian merupakan kelanjutan dari kebijakan tahun-tahun sebelumnya. Pokok-pokok kebijakan perpajakan pada tahun 2011 antara lain adalah: (i) penggalian potensi perpajakan; (ii) peningkatan kualitas pemeriksaan pajak; (iii) penyempurnaan mekanisme atas keberatan dan banding dalam proses pengadilan pajak; (iv) peningkatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai; (v) perbaikan sistem informasi; (vi) konsistensi pelaksanaan *Road Map* Cukai Hasil Tembakau; dan (vii) pemberian insentif perpajakan dalam bentuk pajak DTP. Selain itu, untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan, pemerintah mengalihkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah pada tahun 2011, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan secara bertahap sampai dengan Desember 2013.

Terkait penggalian potensi perpajakan, pemerintah melaksanakan beberapa program pengamanan penerimaan sebagai berikut :

1. Program intensifikasi perpajakan tahun 2011, yang dilaksanakan melalui:
 - (a) pengamanan pembayaran masa; (b) pemantapan profil seluruh wajib pajak (WP)

di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) madya; (c) pemantapan profil seluruh WP di KPP di lingkungan kantor wilayah WP besar dan kantor wilayah Jakarta khusus; (d) pemantapan dan bedah profil 1000 WP penentu penerimaan per KPP pratama; (e) penambahan pembuatan 500 profil 1000 WP tindak lanjut dari program *feeding* dan penggalian potensinya di KPP pratama; (f) pengamanan WP sektor tertentu; (g) pengawasan WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) dan *high wealth individuals* (HWI); (h) pengamanan penerimaan dari WP bendahara; (i) pengamanan penerimaan berbasis transaksi; (j) pengamanan penerimaan berbasis *high rise building*;

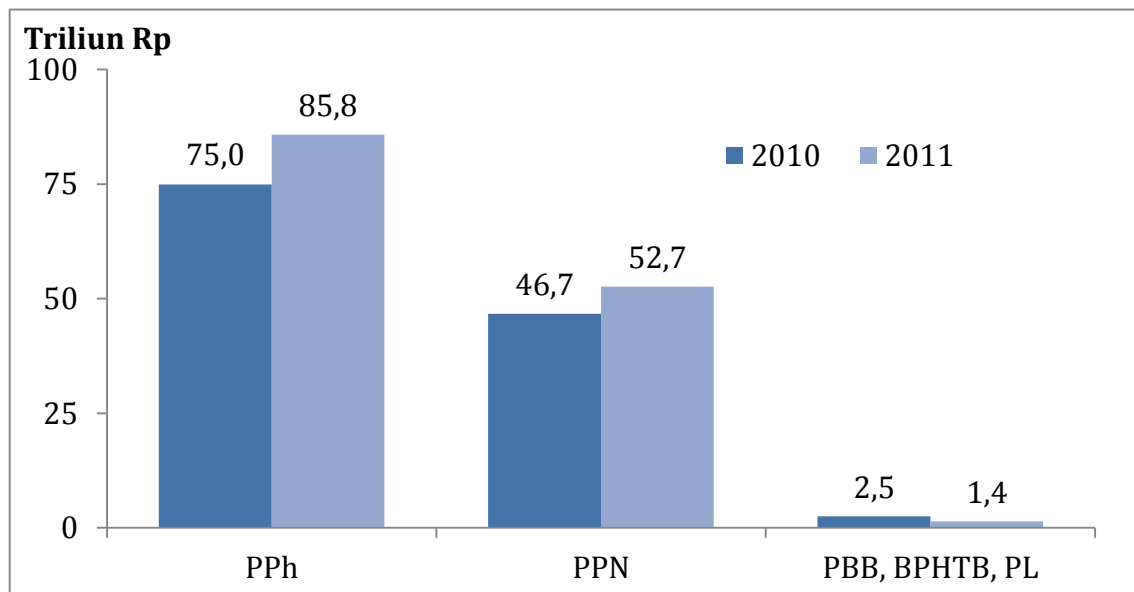
2. Program ekstensifikasi perpajakan tahun 2011 diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah WP orang pribadi, khususnya: (a) WP berbasis profesi; (b) WP berbasis pemberi kerja; (c) WP berbasis *feeding* dari 1000 WP besar; (d) WP OPPT;
3. Program *canvassing* (penyisiran potensi pajak berbasis wilayah) yang akan dimulai pada semester II tahun 2011 yang ditujukan kepada orang pribadi sebagai pelaku bisnis yang lokasi sasarnya adalah pada kawasan bisnis dan kawasan pemukiman potensial.

Memasuki tahun 2011, perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Hal ini berpengaruh kepada realisasi penerimaan perpajakan. Sampai dengan triwulan I, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp170,3 triliun atau 20,0 persen dari target APBN 2011. Realisasi tersebut didukung oleh penerimaan pajak dalam negeri yang mencapai Rp157,3 triliun dan pajak perdagangan internasional yang mencapai Rp13,0 triliun. Penerimaan pajak dalam negeri terutama didominasi oleh realisasi PPh nonmigas yang mencapai Rp73,0 triliun atau 20,0 persen dari target APBN 2011, realisasi PPN dan PPnBM yang mencapai Rp52,7 triliun atau 16,9 persen dari target, dan realisasi Cukai yang mencapai Rp17,4 triliun atau 27,8 persen dari target. Sedangkan pajak perdagangan internasional didukung oleh realisasi bea masuk yang mencapai Rp5,9 triliun atau 32,8 persen dari target dan realisasi bea keluar Rp7,1 triliun atau 139,7 persen dari target.

Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan perpajakan pada triwulan I 2010 (lihat **Grafik IV.4**), realisasi pada triwulan I 2011 mengalami peningkatan 16,9 persen. PPh nonmigas serta PPN dan PPnBM masing-masing mengalami peningkatan 21,0 persen dan 12,7 persen. Faktor utama yang menyebabkan kenaikan penerimaan PPh

nonmigas adalah dukungan penerimaan PPh Badan pasal 25/29 yang sangat dipengaruhi kondisi dunia usaha pada tahun sebelumnya dimana kondisi ekonomi pada tahun 2010 lebih baik dari tahun 2009. Sedangkan faktor utama yang menyebabkan kenaikan PPN dan PPnBM adalah meningkatnya realisasi impor yang sampai dengan triwulan I 2011 telah mencapai US\$38,8 miliar atau meningkat 29,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik IV.4
Penerimaan Pajak Triwulan I Tahun 2010-2011

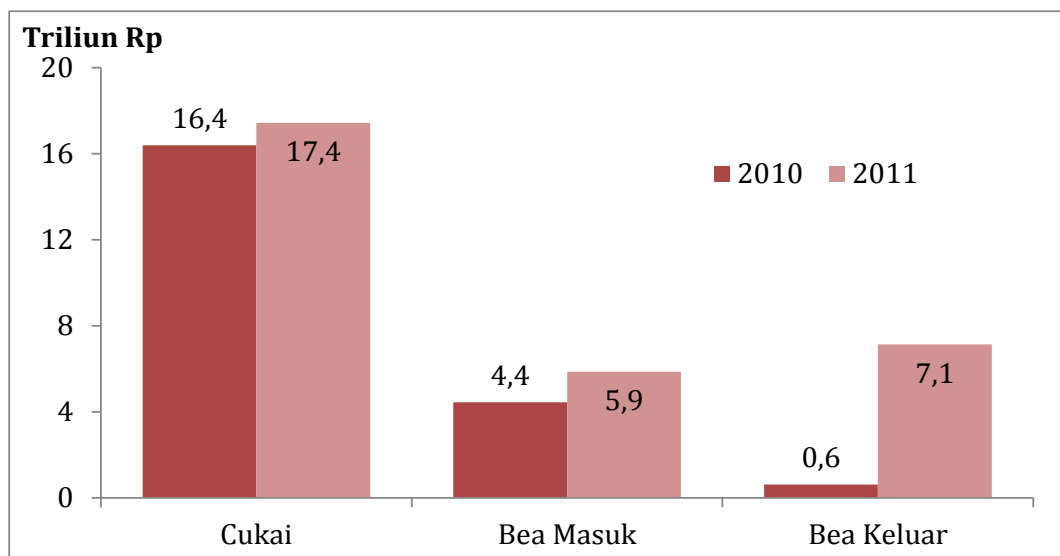


Catatan : Tahun 2011 tidak termasuk BPHTB, karena sudah dialihkan ke pemda

Sumber : Kementerian Keuangan

Penerimaan cukai pada triwulan I 2011 mengalami peningkatan sebesar 6,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya tarif cukai dan langkah pemberantasan rokok ilegal. Sementara itu, bea masuk meningkat sebesar 32,0 persen yang disebabkan oleh meningkatnya realisasi impor. Sedangkan realisasi bea keluar meningkat lebih dari sebelas kali lipat dari realisasi tahun sebelumnya. (Lihat **Grafik IV.5**).

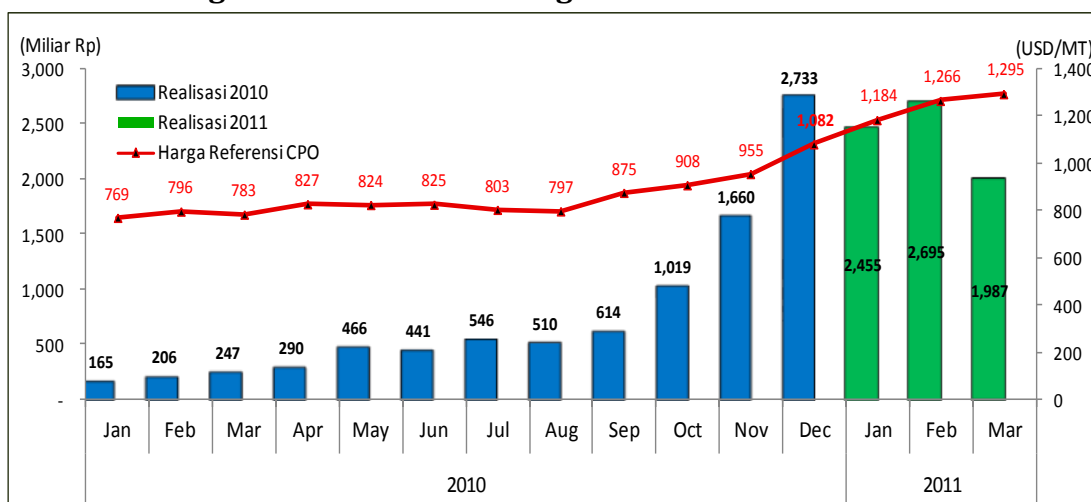
Grafik IV.5
Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai Triwulan I Tahun 2010-2011



Sumber : Kementerian Keuangan

Tingginya penerimaan bea keluar ini disebabkan oleh kenaikan tarif bea keluar sebagai imbas dari tingginya harga CPO di pasar internasional. Sebagai perbandingan, pada triwulan I 2010 tarif bea keluar yang berlaku rata-rata 3 persen, dengan harga CPO di pasar internasional berkisar antara US\$769,2/MT sampai dengan US\$795,8/MT. Sedangkan pada periode yang sama tahun 2011 tarif bea keluar yang berlaku berkisar antara 20-25 persen, dengan harga CPO di pasar internasional berkisar antara US\$1.184,4/MT sampai dengan US\$1.294,5/MT. Perkembangan penerimaan bea keluar dan harga CPO tahun 2009-2011 dapat dilihat pada **Grafik IV.6**.

Grafik IV.6
Perkembangan Bea Keluar dan Harga Referensi CPO Tahun 2010-2011



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pokok-pokok kebijakan perpajakan dalam tahun 2011, pemerintah telah mengeluarkan dua paket kebijakan perpajakan selama triwulan I tahun 2011. Pertama adalah paket kebijakan perpajakan yang dikeluarkan pada bulan Januari 2011, antara lain :

- 1) Penegasan kembali kebijakan yang mengatur tentang pengenaan PPh pasal 26 atas royalti produk film impor dengan tarif 20 persen dan pengenaan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak (BKP) tidak berwujud terhadap produk film impor, sebagaimana yang sudah dikenakan pada produk film nasional;
- 2) Kebijakan yang mengatur bahwa sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010);
- 3) Pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan kepada WP yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir yang tidak mendapat fasilitas Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, dapat dijelaskan bahwa :
 - a. Industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberikan nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional;
 - b. Fasilitas pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan, antara lain:
 - i. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30 persen dari jumlah penanaman yang dilakukan;
 - ii. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
 - iii. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 tahun;
 - iv. pengenaan PPh atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10 persen, kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah;
- 4) Penyederhanaan prosedur pembebasan PPh 22 Impor atas impor barang, yang mengatur tata cara pembebasan dari pemotongan/pemungutan PPh pihak lain.

Kedua adalah paket kebijakan perpajakan yang dikeluarkan pada bulan Februari 2011. Tujuan dari peluncuran paket Februari tersebut adalah sebagai bentuk dukungan fiskal

agar perekonomian semakin berdaya. Secara garis besar, isi dari paket kebijakan perpajakan Februari antara lain:

- 1) Pembebasan PPN untuk rumah sederhana yang nilainya tidak lebih dari Rp 70 juta.
- 2) Memberikan kepastian hukum atas ekspor jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan PPN, contohnya dengan menegaskan jasa maklon yang didefinisikan sebagai jasa pengolahan bahan baku atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang bahan baku dan spesifikasi barang produksinya tergantung pesanan di luar negeri.
- 3) Pemberian fasilitas PPN DTP minyak goreng untuk memperbaiki kualitas minyak goreng kemasan sederhana dengan merek “Minyakita” yang higienis dengan harga terjangkau bagi masyarakat banyak termasuk ekonomi lemah.
- 4) Penyederhanaan proses pemberian pembebasan bea masuk dan cukai untuk impor barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan.
- 5) Perubahan dasar perhitungan PPN dan PPnBM atas penjualan ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) yang semula didasarkan pada harga impor menjadi harga jual. Ketentuan ini berlaku untuk hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak, yang bahan bakunya berasal dari impor.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Harmonisasi Tarif Bea Masuk Indonesia Tahun 2005-2010, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 591/KMK.010/2004 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2005 tentang Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk 2005-2010, pemerintah telah menetapkan perubahan terhadap kebijakan tarif bea masuk atas impor produk-produk pertanian, perikanan, farmasi, industri manufaktur, industri agro, industri berbasis teknologi tinggi, dan industri kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Dalam program kebijakan harmonisasi tarif bea masuk tersebut diantaranya menjadwalkan kenaikan pembebanan tarif beberapa kelompok industri untuk kategori *normal track* yang sebelumnya pada tahun 2005-2009 ditetapkan 0 persen menjadi 5 persen pada tahun 2010.

Sementara itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), proses pengalihan BPHTB telah dilaksanakan per tanggal 1 Januari 2011. Pemungutan BPHTB dapat dilakukan setelah pemerintah daerah (Pemda) menerbitkan peraturan daerah (Perda) mengenai BPHTB, serta membangun dan mempersiapkan sistem pemungutan BPHTB yang menyangkut persiapan sumber daya manusia, aturan pelaksanaan dan infrastruktur pendukung sesuai dengan standar yang diarahkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur di masing-masing daerah. Sampai dengan April 2011, belum semua daerah dapat melakukan pemungutan BPHTB. Dari total 491 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, 382 kabupaten/kota diantaranya sudah menerbitkan Perda dan melaksanakan pemungutan BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selebihnya, 82 kabupaten/kota dalam proses penerbitan Perda. Salah satu faktor yang menjadi kendala utama penerbitan Perda BPHTB adalah relatif lamanya waktu untuk proses legislasi. Selain itu, kenaikan batas minimal nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) dari Rp20 juta menjadi Rp60 juta dapat menyebabkan daerah menjadi kurang antusias untuk menerapkannya karena menurunkan potensi penerimaan BPHTB.

Selanjutnya, untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga pangan, pemerintah tetap berkomitmen untuk terus melanjutkan kebijakan pemberian insentif perpajakan, diantaranya berupa kebijakan penyesuaian 57 pos tarif bea masuk atas biji gandum, bahan baku ternak, pupuk, produk pangan dan bahan baku pangan menjadi nol persen sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 13/PMK.011/2011. Selain itu, dalam upaya meningkatkan daya saing dan melindungi industri dalam negeri, pemerintah telah memberikan insentif bea masuk berupa penyesuaian 190 pos tarif bea masuk atas bahan baku industri tertentu, jasa pelayaran, dan industri perfilman sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 80/PMK.011/2011.

Berdasarkan realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan triwulan I 2011, dan mempertimbangkan prospek ekonomi sampai dengan akhir tahun 2011, maka realisasi penerimaan perpajakan diperkirakan dapat melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2011. Meskipun penerimaan perpajakan diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan di sisi penerimaan pajak dalam negeri, namun penerimaan pajak perdagangan internasional diperkirakan akan jauh melampaui target APBN 2011

karena meningkatnya devisa impor dan adanya kecenderungan kenaikan harga CPO di pasar internasional.

Selanjutnya, realisasi PNBP dalam tahun 2010 mencapai Rp269,9 triliun, yang berarti meningkat sebesar Rp42,7 triliun atau 18,8 persen dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2009. Peningkatan PNBP tahun 2010 tersebut didorong oleh peningkatan semua sumber PNBP. Peningkatan tertinggi bersumber dari penerimaan SDA dan diikuti oleh PNBP lainnya, serta penerimaan dividen BUMN.

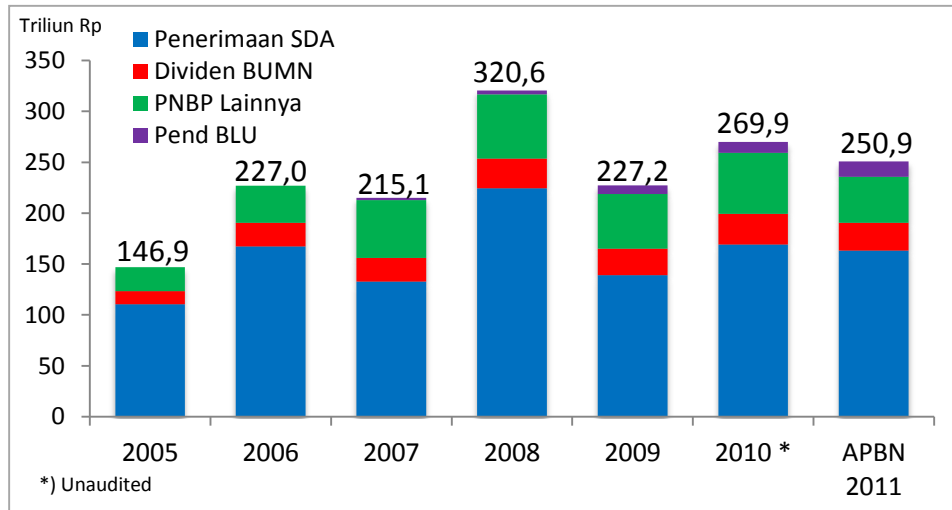
Dalam tahun 2010, realisasi penerimaan SDA, yang terdiri dari migas dan nonmigas, mencapai Rp169,4 triliun atau meningkat sebesar Rp30,4 triliun atau 21,9 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2009. Peningkatan penerimaan SDA tersebut lebih didorong oleh peningkatan penerimaan SDA migas karena adanya peningkatan *lifting* migas dan peningkatan harga ICP. Realisasi *lifting* minyak bumi dan gas bumi pada tahun 2010 masing-masing mencapai 954 ribu barel per hari dan 7.625 MSCFD². Sedangkan realisasi harga ICP mencapai rata-rata (Desember 2009-November 2010) US\$78,1 per barel, lebih tinggi dari realisasi tahun 2009 sebesar rata-rata (Desember 2008-November 2009) US\$58,6 per barel. Terkait dengan kegiatan usaha hulu migas, dalam tahun 2010 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas. Penerbitan PP biaya operasi (*cost recovery*) tersebut diharapkan dapat menurunkan biaya produksi migas. Sedangkan untuk penerimaan SDA nonmigas dalam tahun 2010 mencapai Rp16,6 triliun atau meningkat sebesar Rp3,4 triliun atau 25,8 persen dibandingkan tahun 2009, yang terutama didorong oleh peningkatan penerimaan dari pertambangan umum karena adanya peningkatan produksi dan harga komoditas tambang terutama batubara.

Sementara itu, penerimaan dividen BUMN dalam tahun 2010 mencapai Rp30,1 triliun atau meningkat sebesar Rp4,1 triliun (15,5 persen) dibandingkan realisasi tahun 2009. Peningkatan realisasi penerimaan laba BUMN tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas di pasar global yang menyebabkan peningkatan laba BUMN Pertambangan. PNBP Lainnya dalam tahun 2010 mencapai sebesar Rp59,8 triliun atau meningkat sebesar Rp6,0 triliun (11,1 persen) dibandingkan penerimaan tahun 2009.

² Metric Standard Cubic Feet per Day (MSCFD)

Realisasi PNBP tahun 2010 terutama bersumber dari pendapatan jasa dan pendapatan penjualan dan sewa. Dalam **Grafik IV.7** dapat dilihat perkembangan PNBP dalam beberapa tahun terakhir.

Grafik IV.7
Perkembangan PNBP Tahun 2005 - 2011



Sumber: Kementerian Keuangan

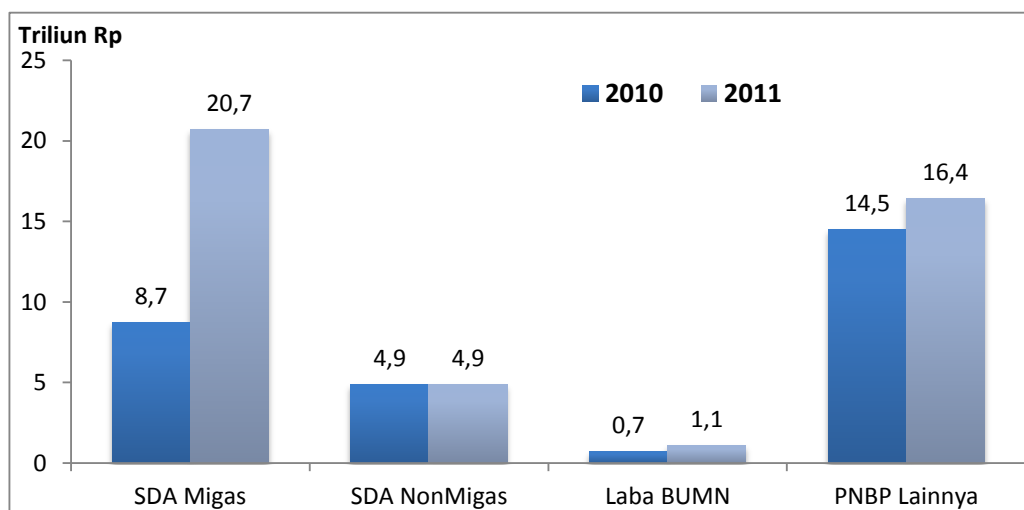
Dalam APBN 2011, PNBP ditargetkan sebesar Rp250,9 triliun, atau lebih rendah 7,0 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2010. Hal tersebut bersumber dari penurunan penerimaan migas sebesar 2,2 persen, yaitu dari Rp152,7 triliun di 2010 menjadi 149,3 triliun. Penurunan penerimaan SDA migas tersebut disebabkan oleh adanya tambahan penerimaan SDA migas dari penyelesaian kewajiban migas PT Pertamina atas penggunaan bahan bakar minyak dan pelumas oleh Tentara Nasional Indonesia sebesar Rp5,0 triliun pada tahun 2010. Sementara itu, penerimaan laba BUMN ditargetkan sebesar Rp27,6 triliun, atau lebih rendah 8,3 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2010. Penurunan target dividen BUMN di tahun 2011 disebabkan oleh perkiraan lebih rendahnya laba PT Pertamina terkait dengan kebijakan investasi perusahaan. Adapun PNBP lainnya direncanakan menjadi Rp45,2 triliun atau lebih rendah 24,5 persen dari realisasi 2010 karena perkiraan lebih rendahnya pendapatan bunga dan pendapatan lain-lain.

Untuk mencapai target PNBP 2011 tersebut, langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah yaitu: (i) optimalisasi penerimaan SDA, terutama SDA migas melalui upaya pencapaian target produksi/*lifting* minyak mentah; (ii) peningkatan produksi komoditas tambang dan mineral serta perbaikan peraturan di sektor pertambangan;

(iii) menggali potensi penerimaan di sektor kehutanan selain dari hutan kayu dan nonkayu; (iv) optimalisasi dividen BUMN dengan tetap mempertimbangkan peningkatan efisiensi dan kinerja BUMN melalui optimalisasi investasi (*capital expenditure*); (v) peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi pada PNBP K/L; dan (vi) *review* atas peraturan yang terkait dengan jenis dan tarif PNBP K/L.

Sampai dengan triwulan I 2011, realisasi PNBP telah mencapai Rp43,4 triliun atau 17,3 persen dari target dalam APBN 2011. Kontribusi tertinggi dalam pencapaian PNBP triwulan I tersebut bersumber dari penerimaan SDA migas sebesar Rp20,7 triliun atau 13,9 persen dari target terutama disebabkan oleh tingginya harga ICP yang mengikuti perkembangan harga minyak dunia, meskipun dari sisi produksi minyak mentah masih rendah. Realisasi PNBP lainnya sebesar Rp16,4 triliun atau 36,4 persen dari target dipengaruhi oleh tingginya realisasi pendapatan jasa pelayanan K/L, penerimaan SDA nonmigas mencapai Rp4,9 triliun atau 35,5 persen dari target, bagian atas laba BUMN sebesar Rp1,1 triliun atau 3,8 persen dari target yang dipengaruhi oleh RUPS, sebagian besar BUMN baru dilaksanakan setelah semester I, dan pendapatan BLU Rp0,4 triliun atau 2,4 persen dari target. Perkembangan PNBP triwulan I 2009-2011 dapat dilihat pada **Grafik IV.8**.

Grafik IV. 8
Realisasi PNBP Triwulan I, 2010 - 2011



Sumber : Kementerian Keuangan

Selanjutnya, pemerintah berupaya untuk mencapai target PNBP yang telah ditetapkan dalam APBN 2011 dengan berbagai langkah kebijakan dan mengatasi berbagai kendala yang ada. Dari sisi penerimaan SDA migas, pemerintah menghadapi kendala dalam

pencapaian target *lifting* minyak sebesar 970 ribu barel per hari. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut antara lain mendorong upaya optimalisasi produksi pada lapangan *existing*, meningkatkan koordinasi untuk penyelesaian masalah terkait regulasi, perijinan dan tumpang tindih lahan.

Pemerintah telah mengeluarkan PP nomor 20 tahun 2011 tentang perubahan atas PP nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan dengan merubah ketentuan yang terkait dengan penggunaan kapal asing untuk kegiatan lainnya, terutama untuk kegiatan usaha hulu migas. Penggunaan kapal berbendera asing dapat digunakan untuk kegiatan usaha hulu migas yakni untuk survei minyak bumi dan pengeboran sepanjang belum tersedia atau belum cukup tersedia kapal berbendera Indonesia. Untuk penerimaan atas laba BUMN, laporan audit diwajibkan untuk selesai pada triwulan I sehingga diharapkan RUPS seluruh BUMN dapat dilaksanakan sebelum pertengahan tahun. Sedangkan untuk PNBP lainnya, pemerintah terus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang ada antara lain melalui perbaikan pelayanan dan administrasi K/L.

2. Belanja Negara

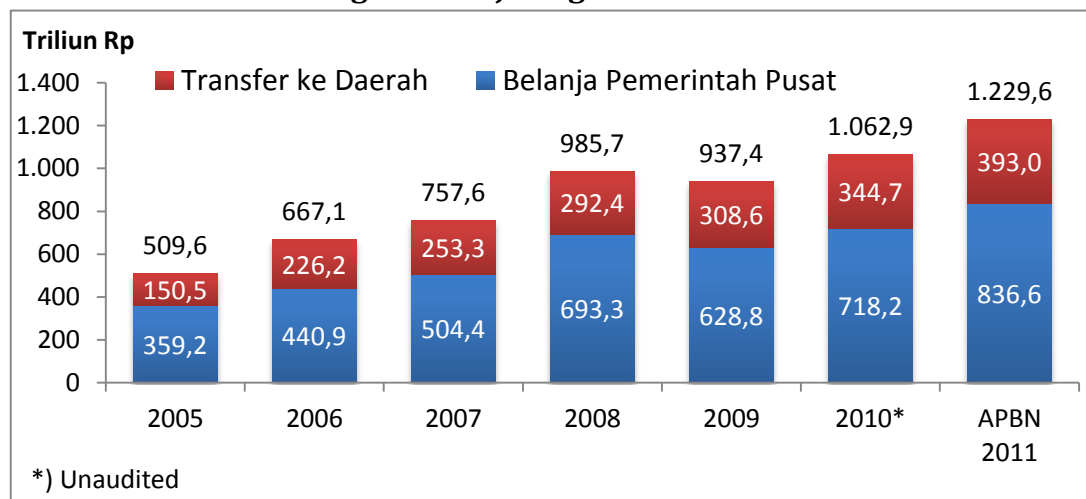
Perkembangan belanja negara dalam tujuh tahun terakhir menunjukkan peningkatan secara signifikan, yaitu dari Rp509,6 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp1.229,6 triliun pada tahun 2011. Komposisi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah rata-rata berkisar pada 68 persen dan 32 persen dari belanja negara (lihat pada **Grafik IV.9**).

Dalam rangka mendukung program-program pembangunan dalam tahun 2010, APBN mempunyai peran yang signifikan dan nyata melalui anggaran belanja negara. Prioritas pembangunan dalam tahun 2010, diantaranya adalah pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan dan infrastruktur.

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, pada tahun 2010, realisasi belanja negara mencapai Rp1.062,9 triliun, atau 94,4 persen dari pagu APBN-P 2010. Dari realisasi anggaran belanja negara tersebut, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp718,2 triliun atau 91,9 persen dari pagu APBN-P 2010, sedangkan realisasi transfer ke daerah mencapai Rp344,7 triliun atau 100,0 persen dari pagunya. Jika dibandingkan dengan tahun 2009, realisasi belanja negara pada tahun 2010

meningkat 13,4 persen, yang berasal dari peningkatan belanja pemerintah pusat sebesar 14,2 persen dan transfer ke daerah sebesar 11,7 persen.

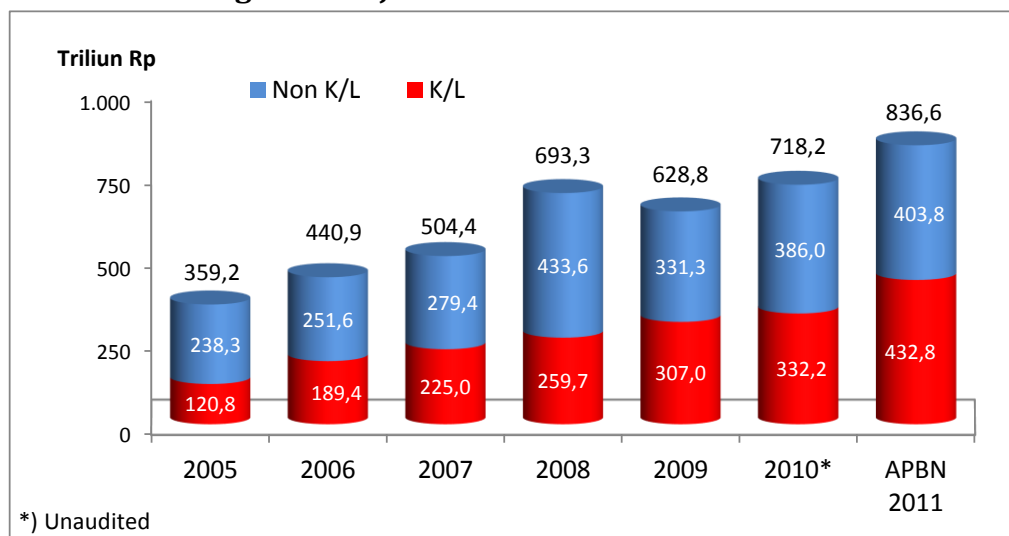
Grafik IV.9
Perkembangan Belanja Negara Tahun 2005 – 2011



Sumber: Kementerian Keuangan

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L. Realisasi belanja K/L pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp332,2 triliun atau 8,2 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2009. Belanja non K/L untuk tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi Rp386,0 triliun atau meningkat sebesar 16,5 persen dibandingkan realisasinya di 2009. Perkembangan belanja pemerintah pusat sejak tahun 2005 dapat dilihat pada **Grafik IV.10**.

Grafik IV.10
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2005 - 2011



Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan pencapaian realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2010 tersebut, pemerintah masih menghadapi beberapa kendala, utamanya dalam realisasi belanja K/L: (i) belum optimalnya penyerapan anggaran; (ii) masih menumpuknya realisasi belanja K/L pada akhir tahun; dan (iii) belum optimalnya kualitas belanja K/L. Berbagai upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam rangka percepatan penyerapan anggaran, yaitu: (i) pelaksanaan monitoring penyerapan belanja K/L secara berkala untuk mendeteksi penyerapan anggaran K/L yang belum optimal; (ii) penyempurnaan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan merevisi Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 menjadi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; (iii) penyederhanaan mekanisme pelaksanaan APBN dengan merevisi Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 menjadi Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; (iv) Penyederhanaan mekanisme revisi anggaran; (v) percepatan pencairan anggaran dengan penerbitan PMK Nomor 170 Tahun 2010; dan (vi) penyederhanaan format DIPA untuk meningkatkan fleksibilitas bagi K/L dalam pelaksanaan anggaran.

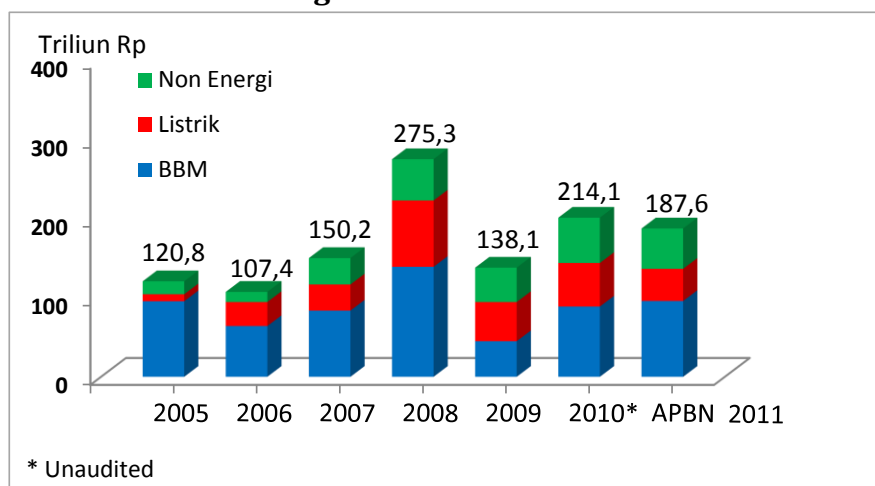
Berdasarkan jenisnya, belanja pemerintah pusat pada tahun 2010 dapat dilihat bahwa realisasi belanja pegawai mencapai Rp148,2 triliun atau 91,1 persen dari pagu, yang dipengaruhi oleh penghematan beberapa anggarannya, seperti untuk pegawai baru, dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Realisasi belanja pegawai tahun 2010 menunjukkan kenaikan 16,1 persen dari realisasi tahun 2009. Sementara itu, realisasi belanja barang mencapai Rp97,5 triliun atau 86,6 persen dari pagu, yang menunjukkan kenaikan 20,9 persen dari realisasi tahun 2009. Dalam periode yang sama, realisasi belanja modal hanya mencapai Rp79,5 triliun atau 83,7 persen dari pagu, yang menunjukkan kenaikan 4,8 persen dari realisasi tahun 2009. Realisasi belanja modal dalam tahun 2010 menghadapi tantangan, diantaranya kondisi iklim dan bencana alam yang terjadi di tahun 2010, serta kendala dalam pengadaan/pembebasan tanah.

Realisasi belanja subsidi pada tahun 2010 yang mencakup subsidi energi dan subsidi non-energi mencapai Rp214,2 triliun atau 55,1 persen lebih tinggi dari realisasi 2009. Realisasi subsidi BBM 2010 mencapai Rp82,4 triliun atau meningkat 82,8 persen dari realisasi 2009. Hal ini disebabkan oleh tingginya realisasi harga ICP di pasar internasional yang mencapai rata-rata (Januari-Desember) US\$79,4/barel, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2009 yang mencapai US\$61,6/barel. Selain itu, membengkaknya subsidi BBM juga disebabkan oleh meningkatnya volume konsumsi

BBM bersubsidi yang mencapai 38,2 juta kiloliter (kl) pada tahun 2010, lebih tinggi dari realisasi 2009 yang mencapai 37,9 juta kl. Selanjutnya, kenaikan harga minyak mentah juga turut mendorong peningkatan subsidi listrik hingga mencapai Rp57,6 triliun pada tahun 2010 atau meningkat 16,3 persen dari realisasi 2009. Selain disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah, peningkatan subsidi listrik tersebut juga diakibatkan oleh penambahan konsumsi BBM sebagai bahan bakar pembangkit listrik karena terhambatnya pasokan gas dan batubara.

Sementara itu, realisasi subsidi non-energi sampai dengan akhir tahun 2010 mencapai Rp74,2 triliun atau 70,6 persen lebih tinggi dari realisasi 2009. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya realisasi subsidi non-energi 2010 adalah pembayaran kekurangan PPN DTP atas BBM bersubsidi tahun 2003-2005 dan tahun 2009 sebesar Rp22,9 triliun, yang ditampung pada belanja subsidi pajak. Selain itu, meningkatnya realisasi subsidi non-energi juga berkaitan dengan adanya pemberian subsidi pangan ke-13 untuk masyarakat miskin. Langkah tersebut dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan sebagai dampak dari kenaikan harga komoditas pangan dunia yang berimbas di dalam negeri. Untuk menjaga kenaikan harga pangan, pemerintah mengambil beberapa langkah komprehensif antara lain melalui pelaksanaan operasi pasar, penggunaan dana stabilisasi harga, peningkatan stok beras, peningkatan koordinasi dengan Bank Indonesia, serta penurunan tarif bea masuk impor beras untuk sementara waktu. Perkembangan subsidi periode 2005-2011 dapat dilihat pada **Grafik IV.11**.

Grafik IV.11
Perkembangan Subsidi Tahun 2005-2011



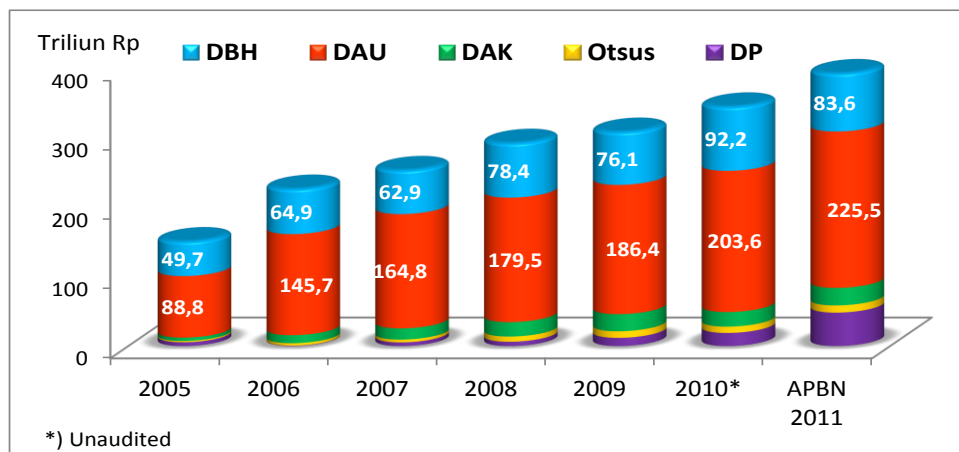
Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi pembayaran bunga utang pada tahun 2010 mencapai 83,7 persen dari yang direncanakan dalam APBN-P 2010. Realisasi pembayaran bunga utang pada tahun 2010 terdiri dari bunga utang dalam negeri sebesar Rp61,5 triliun atau 85,7 persen dari pagu dan bunga utang luar negeri sebesar Rp26,9 triliun atau 79,6 persen. Lebih rendahnya realisasi tersebut terutama dipengaruhi oleh lebih rendahnya tingkat bunga SBI 3 bulan dan adanya penguatan nilai tukar rupiah.

Untuk mendukung pelaksanaan program-program perlindungan kesejahteraan masyarakat, realisasi belanja bantuan sosial dalam tahun 2010 mencapai Rp68,6 triliun atau 96,4 persen dari pagu. Pencapaian realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 7,1 persen dari realisasi tahun 2009. Anggaran belanja bantuan sosial tersebut antara lain digunakan untuk melaksanakan program BOS, Jamkesmas, PNPM, PKH, serta penanggulangan bencana alam yang terjadi pada tahun 2010.

Di sisi transfer ke daerah, realisasi pada tahun 2010 mencapai Rp344,7 triliun atau 100,0 persen dari pagu APBN-P 2010. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2009, realisasi transfer ke daerah tahun 2010 meningkat sebesar Rp36,2 triliun atau sebesar 11,7 persen. Untuk dana perimbangan, realisasinya dalam tahun 2010 mencapai Rp316,7 triliun atau 100,7 persen dari pagu yang direncanakan dalam APBN-P 2010. Tingginya realisasi dana perimbangan tersebut diantaranya disebabkan oleh meningkatnya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp92,2 triliun atau 102,9 persen dibandingkan pagunya. Sementara itu, realisasi dana otonomi khusus dan penyesuaian dalam tahun 2010 sebesar Rp28,0 triliun atau 92,7 persen dari alokasinya.

Grafik IV.12
Perkembangan Trasfer ke Daerah Tahun 2005-2011



Sumber: Kementerian Keuangan

Langkah-langkah kebijakan transfer ke daerah dalam tahun 2010 dilakukan melalui penyempurnaan perhitungan dan alokasi komponen dana perimbangan yaitu dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Penyempurnaan alokasi DBH dilakukan antara lain melalui peningkatan akurasi data DBH. Penyempurnaan alokasi DAU juga dilakukan melalui penerapan pembobotan masing-masing variabel dalam formula yang diarahkan untuk memperbaiki pemerataan kemampuan keuangan daerah. Penyempurnaan alokasi DAK dilakukan melalui penajaman kriteria agar lebih tepat sasaran.

Terkait dengan pengalokasian dana penyesuaian yang ditujukan untuk menampung program-program tertentu yang bersifat *ad-hoc*, pada tahun 2010 pemerintah telah mengalokasikan dana untuk beberapa jenis program antara lain: (i) Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD), yang bertujuan untuk mempercepat realisasi pembangunan di daerah; (ii) dana tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang bertujuan untuk meningkatkan penghasilan guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi; (iii) Dana Insentif Daerah (DID) yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kinerja daerah, diberikan sebagai penghargaan kepada daerah yang berprestasi dari segi pengelolaan keuangan dan perekonomian daerah; (iv) Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD); dan (v) Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP).

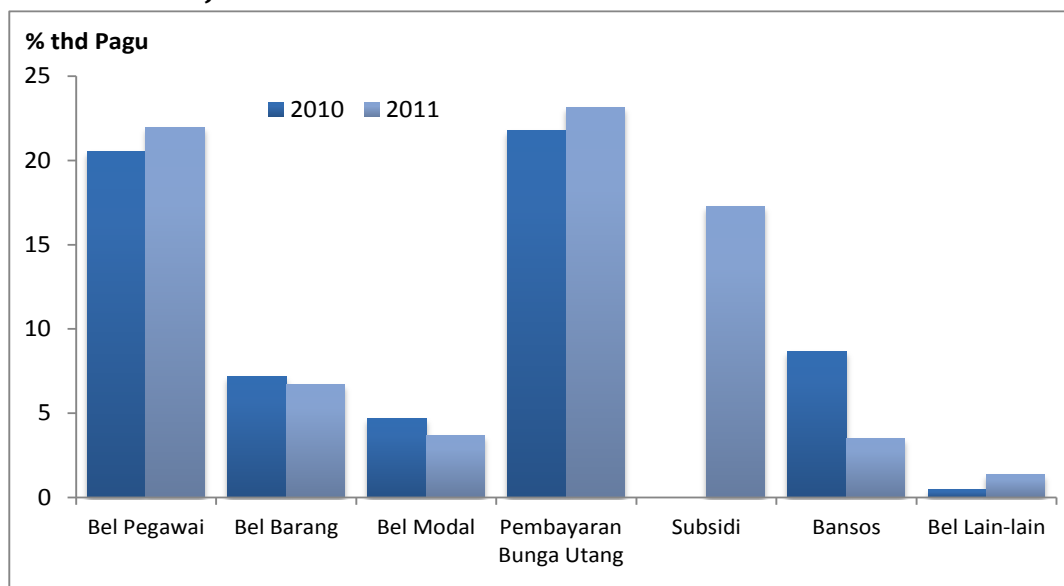
Pada tahun 2011, pemerintah tetap akan melaksanakan kebijakan ekspansif dalam perekonomian dengan didukung defisit anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp124,7 triliun atau 1,8 persen terhadap PDB. Penetapan besaran defisit anggaran ini sejalan dengan upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal.

Sesuai dengan tema RKP tahun 2011 dan memperhatikan proyeksi indikator ekonomi makro dan pembangunan, anggaran belanja negara pada APBN 2011 direncanakan sebesar Rp1.229,6 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp836,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp393,0 triliun. Secara umum, arah kebijakan belanja pemerintah pusat pada APBN 2011 tersebut antara lain untuk: (i) memperbaiki kesejahteraan aparatur negara guna mendukung perbaikan kualitas

pelayanan publik; (ii) memperluas kebijakan reformasi birokrasi; (iii) menjaga kelancaran kegiatan operasional pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik; (iv) pembangunan dan peningkatan infrastruktur dalam rangka meningkatkan *domestic connectivity*; (v) meningkatkan ketahanan pangan dan energi; (vi) melanjutkan program prioritas perlindungan sosial bagi masyarakat; serta (vii) meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dengan didukung anggaran 20 persen dari APBN. Sementara itu, kebijakan transfer ke daerah diarahkan untuk: (i) mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah; (ii) meningkatkan kualitas pelayanan publik; (iii) meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan APBD; dan (iv) mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Pada triwulan I 2011, realisasi belanja negara mencapai Rp208,0 triliun atau 16,9 persen dari pagu APBN 2011, dengan rincian realisasi belanja pusat mencapai Rp115,4 triliun atau 13,8 persen dari pagu APBN 2011 dan transfer ke daerah sebesar Rp92,6 triliun atau 23,6 persen dari pagu APBN 2011. Pencapaian realisasi belanja pusat tersebut terutama didominasi oleh realisasi belanja pegawai sebesar Rp39,8 triliun atau 22,0 persen dari pagu, subsidi sebesar Rp32,4 triliun atau 17,3 persen dari pagu dan pembayaran bunga utang sebesar Rp26,7 triliun atau 23,1 persen dari pagu. Sementara itu, realisasi belanja barang mencapai Rp9,2 triliun atau 6,7 persen dari pagu dan realisasi belanja modal mencapai Rp5,0 triliun atau 3,7 persen dari pagu.

Grafik IV.13
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Triwulan I Tahun 2010 dan 2011

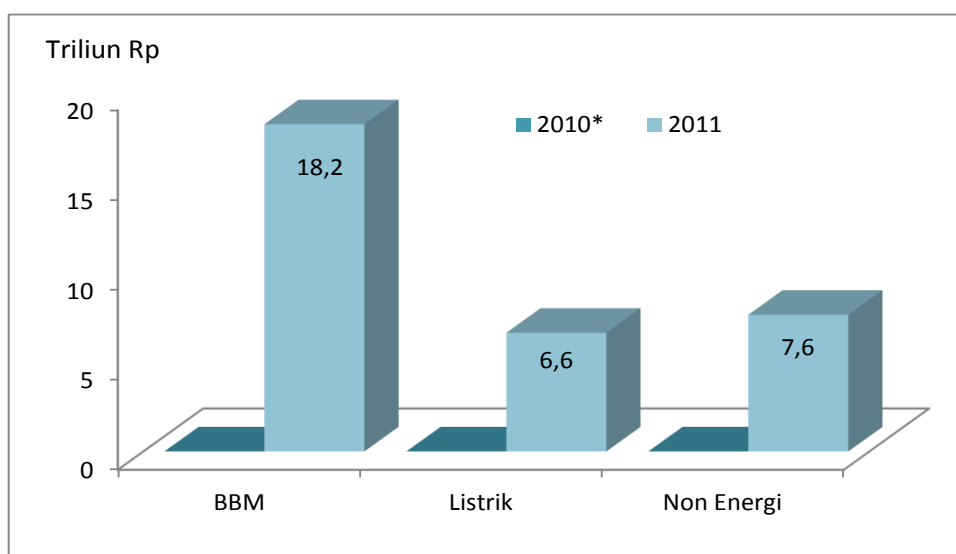


Sumber: Kementerian Keuangan

Apabila dilihat perbandingan antara realisasi triwulan I tahun 2010 dengan triwulan I tahun 2011 (lihat **Grafik IV.13**), terlihat bahwa realisasi 2011 sebagian lebih tinggi dari tahun 2010. Beberapa kondisi yang mempengaruhi optimalisasi penyerapan belanja sampai dengan triwulan I antara lain; (i) dominan masih dalam tahap penyelesaian administratif; (ii) pengaruh cuaca; (iii) pengadaan tanah; dan (iv) keterbatasan kapasitas pihak ketiga di beberapa daerah.

Sementara itu, realisasi belanja subsidi sampai dengan triwulan I 2011 mencapai Rp32,4 triliun, meningkat dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2010 (lihat **Grafik IV.14**). Peningkatan tersebut terutama didominasi oleh realisasi subsidi energi yang mencapai 24,8 triliun atau 18,1 persen dari pagu. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan realisasi subsidi tahun 2011, antara lain: (i) tingginya realisasi harga ICP yang rata-rata sebesar US\$104,5/barel selama triwulan I 2011, lebih tinggi dari asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar US\$80/barel; (ii) meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi selama triwulan I 2011 jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya; (iii) adanya perubahan komposisi energi input pembangkit PT PLN (Persero) sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan penggunaan bahan bakar minyak sebagai konsekuensi tidak tercapainya pasokan gas; dan (iv) kebijakan pencairan subsidi pangan lebih awal untuk mengurangi beban biaya.

Grafik IV.14
Realisasi Belanja Subsidi Triwulan I Tahun 2010 dan 2011



*Belanja subsidi terealisasi setelah triwulan I 2010

Sumber: Kementerian Keuangan

Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menekan peningkatan subsidi BBM adalah melakukan pengaturan distribusi BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut sedianya akan dilaksanakan pada 1 April 2011, namun hingga saat ini masih ditunda. Hal ini dikarenakan harga minyak mentah masih sangat tinggi sehingga perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan BBM nonsubsidi akan sangat lebar. Penundaan tersebut memberikan waktu lebih banyak bagi pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur yang akan menunjang pelaksanaan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi.

Selain kebijakan pengaturan BBM bersubsidi, beberapa langkah yang akan dilaksanakan untuk mengendalikan besaran subsidi adalah: (i) penataan ulang pola pendistribusian BBM melalui pengurangan jumlah *dispenser* dan pasokan BBM bersubsidi di kawasan elit dan tertentu lainnya; (ii) memperbanyak jumlah *dispenser* dan pasokan BBM nonsubsidi; (iii) meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi; (iv) melanjutkan konversi minyak tanah ke *Liquified Petroleum Gas* (LPG); dan (v) melakukan sosialisasi dan kampanye hemat BBM.

Sementara itu, kebijakan yang terkait dengan pengendalian anggaran subsidi listrik tahun 2011 dilakukan melalui efisiensi internal PT PLN dan penurunan Biaya Pokok Produksi (BPP) Tenaga Listrik. Upaya penurunan BPP tersebut dilakukan melalui program peningkatan efisiensi dengan cara optimalisasi pembangkit tenaga listrik dan penurunan susut jaringan (*losses*), diversifikasi energi primer di pembangkit tenaga listrik melalui optimalisasi penggunaan gas, peningkatan penggunaan batubara dan panas bumi. Namun demikian, upaya penurunan BPP Tenaga Listrik tersebut di atas mengalami beberapa kendala, antara lain: (i) keterlambatan beroperasinya beberapa proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW Tahap I; (ii) tidak terpenuhinya kebutuhan gas sesuai kontrak yang mengakibatkan naiknya volume BBM untuk mensubstitusi kekurangan pasokan gas; dan (iii) adanya kenaikan penggunaan BBM pada beberapa pembangkit listrik untuk mengatasi pemadaman di beberapa wilayah.

Sementara itu, terkait dengan kenaikan harga pangan pokok yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi gejolak kenaikan harga pangan pokok tersebut. Upaya-upaya

tersebut antara lain: (i) melakukan operasi pasar akan dilakukan di seluruh Indonesia terutama di daerah yang mengalami kenaikan harga beras cukup tinggi, termasuk melalui pola komersial; (ii) pemberian insentif fiskal perdagangan atas ekspor dan impor terkait dengan keringanan Bea Masuk dan fasilitas PPN DTP; (iii) meningkatkan stok pangan yang cukup, di tingkat pusat maupun di daerah dan di masyarakat (lumbung pangan) untuk mencegah spekulasi; serta (iv) menjaga kelancaran distribusi angkutan pangan pokok.

Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi dampak negatif akibat gejolak harga pangan yang terjadi pada tahun 2011 ini, pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan antara lain: (i) pemberian kewenangan kepada Kementerian Pertanian untuk menyalurkan bantuan biaya usaha tani bagi daerah atau petani yang mengalami puso dan terkena bencana akibat iklim ekstrim (Inpres Nomor 5 Tahun 2011); (ii) pemberian Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) kepada petani melalui kelompok tani, yang meliputi benih Padi, Jagung, dan Kedelai (Perpres Nomor 14 Tahun 2011); (iii) Pengalokasian anggaran untuk Cadangan Benih Nasional (CBN), Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta Cadangan Stabilisasi Harga Pangan; dan (iv) fleksibilitas pembelian harga gabah petani (Inpres Nomor 8 tahun 2011).

Untuk mendukung desentralisasi fiskal, pada APBN 2011 pemerintah mengalokasikan dana transfer ke daerah sebesar Rp393,0 triliun yang meningkat Rp48,2 triliun atau 14,0 persen dibandingkan realisasi tahun 2010. Secara rinci, alokasi belanja transfer ke daerah dalam APBN 2011 terdiri dari Dana Perimbangan serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Penyesuaian. Dalam APBN 2011, alokasi dana perimbangan adalah sebesar Rp334,3 triliun, meliputi DAU sebesar Rp225,5 triliun, DAK sebesar Rp25,2 triliun, dan DBH sebesar Rp83,6 triliun. Alokasi DBH dalam APBN 2011 mengalami penurunan sebesar Rp8,6 triliun dibandingkan realisasi tahun 2010. Hal ini karena mulai 1 Januari 2011, BPHTB tidak lagi termasuk dalam komponen DBH, karena jenis pajak ini telah dialihkan menjadi pajak daerah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dana Otsus dan Penyesuaian dalam APBN 2011 dialokasikan sebesar Rp58,7 triliun, terdiri dari Rp10,4 triliun alokasi Dana Otsus dan Rp48,2 triliun alokasi Dana Penyesuaian. Secara total dana ini meningkat Rp30,7 triliun atau 109,6 persen

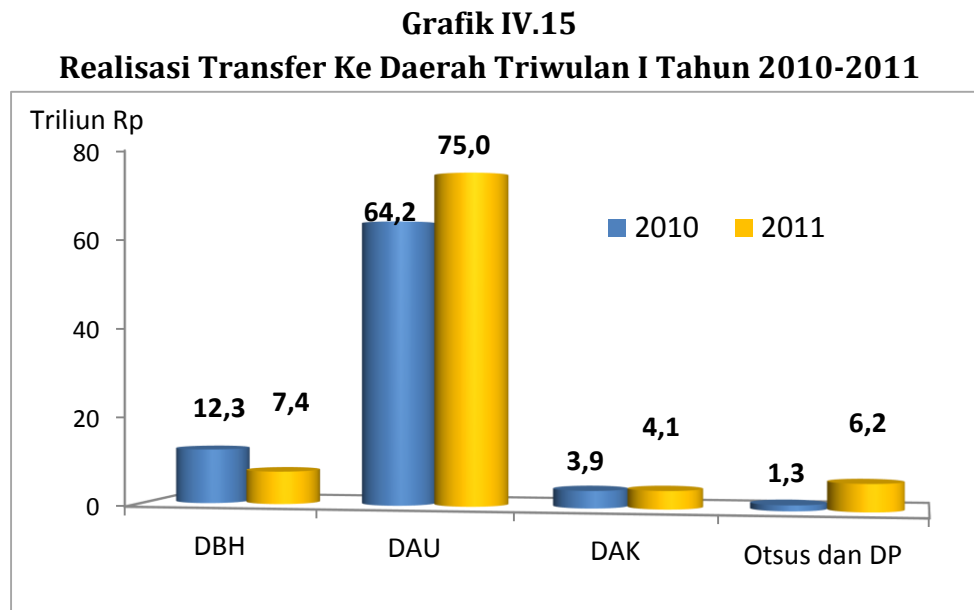
dibandingkan realisasi 2010. Dana Otsus yang dialokasikan setara 2 persen dari DAU nasional atau sebesar Rp4,5 triliun untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Penggunaan Dana Otsus di kedua provinsi tersebut diutamakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan. Selain Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Dana Otsus yang setara 2 persen dari DAU nasional juga dialokasikan untuk Provinsi NAD. Penggunaan Dana Otsus sebesar Rp4,5 triliun di Provinsi NAD diarahkan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan Otsus kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga dialokasikan dana tambahan untuk infrastruktur sebesar Rp1,4 triliun yang penggunaannya diutamakan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur.

Dalam APBN 2011, dana penyesuaian untuk kesejahteraan guru dialokasikan dalam bentuk dana tambahan penghasilan guru PNSD sebesar Rp3,7 triliun dan dana tambahan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp18,5 triliun. Dana tambahan untuk TPG dialokasikan sejalan dengan PP Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, yang dimulai tahun 2010 sebagai komponen DAU. Dana tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitas sesuai dengan kewenangannya. Selain itu terdapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp16,8 triliun yang pada tahun sebelumnya dialokasikan sebagai bagian dari belanja pusat.

Dana penyesuaian lainnya yang terkait dengan infrastruktur adalah Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) yang dialokasikan sebesar Rp7,7 triliun dan kurang bayar dana sarana dan prasarana infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp0,1 triliun. Sementara itu, dalam rangka mendorong kinerja Pemda, pemerintah mengalokasikan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp1,4 triliun bagi daerah yang dianggap berprestasi dengan kriteria keuangan, kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan yang relatif cukup baik, serta tetap mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sampai dengan 31 Maret 2011, realisasi transfer ke daerah dalam APBN 2011 sudah mencapai Rp92,6 triliun atau 23,6 persen dibandingkan dengan pagunya. Realisasi transfer ke daerah tersebut terdiri dari realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp86,5

triliun atau 25,9 persen serta Dana Otsus dan Penyesuaian sebesar Rp6,2 triliun atau 10,5 persen dibandingkan alokasi dalam APBN 2011. Secara rinci, realisasi Dana Perimbangan meliputi DBH Rp7,4 triliun atau 8,9 persen, DAU sebesar Rp75,0 triliun atau 33,3 persen, dan DAK sebesar Rp4,1 triliun atau 16,1 persen. Perbandingan realisasi transfer ke daerah sampai dengan triwulan I tahun 2010 dan triwulan I tahun 2011, disajikan dalam **Grafik IV.15** berikut.



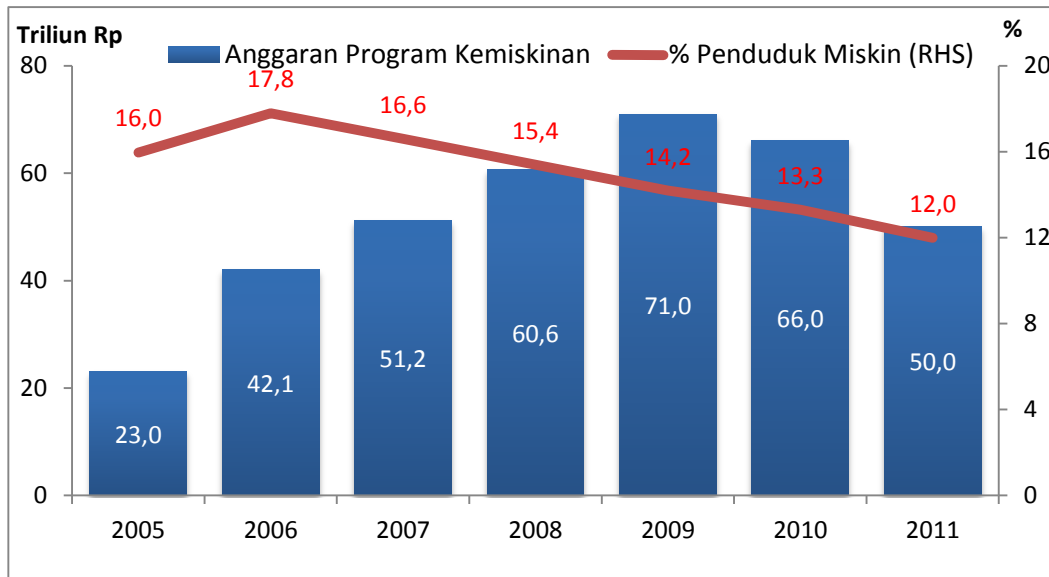
Sumber: Kementerian Keuangan.

Berdasarkan realisasi belanja negara di atas, pencapaian sasaran pembangunan juga mengalami peningkatan yang ditandai dengan: (i) meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi 6,1 persen pada tahun 2010 dari 4,5 persen pada tahun 2009; (ii) penurunan tingkat kemiskinan menjadi 13,3 persen pada tahun 2010 dari 14,2 persen pada tahun 2009; dan (iii) penurunan angka pengangguran terbuka menjadi 7,1 persen pada tahun 2010 dari 7,9 persen pada tahun 2009. Sasaran pembangunan tersebut dicapai oleh pemerintah melalui upaya peningkatan kualitas belanja yang dilakukan dengan meningkatkan ketepatan pengalokasian pada sektor-sektor yang mempunyai *multiplier effect* terhadap perekonomian. Perbaikan kualitas belanja tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan terjaganya pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi, yang diikuti dengan semakin meningkatnya lapangan kerja dan menurunnya tingkat kemiskinan.

Pada tahun 2011, pemerintah mengalokasikan anggaran program kemiskinan sebesar Rp50 triliun. Anggaran ini untuk mendukung upaya pemerintah menurunkan angka

kemiskinan pada kisaran 11,5-12,5 persen dari jumlah penduduk sebagaimana terlihat pada **Grafik IV.16** berikut.

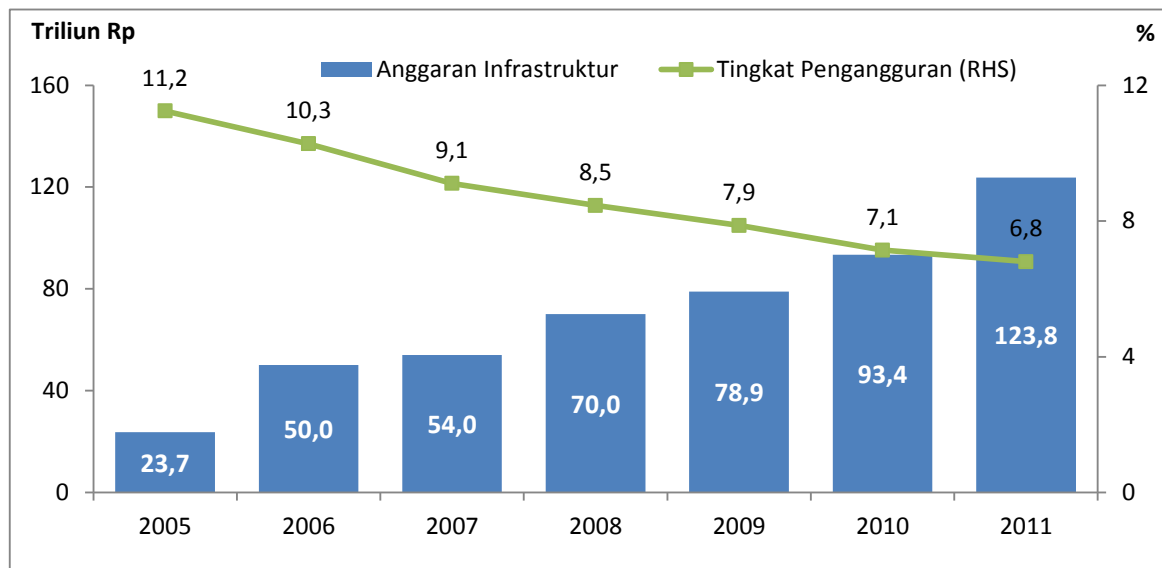
Grafik IV.16
Perkembangan Anggaran Kemiskinan terhadap Tingkat Kemiskinan
Tahun 2005 - 2011



Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS

Sementara itu, upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan antara lain melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tersebut mencakup infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial, dan infrastruktur administrasi, antara lain berupa jaringan listrik, telekomunikasi, sanitasi, jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, dan perumahan. Peningkatan dukungan untuk pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan daya saing investasi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas lapangan kerja, yang pada akhirnya dapat mempercepat upaya pengurangan tingkat pengangguran. Pada tahun 2011, anggaran infrastruktur sebesar Rp123,9 triliun, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan tingkat pengangguran sekitar 6,8 persen dari jumlah angkatan kerja sebagaimana terlihat pada **Grafik IV.17**

Grafik IV.17
Perkembangan Anggaran Infrastruktur terhadap Tingkat Pengangguran
Tahun 2005 - 2011



Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS

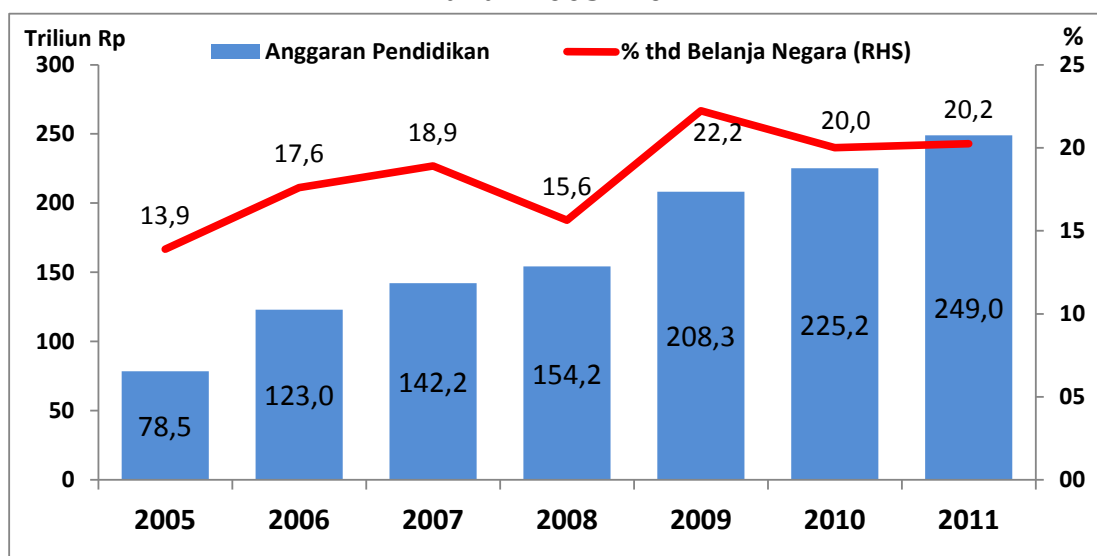
Anggaran infrastruktur tersebut juga diarahkan untuk melaksanakan program-program prioritas, antara lain program penyelenggaraan jalan, program pengelolaan sumber daya air, program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut, serta program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara.

Selain itu, pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional dan kesenjangan pembangunan antarwilayah melalui peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta peningkatan "*domestic connectivity*". Sistem irigasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan nasional. Sementara itu, peningkatan "*domestic connectivity*" berupa peningkatan kapasitas jalan pada lintas utama (pantai utara Jawa, lintas timur Sumatera, lintas selatan Kalimantan, lintas barat Sulawesi, trans Maluku, Nusa Tenggara dan Papua) serta "*domestic interconnectivity*" dengan penyediaan jasa akses telekomunikasi di perdesaan yang diharapkan dapat menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

Sejalan dengan amanat konstitusi, pada tahun 2011 pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20,2 persen dari APBN. Besarnya alokasi dana pendidikan tersebut meningkatkan ruang gerak pemerintah dalam melaksanakan peningkatan kualitas program-program pendidikan. Selain itu, disediakan pula bantuan operasional sekolah (BOS) untuk seluruh sekolah yang menyelenggarakan wajib belajar pendidikan

dasar 9 tahun. Program BOS dimaksudkan untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan meringankan beban-biaya pendidikan bagi siswa. Di samping itu, pemerintah juga menyediakan beasiswa bagi siswa miskin untuk semua jenjang pendidikan. Perkembangan anggaran pendidikan tahun 2005 hingga 2011 dapat dilihat pada **Grafik IV.18** berikut.

Grafik IV.18
Perkembangan Anggaran Pendidikan terhadap Belanja Negara
Tahun 2005 - 2011



Sumber: Kementerian Keuangan

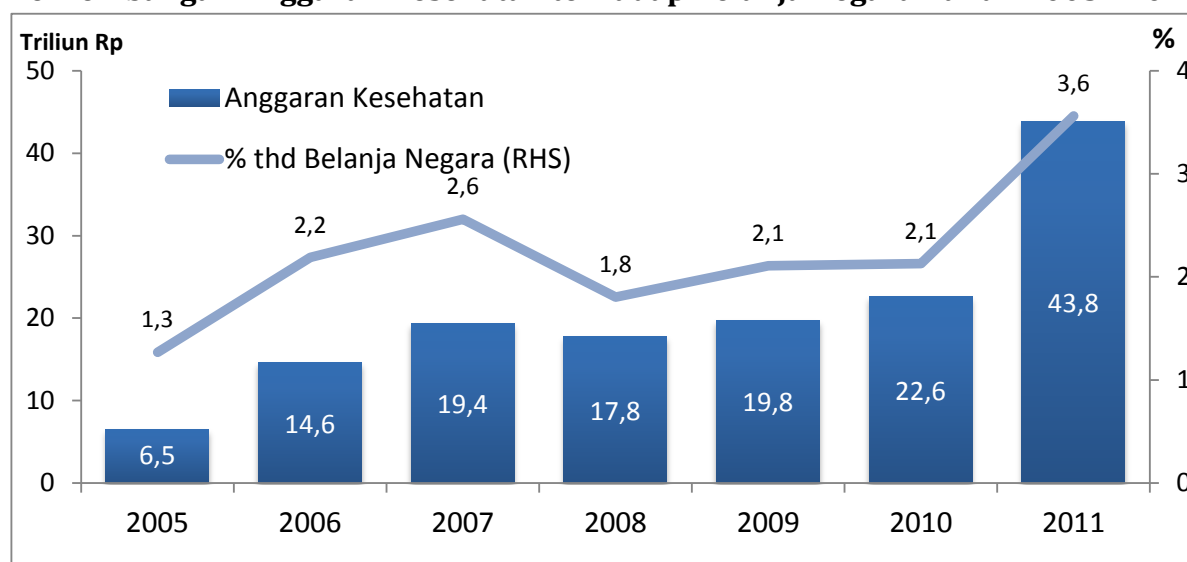
Selain bidang pendidikan, dalam tahun anggaran 2011, pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menitikberatkan pembangunan di bidang kesehatan melalui pendekatan pencegahan (*preventive*) maupun penyembuhan (*curative*), peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan termasuk penyediaan akses kepada air bersih serta pengurangan wilayah kumuh. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan program-program di bidang kesehatan yang diharapkan mampu terus meningkatkan angka harapan hidup masyarakat menjadi 72 tahun pada tahun 2014.

Anggaran kesehatan dalam APBN 2011 dialokasikan sebesar Rp43,8 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan alokasi anggaran kesehatan tahun 2010 sebesar Rp22,6 triliun (lihat **Grafik IV.19**). Alokasi anggaran tersebut digunakan pemerintah untuk mengembangkan program-program kesehatan, yaitu: **pertama**, program pembinaan upaya kesehatan; **kedua**, program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak; **ketiga**,

program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; **keempat**, program kefarmasian dan alat kesehatan; **kelima**, program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; **keenam**, program kependudukan dan keluarga berencana; **ketujuh**, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; dan **kedelapan**, program koordinasi pengembangan kebijakan kesejahteraan rakyat. Diharapkan, dengan dilaksanakannya program-program tersebut, pemerintah dapat mencapai peningkatan umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi kurang gizi pada anak balita.

Grafik IV.19

Perkembangan Anggaran Kesehatan terhadap Belanja Negara Tahun 2005 - 2011



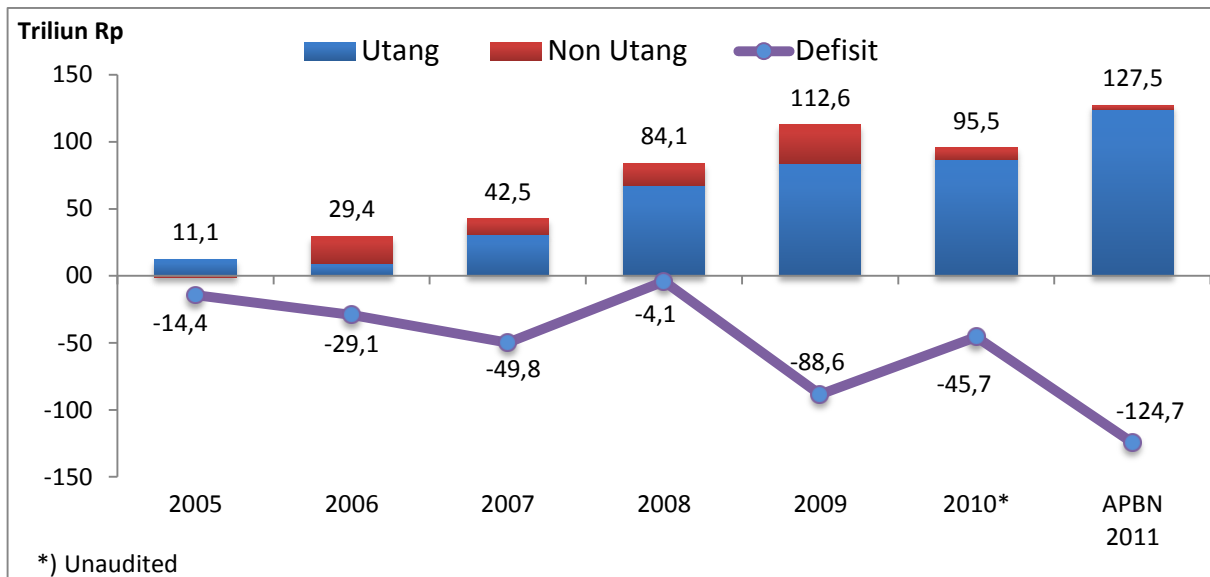
Sumber: Kementerian Keuangan

3. Pembiayaan Anggaran

Pada tahun 2010, realisasi defisit sebesar Rp45,8 triliun atau 0,7 persen PDB. Realisasi tersebut lebih rendah dari target APBN-P 2010 sebesar Rp133,7 triliun atau 2,1 persen PDB dan juga lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar 1,6 persen PDB. Sementara itu, dalam upaya menutup defisit pada tahun 2010, pembiayaan anggaran direalisasikan sebesar Rp90,5 triliun. Sumber utama pembiayaan berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp86,6 triliun, terutama berasal dari SBN. Sementara itu, pembiayaan non utang sebesar Rp8,9 triliun terutama berasal dari dana rekening pemerintah.

Jika dibandingkan dengan target pembiayaan pada APBN-P tahun 2010 sebesar Rp133,7 triliun, realisasi pembiayaan anggaran tahun 2010 lebih rendah. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp29,5 triliun, realisasi tahun 2010 juga lebih rendah. Hal ini terutama berkaitan dengan adanya pengurangan target penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), pengurangan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL), lebih rendahnya penarikan pinjaman proyek, serta lebih rendahnya pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebagai dampak dari apresiasi kurs rupiah. Perkembangan defisit dan pembiayaan dalam periode 2005-2011 dapat dilihat dalam **Grafik IV.20** berikut:

Grafik IV.20
Perkembangan Pembiayaan APBN Tahun 2005-2011

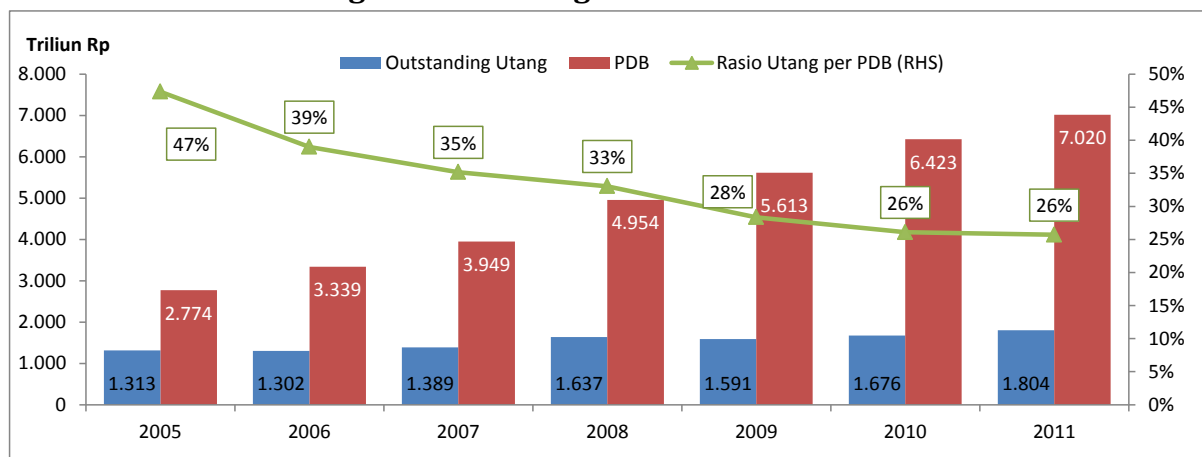


Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2011, pemerintah kembali melakukan ekspansi fiskal dan merencanakan tingkat defisit sebesar 1,8 persen PDB pada APBN. Namun, di sisi pembiayaan tahun 2011 juga dilakukan peningkatan dana investasi pemerintah, penyertaan modal negara, dana bergulir pengadaan tanah untuk jalan tol (BPJT), dana pengembangan pendidikan nasional, serta pinjaman kepada PT PLN (Persero) dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan. Untuk menutup rencana defisit pada tahun 2011 tersebut, pemerintah mengambil kebijakan pembiayaan antara lain: (i) berorientasi pada sumber pembiayaan yang berisiko rendah; (ii) memprioritaskan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri, terutama berasal dari penerbitan Surat

Berharga Negara (SBN), dengan tujuan untuk mengembangkan pasar keuangan dalam negeri serta mengurangi risiko nilai tukar mata uang rupiah dan pembalikan modal asing secara cepat (*reversal*); (iii) mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga terjadi penurunan rasio utang terhadap PDB secara berkelanjutan (lihat **Grafik IV.21**)

Grafik IV.21
Perkembangan Posisi Utang Pemerintah Tahun 2005-2011



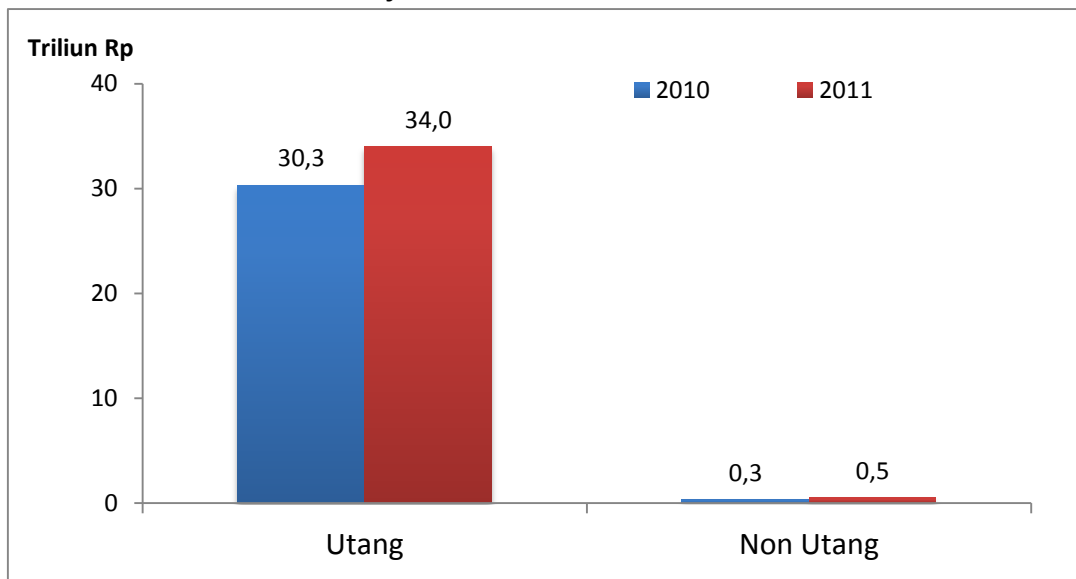
Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam APBN 2011, pembiayaan ditargetkan mencapai Rp124,7 triliun, terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp126,0 triliun dan pembiayaan non-utang sebesar negatif Rp1,4 triliun. Sampai dengan triwulan I 2011, realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp34,5 triliun, atau 27,7 persen dari rencananya dalam APBN 2011. Realisasi tersebut terutama didominasi oleh realisasi pembiayaan utang yang mencapai sebesar Rp34,0 triliun yang diperoleh melalui penerbitan SBN neto sebesar Rp38,8 triliun yang berasal dari penerbitan SBN domestik. Penerbitan SBN dalam negeri pada periode ini meningkat dari tahun sebelumnya. Dalam periode waktu yang sama, realisasi pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif Rp4,9 triliun, yang terdiri dari penarikan pinjaman luar negeri bruto sebesar Rp2,7 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar negatif Rp7,6 triliun. Sedangkan pinjaman luar negeri bruto berasal dari penarikan pinjaman proyek sebesar Rp1,8 triliun dan penarikan pinjaman program sebesar Rp0,9 triliun. Adapun realisasi pembiayaan non-utang sampai dengan triwulan I 2011 mencapai Rp0,5 triliun, berasal dari hasil privatisasi sebesar Rp0,4 triliun yang bersumber dari *right-issue* dan divestasi beberapa BUMN, serta hasil pengelolaan aset sebesar Rp0,1 triliun. Berdasarkan realisasi Triwulan I 2011, diperkirakan realisasi

pembiayaan anggaran dimungkinkan lebih tinggi dari target APBN 2011 untuk menyesuaikan dengan perubahan defisit anggaran tahun 2011.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2010, realisasi pembiayaan sampai dengan triwulan I 2011 sedikit mengalami peningkatan. Perbandingan realisasi pembiayaan triwulan I tahun 2010 dan 2011 dapat dilihat dalam **Grafik IV.22** berikut.

Grafik IV.22
Realisasi Pembiayaan Triwulan I Tahun 2010 dan 2011



Sumber: Kementerian Keuangan

B. ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2012

Proyeksi perekonomian nasional pada tahun 2012 akan sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global. Indikator perekonomian Indonesia dalam tahun 2012 diperkirakan sebagai berikut: (i) pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat mencapai 6,5 - 6,9 persen; (ii) tingkat inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang cukup moderat sebesar 3,5 - 5,5 persen; (iii) tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan berada pada kisaran 5,5 - 7,5 persen; (iv) nilai tukar rupiah cukup stabil pada Rp9.000-Rp9.300 per dolar AS; (v) harga minyak dunia diperkirakan stabil pada US\$75 - US\$95/barel; serta (vi) lifting minyak mentah Indonesia tetap pada 0,950 - 0,970 juta barel per hari. Rincian asumsi ekonomi makro tahun 2012 sebagai dasar penyusunan pagu indikatif dapat dilihat pada **Tabel IV.2**.

Tabel IV.2
Asumsi Ekonomi Makro 2010-2012

INDIKATOR EKONOMI	2010	APBN 2011	2012
1 Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,1	6,4	6,5 - 6,9
2 Inflasi (%)	6,96	5,3	3,5 - 5,5
3 Nilai Tukar (Rp/US\$)	9.087	9.250	9.000 - 9.300
4 Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	6,6*	6,5*	5,5 - 7,5
5 Harga Minyak ICP (US\$/barel)	79,4	80	75 - 95
6 Lifting Minyak (juta barel/hari)	0,954	0,970	0,950 - 0,970

*) APBN 2010 dan 2011 masih menggunakan Suku bunga SBI 3 Bulan

Sumber: Kementerian Keuangan

C. ARAH KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2012

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2012 yaitu “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”, maka sasaran yang hendak dicapai adalah mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Makna dari tema tersebut adalah di satu sisi pemerintah bertekad untuk senantiasa menjaga momentum pertumbuhan agar terus diupayakan pada level yang cukup tinggi sesuai dengan kapasitas perekonomian, namun di sisi lain pencapaian pertumbuhan yang tinggi tersebut diharapkan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diharapkan akan mendorong berkurangnya kesenjangan ekonomi sehingga pada akhirnya dapat memberi kontribusi positif bagi pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi, upaya yang dilakukan antara lain: (i) mendorong terwujudnya pertumbuhan di daerah melalui pengembangan koridor ekonomi; (ii) membangun infrastruktur yang mendukung terwujudnya keterhubungan wilayah (*Globally Connected and Domestically Integrated*); dan (iii) mendorong percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Sedangkan upaya untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, pemerintah akan memperluas partisipasi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk melibatkan unsur swasta dan mendorong pelaksanaan program perlindungan sosial yang berpihak kepada masyarakat lemah dan tertinggal.

Untuk mendukung sasaran pembangunan tahun 2012, target utama yang hendak dicapai di bidang ekonomi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan tingkat pengangguran, serta pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan tersebut akan tercermin dengan semakin menurunnya pengangguran, semakin tingginya pendapatan masyarakat, dan semakin rendahnya tingkat kemiskinan serta pada akhirnya diikuti dengan semakin meningkatnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan tersebut perlu ditempuh langkah-langkah strategis yang dijabarkan kedalam Strategi Empat Jalur yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (*pro-growth*), memperluas kesempatan kerja (*pro-job*), menanggulangi kemiskinan (*pro-poor*), merespon dan memitigasi perubahan iklim (*pro-environment*). Selanjutnya, strategi empat jalur tersebut dijabarkan ke dalam inisiatif-inisiatif baru sebagai pengungkit percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun inisiatif-inisiatif baru tersebut, antara lain: (i) *masterplan* percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI); (ii) percepatan pembangunan Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur; (iii) mendorong pelaksanaan program klaster empat; dan (iv) mendorong peningkatan kesempatan kerja.

Untuk mencapai sasaran pembangunan dalam tahun 2012, peran kebijakan fiskal sangat strategis dalam menjaga momentum pertumbuhan dan mempertahankan kesinambungan fiskal. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan fiskal diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara, meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara, serta mengoptimalkan pengelolaan pembiayaan secara hati-hati (*prudent*) dan meningkatkan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif.

Penetapan pagu tahun 2012 didasarkan pada besaran pendapatan negara yang diupayakan secara optimal dari sisi penerimaan perpajakan dan PNBPN. Optimalisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2012 difokuskan pada kegiatan ekstensifikasi perpajakan. Sedangkan upaya optimalisasi PNBPN dilakukan melalui peningkatan produksi sumber daya alam dan peningkatan kinerja BUMN serta perbaikan kualitas pelayanan publik.

Alokasi belanja negara pada tahun 2012 diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Untuk mendukung pencapaian tersebut, maka sasaran defisit anggaran tahun 2012 akan diupayakan lebih rendah dari defisit anggaran tahun 2011, serta memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang berisiko rendah dengan tetap mempertahankan sasaran pengurangan rasio utang terhadap PDB secara bertahap.

1. Kebijakan Pendapatan Negara

Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi global dan nasional diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2011. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh relatif stabilnya fundamental makro nasional dan juga ditopang dengan pertumbuhan ekonomi global. Berdasarkan kondisi perekonomian nasional tersebut, pendapatan negara dan hibah diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai sekitar 15 persen dari PDB. Sumber utama pendapatan negara dan hibah tersebut diharapkan berasal dari penerimaan dalam negeri, khususnya penerimaan perpajakan.

Sebagai kontributor utama penerimaan dalam negeri, penerimaan perpajakan diupayakan meningkat dengan didukung langkah-langkah sebagai berikut: (i) perbaikan pelayanan dan penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela; (ii) perbaikan kebijakan perpajakan untuk mendukung optimalisasi pendapatan negara dan mendukung kegiatan ekonomi, termasuk dengan pemberian insentif fiskal; (iii) pembenahan internal aparatur dan sistem perpajakan; (iv) penegakan hukum (*law enforcement*) kepada wajib pajak yang tidak patuh; dan (v) mensinergikan unsur pemerintah dalam penggalan potensi perpajakan dengan memberikan dukungan data/informasi kepada Kementerian Keuangan.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan juga dilakukan melalui upaya perluasan *tax base* dengan penambahan jumlah wajib pajak yang didukung langkah kebijakan berupa pemberian NPWP secara jabatan. Langkah kebijakan tersebut diharapkan akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah wajib pajak masing-masing KPP terutama orang pribadi. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pemanfaatan teknologi (*re-engineering*) dalam menangani wajib pajak dan mengadakan program peningkatan kualitas aparatur pajak.

Sementara itu, dalam upaya mengurangi kasus perpajakan, pemerintah akan mengefektifkan kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat. Pembinaan aktif ini difokuskan kepada wajib pajak orang pribadi dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta pemahaman hak dan kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di bidang kepabeanan dan cukai, secara umum kebijakan yang dilakukan pada tahun 2012 adalah merupakan kelanjutan dari kebijakan tahun sebelumnya, antara lain: (i) peningkatan akurasi penelitian nilai pabean dan klasifikasi; (ii) peningkatan efektivitas pemeriksaan fisik barang; (iii) optimalisasi kolektibilitas piutang kepabeanan dan cukai; (iv) perubahan kebijakan bea keluar, terutama berkaitan dengan tarif dan jenis barang kena bea keluar; (v) optimalisasi fungsi unit pengawasan melalui patroli darat dan laut; dan (vi) meningkatkan pengawasan di daerah perbatasan terutama jalur rawan penyelundupan.

Khusus di bidang cukai, kebijakan pada tahun 2012 tetap diarahkan pada konsistensi dengan *Road Map* Cukai Hasil Tembakau. Selain itu, optimalisasi penerimaan cukai juga dilakukan diantaranya dengan: (i) peningkatan tarif cukai hasil tembakau; (ii) ekstensifikasi barang kena cukai; (iii) pemanfaatan teknologi informasi di bidang pengawasan dan pelayanan cukai; dan (iv) intensitas kegiatan pemantauan kepatuhan pengusaha.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepabeanan, beberapa program yang diambil pemerintah diantaranya dengan: (i) melanjutkan reformasi birokrasi melalui pembentukan KPPBC Madya; (ii) pengembangan otomatisasi pelayanan di bidang Kepabeanan dan Cukai; (iii) konsistensi pelayanan kepabeanan 24 jam sehari 7 hari seminggu di beberapa pelabuhan; (iv) implementasi Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT), untuk mengurangi penumpukan barang di pelabuhan; (v) penyempurnaan implementasi *Indonesia National Single Windows* (INSW).

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan pengawasan di bidang kepabeanan. Beberapa langkah yang diambil pemerintah di sektor pengawasan kepabeanan diantaranya dengan (i) penataan hubungan kerja antar unit pengawasan; (ii) pola *profiling* secara sistematis dalam rangka *risk management*; (iii) pendeteksian dini atas

pelanggaran; (iv) penentuan kewenangan penindakan dan penyidikan; (v) penanganan perkara dari instansi lain; (vi) pemanfaatan sarana operasi; (vii) pembakuan dokumentasi dan pelaporan; (viii) otomatis proses pengawasan secara vertikal dan horizontal; (ix) penyempurnaan program analisis audit; dan (x) implementasi bisnis proses audit (tatalaksana dan program audit).

Tantangan di bidang kepabeanan yang masih harus dihadapi pada tahun 2012 antara lain: (i) konsekuensi dari komitmen kerjasama perdagangan internasional melalui skema *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA), *European Free Trade Association* (EFTA)/*Comprehensive EFTA-Indonesia Trade Agreement* (CEITA)(Asean, China, Korea); (ii) kebijakan tarif umum bea masuk *Most Favourable Nation* (MFN) yang cenderung menurunkan tarif efektif rata-rata bea masuk; (iii) pemberian fasilitas pembebasan dan keringanan bea masuk; (iv) kebijakan nontarif yang berorientasi pada pengendalian barang impor dan penggunaan produksi dalam negeri; (v) implementasi *Free Trade Zone* (FTZ) di kawasan Bangka, Belitung, dan Karimun (BBK) dan kawasan ekonomi khusus (KEK); (vi) menjalankan kebijakan bea keluar sebagai instrumen kebijakan untuk pengendalian harga dalam negeri untuk komoditi tertentu (terutama CPO dan turunannya) dan melindungi industri hilir; dan (vii) luasnya wilayah pabean Indonesia, yang secara geografis menimbulkan kerawanan terhadap pelayanan pabean. Sementara itu, optimalisasi penerimaan cukai menghadapi tantangan, antara lain: (i) rencana pemberlakuan peraturan pemerintah pengendalian tembakau; (ii) ratifikasi *Framework Convention On Tobacco Control* (FCTC); (iii) rencana pemberlakuan pajak rokok daerah; (iv) Perda larangan merokok di tempat umum; dan (v) kampanye anti rokok.

Sementara itu, dalam rangka mendorong iklim investasi dan perdagangan, pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan pemberian insentif perpajakan bagi industri di dalam negeri, antara lain: (i) pemberian fasilitas PPh Badan untuk perusahaan masuk bursa sebesar 5 persen dari tarif normal; (ii) fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu; (iii) fasilitas PPN untuk barang-barang strategis; dan (iv) pemberian pajak ditanggung pemerintah (DTP) dalam bentuk subsidi pajak di bidang investasi dan kegiatan usaha.

Sedangkan insentif di bidang kepabeanan akan diberikan dalam bentuk: (i) harmonisasi tarif bea masuk; (ii) pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) dan kawasan berikat (KB); (iii) insentif bea masuk untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal; (iv) insentif bea masuk ditanggung pemerintah untuk industri sektor-sektor tertentu; dan (v) fasilitas keringanan bea masuk.

Dalam jangka pendek pemberian insentif perpajakan menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan perpajakan. Hal ini karena pemberian insentif tersebut di satu sisi akan berdampak pada *potential loss* terhadap penerimaan perpajakan. Namun dalam jangka menengah, kebijakan pemberian insentif perpajakan akan memberikan dampak positif terhadap terwujudnya kegiatan investasi di bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu, mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan volume produksi, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas. Oleh karena itu pemerintah akan tetap berkomitmen untuk memberikan insentif tanpa mengganggu upaya peningkatan penerimaan perpajakan.

Selain penerimaan perpajakan, sumber pendapatan negara yang lain adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam tahun 2012, pemerintah masih akan menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan PNBP sebagai sumber penerimaan negara. Dari sisi penerimaan SDA migas, pemerintah masih akan menghadapi tantangan dalam meningkatkan *lifting* minyak mentah yang disebabkan oleh penurunan produksi alamiah, fasilitas produksi yang kurang mendukung, serta kendala pemberian izin lokasi dan pembebasan lahan. Di bidang SDA nonmigas, tantangan yang dihadapi adalah pencapaian produksi komoditas mineral dan batubara, kehutanan, serta optimalisasi penerimaan dari hasil perikanan. Di sisi penarikan dividen BUMN, sangat ditentukan oleh langkah peningkatan dan penyehatan kinerja BUMN. Untuk meningkatkan PNBP lainnya perlu dilakukan perbaikan pelayanan dan administrasi PNBP K/L, serta mengkaji ulang jenis dan tarif PNBP K/L yang saat ini berlaku.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang mungkin dihadapi, PNBP dalam tahun 2012 diperkirakan akan mengalami peningkatan dengan didukung upaya optimalisasi penerimaan dari beberapa sumber penerimaan. Dari penerimaan SDA

migas, optimalisasi akan dilaksanakan melalui: (i) pencapaian target *lifting* migas pada lapangan *existing* dan pengembangan lapangan baru, serta percepatan produksi sumur temuan eksplorasi; (ii) efisiensi *cost recovery* dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku; dan (iii) melakukan secara intensif penagihan penjualan hasil migas bagian pemerintah. Untuk SDA nonmigas, pemerintah akan mengupayakan peningkatan produksi mineral dan batubara, serta pengawasannya dengan mengintensifkan penerapan harga acuan batubara sebagai patokan harga jual hasil komoditas tambang.

Sementara itu, penerimaan dari bagian pemerintah atas laba BUMN dalam tahun 2012 akan dipengaruhi oleh dinamika sektoral yang lebih kompleks dengan siklus bisnis yang lebih beragam. Menimbang arti penting pengembangan BUMN, khususnya sektor perbankan dan keuangan, dalam tahun 2012 kebijakan penerimaan dari laba BUMN akan mengutamakan strategi optimalisasi dana terbaik secara moderat antara penarikan dividen untuk APBN dengan laba ditahan untuk investasi perseroan. Selain itu juga akan disiapkan opsi penetapan mata uang laporan keuangan sesuai denominasi yang digunakan dalam transaksi masing-masing BUMN. Strategi tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan: (i) menjaga tingkat dividen berkisar antara 20-55 persen, kecuali perseroan dengan akumulasi rugi dan/atau perseroan jasa asuransi; (ii) penyehatan BUMN melalui penyertaan modal negara (PMN) atau restrukturisasi neraca; (iii) penetapan *margin* atas BUMN yang melakukan *public service obligation* (PSO) dan/atau *domestic market obligation*; (iv) konsolidasi dan ekspansi BUMN dengan prospek pertumbuhan; (v) peningkatan pengendalian internal dan mutu penyajian laporan keuangan melalui adaptasi IFRS di tahun 2012; dan (vi) menyesuaikan penarikan dividen interim untuk memberikan ruang akselerasi pengembangan BUMN.

Sedangkan untuk optimalisasi PNBP lainnya, pemerintah akan melakukan optimalisasi penerimaan melalui: (i) peningkatan pelayanan dan perbaikan administrasi PNBP Kementerian/Lembaga; (ii) melakukan penyempurnaan beberapa peraturan terkait dengan jenis dan tarif PNBP Kementerian/Lembaga; dan (iii) melakukan monitoring, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan PNBP Kementerian/Lembaga.

2. Kebijakan Belanja Negara

Dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan tahun 2012, sasaran utama pembangunan yang hendak dicapai adalah tingkat pertumbuhan ekonomi berkisar 6,5 –

6,9 persen, diikuti dengan pengurangan tingkat pengangguran menjadi berkisar 6,4 – 6,7 persen, serta pengurangan kemiskinan menjadi berkisar 10,5 – 11,5 persen. Untuk mencapai sasaran pembangunan dalam tahun 2012 tersebut dari sisi fiskal direncanakan akan didukung dengan alokasi anggaran belanja negara sekitar 16 persen dari PDB, yang akan dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.

Belanja pemerintah pusat dalam tahun 2012 diharapkan mampu mendukung rencana aksi yang meliputi tiga bagian yaitu: (i) prioritas nasional; (ii) bidang- bidang pembangunan; dan (iii) pembangunan kewilayahan. Prioritas nasional terdiri dari 11 prioritas pembangunan, yaitu: (i) reformasi birokrasi dan tata kelola; (ii) pendidikan; (iii) kesehatan; (iv) penanggulangan kemiskinan; (v) ketahanan pangan; (vi) infrastuktur; (vii) iklim investasi dan iklim usaha; (viii) energi; (ix) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (x) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; (xi) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi; dan tiga prioritas nasional lainnya, yaitu: (i) bidang politik, hukum dan keamanan; (ii) bidang perekonomian; serta (iii) bidang kesejahteraan rakyat.

Rencana aksi bidang-bidang pembangunan antara lain mencakup bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang sarana dan prasarana, bidang politik, bidang pertahanan dan keamanan, bidang hukum dan aparatur negara, bidang wilayah dan tata ruang, serta bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sementara itu rencana aksi pembangunan kewilayahan diarahkan untuk mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan yang tercermin dengan peningkatan kualitas hidup yang kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut kebijakan kewilayahan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial, meningkatkan keterkaitan antar wilayah, meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan pada setiap wilayah, mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar dan kawasan rawan bencana.

Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan tahun 2012, kebijakan belanja untuk mendukung percepatan pembangunan diantaranya sebagai berikut:

Pertama, peningkatan belanja infrastruktur untuk mencapai sasaran: (i) mendukung upaya *debottlenecking*; (ii) penyediaan dan peningkatan *domestic connectivity*; (iii) mendukung pengembangan koridor ekonomi; (iv) terciptanya ketahanan pangan; (v) terciptanya ketahanan energi; (vi) perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan); dan (vii) meningkatkan kemampuan anggaran melalui keterlibatan BUMN dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. **Kedua**, mendukung pelaksanaan klaster 4 yang terdiri dari 6 program utama dan 3 prioritas utama. Program utama mencakup: (i) program rumah sangat murah dan murah; (ii) program kendaraan angkutan umum murah, terutama untuk angkutan umum pedesaan serta penumpang dan barang pertanian; (iii) program air bersih untuk rakyat; (iv) program listrik murah dan hemat; (v) program peningkatan kehidupan nelayan, melalui pemberian skema usaha mikro dan kecil (UMK) dan kredit usaha rakyat (KUR), pembangunan SPBU solar, dan fasilitas bank rakyat; dan (vi) program peningkatan masyarakat pinggir (terpinggirkan) perkotaan. Sedangkan 3 prioritas utama meliputi: (i) surplus beras 10 juta ton dalam waktu 5-10 tahun; (ii) penciptaan lapangan kerja guna mengurangi pengangguran 1 juta per tahun; dan (iii) pembangunan sistem dan jaringan transportasi Jakarta untuk mengurangi kemacetan ibukota negara.

Ketiga, melanjutkan program perlindungan sosial, diantaranya dalam bentuk: (i) program Jamkesmas; (ii) program keluarga harapan (PKH); (iii) program PNPM pedesaan, perkotaan, infrastruktur pedesaan, daerah tertinggal dan khusus, serta infrastruktur sosial ekonomi wilayah; (iv) program BOS; dan (v) program Raskin; (vi) pembatasan penggunaan mekanisme bansos oleh K/L. **Keempat**, mengupayakan peningkatan belanja untuk bidang perekonomian yang ditujukan untuk perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas. **Kelima**, implementasi anggaran berbasis kinerja oleh K/L dengan pendekatan pencapaian *output* dan *outcome*. **Keenam**, peningkatan kemampuan pertahanan menuju *minimum essential force*. **Ketujuh**, memperbaiki kesejahteraan aparatur negara dan memperluas kebijakan reformasi birokrasi. **Kedelapan**, pengendalian pengangkatan PNS pusat dan daerah dengan mengarahkan kepada kebijakan *zero growth*. **Kesembilan**, mengarahkan agar subsidi lebih tepat sasaran, antara lain: (i) melaksanakan distribusi BBM bersubsidi secara tertutup; (ii) penurunan subsidi listrik melalui kebijakan dari sisi *demand* dan

supply; dan (iii) melanjutkan subsidi pertanian untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

Kesepuluh, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara antara lain melalui: (i) optimalisasi penyerapan anggaran belanja K/L dengan diikuti upaya (a) perbaikan penyusunan perencanaan anggaran dan percepatan pelaksanaan anggaran K/L, (b) penyelesaian proses penyusunan anggaran tepat waktu dan disiplin, baik dalam pembahasan intern pemerintah maupun dengan DPR, (c) percepatan dan penyederhanaan proses pelaksanaan administrasi anggaran, (d) memanfaatkan mekanisme *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa, dan (e) perbaikan pola penyerapan anggaran yang lebih proporsional, serta (ii) melakukan pembatasan kegiatan, terutama pembangunan gedung, yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi K/L dan bersifat tidak mendesak. **Kesebelas**, mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan mengarahkan pemanfaatannya untuk meningkatkan aksesibilitas serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Secara lebih terperinci, kebijakan belanja negara dapat dibedakan menjadi beberapa kebijakan khusus terkait dengan jenis alokasi anggaran. Kebijakan alokasi belanja pegawai dalam tahun 2012 diarahkan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan Polri, serta pensiunan antara lain melalui kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok serta uang makan PNS dan uang lauk pauk TNI/Polri. Sementara itu, kebijakan alokasi belanja barang diarahkan untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pemeliharaan aset dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas alokasi dan penggunaan alokasi anggarannya.

Sejalan dengan itu, kebijakan alokasi belanja modal untuk tahun 2012 diupayakan untuk memperbaiki dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur dalam rangka mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (*growth with equity*). Untuk bantuan sosial, kebijakan alokasi anggaran dalam tahun 2012 tetap diarahkan untuk kesinambungan program/kegiatan prioritas kesejahteraan rakyat antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), bantuan langsung ke masyarakat lainnya, serta cadangan dana penanggulangan bencana alam.

Kebijakan subsidi pada tahun 2012 lebih diarahkan pada upaya menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapat rendah, meningkatkan produksi pertanian, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah senantiasa berusaha agar subsidi yang dialokasikan dapat disalurkan sesuai dengan tujuan dan target sasaran.

Secara umum, pokok-pokok kebijakan subsidi pada tahun 2012 adalah: (i) menata ulang kebijakan dan sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel dan tepat sasaran; (ii) menyusun sistem seleksi yang ketat untuk menentukan sasaran penerima subsidi dengan menggunakan basis data yang valid; (iii) pengendalian konsumsi BBM melalui penyaluran konsumsi BBM secara tertutup dengan cara bertahap sesuai target sasaran; (iv) melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG, serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan; (v) penetapan tarif PBBKB untuk BBM bersubsidi sebesar 5 (lima) persen sampai dengan tanggal 15 September 2011; (vi) pengendalian subsidi listrik melalui pemberian subsidi kepada konsumen yang lebih tepat sasaran, optimalisasi penggunaan sumber energi input pembangkit listrik non BBM, serta percepatan pembangunan proyek pembangkit listrik 10.000 MW tahap I dan II; dan (vii) mengarahkan subsidi pertanian lebih tepat sasaran dan mendukung peningkatan produktifitas pertanian.

Di tahun 2012, akan terus dilakukan upaya-upaya penurunan BPP Tenaga Listrik sebagaimana yang telah dilakukan di tahun 2011, yaitu melalui optimalisasi pembangkit tenaga listrik dan penurunan susut jaringan (*losses*) serta diversifikasi energi primer di pembangkit tenaga listrik dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas, batubara dan panas bumi. PT PLN (Persero) akan tetap diberikan margin usaha yang sejalan dengan upaya peningkatan kemampuan investasi dan efisiensi usaha serta pengembangan kegiatan usaha berdasarkan penugasan pemerintah terkait penyelenggaraan fungsi kemanfaatan umum.

Dalam rangka keberlanjutan program ketahanan pangan nasional, ketersediaan sarana produksi seperti benih, pupuk dan permodalan harus dapat dipenuhi dan dijangkau oleh para petani dan peternak. Oleh karena itu, kebijakan subsidi harga benih dan pupuk serta subsidi bunga kredit akan terus ditingkatkan. Kredit program tersebut

meliputi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) serta Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Adapun rencana penyaluran subsidi benih di tahun 2012 untuk benih padi, benih jagung dan benih kedelai. Pupuk bersubsidi yang akan disalurkan terdiri dari pupuk urea, pupuk SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik.

Alokasi subsidi di tahun 2012 diperkirakan masih akan menghadapi tantangan yang cukup berarti, seperti adanya kecenderungan harga minyak internasional yang sulit diprediksi akibat kondisi geopolitik dunia internasional yang tidak menentu. Selain itu, masih tingginya volume konsumsi BBM bersubsidi terkait implementasi pelaksanaan program pembatasan penggunaan BBM bersubsidi di tahun 2011 dan mendatang. Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi akan mempunyai dampak yang luas pada pembangunan nasional, diantaranya: (i) memenuhi rasa keadilan, karena subsidi hanya akan diterima oleh masyarakat yang berhak menerima subsidi; (ii) mengingatkan masyarakat untuk menghemat pemakaian energi yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable energy*); (iii) mendukung ketahanan energi nasional jangka panjang; (iv) mengurangi dampak perubahan iklim; (v) mengalihkan efisiensi anggaran ke belanja yang lebih produktif dan bermanfaat maksimal pada pembangunan dan masyarakat; (vi) mengurangi beban kemacetan lalu lintas yang berdampak pada peningkatan efisiensi ekonomi dan APBN.

Guna mencapai anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran di tahun 2012, maka subsidi listrik harus diturunkan dengan upaya penurunan konsumsi BBM oleh PT PLN dari total biaya bahan bakar. Oleh karena itu, subsidi listrik di tahun 2012 masih menghadapi tantangan berkaitan dengan ketidakpastian pasokan gas dan batubara serta fluktuasi harga komponen bahan bakar pembangkit. Tantangan lainnya adalah belum optimalnya pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap pertama dan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap kedua, sehingga penggunaan BBM masih tinggi.

Terkait dengan subsidi pangan dan pertanian, beberapa tantangan masih akan dihadapi di tahun 2012 antara lain adanya kondisi iklim yang sulit diprediksi sehingga mempengaruhi produktifitas sektor pertanian. Tantangan lain berkaitan dengan tingginya harga pangan internasional yang akan mempengaruhi harga komoditas pangan domestik. Selain itu, pembangunan yang berkembang pesat berdampak kepada

adanya peralihan fungsi lahan pertanian menjadi fungsi lainnya, seperti permukiman, industri, dan infrastruktur transportasi. Alih fungsi tersebut berakibat menurunnya produksi komoditi pertanian yang cukup signifikan. Guna mengurangi beban subsidi pertanian terutama pupuk di tahun 2012, pemerintah masih menghadapi kendala untuk menjamin harga dan pasokan gas dalam rangka memenuhi kebutuhan produsen pupuk.

Di sisi belanja transfer ke daerah, untuk mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan di tahun 2012, kebijakan transfer ke daerah disusun dengan prinsip dasar optimalisasi sumber-sumber penerimaan negara dan daerah serta pelaksanaan efisiensi dan efektivitas pengalokasian transfer ke daerah yang lebih proporsional, adil, dan akuntabel. Kebijakan transfer ke daerah pada tahun 2012 tetap diarahkan untuk mendukung program yang menjadi prioritas nasional.

Dengan mengacu pada perundang-undangan dan hasil evaluasi terhadap implementasi sampai dengan tahun 2011, tujuan kebijakan transfer ke daerah pada tahun 2012 akan dipertajam untuk: (i) mengurangi kesenjangan fiskal, baik vertikal maupun horizontal; (ii) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; (iii) mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam rangka kebijakan ekonomi makro; (iv) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerahnya; (v) meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya nasional; (vi) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah; serta (vii) mendukung pencapaian program *Pro Job, Pro Growth, Pro Poor*, dan *Pro Environment*.

Pencapaian tujuan kebijakan transfer ke daerah masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Untuk DBH, tantangan penting adalah: (i) upaya proses konsolidasi yang optimal untuk mempercepat proses pembayaran transfer DBH migas; (ii) penyamaan persepsi pihak-pihak terkait terhadap penentuan proporsi untuk alokasi DBH bagi daerah pengolah migas; dan (iii) pemanfaatan DBH-Cukai Hasil Tembakau yang di- *earmark*. Sementara itu, beberapa tantangan dalam alokasi DAK adalah: (i) meminimalkan disparitas antara program prioritas nasional dengan prioritas daerah; (ii) pemilahan program-program DAK berdasarkan pertimbangan sektoral dan kewilayahan; (iii) keterbatasan sebagian daerah untuk mengalokasikan dana pendamping; dan (iv) keterlambatan penerbitan serta kurang fleksibelnya petunjuk

teknis dari K/L. Terkait dengan DAU, tantangan yang dihadapi adalah menyempurnakan formula perhitungan alokasi dan penentuan proporsi alokasi dasar yang tepat untuk meningkatkan efektivitas DAU sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan fiskal di daerah. Selain itu adanya tuntutan pemekaran wilayah masih merupakan tantangan yang cukup signifikan dalam menentukan kebijakan alokasi DAU, meskipun saat ini pemerintah masih memberlakukan kebijakan moratorium terhadap pemekaran wilayah.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan terkait dengan transfer ke daerah, antara lain: (i) menyempurnakan proses perhitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel; (ii) menyempurnakan sistem penyaluran DBH lebih tepat waktu dan tepat jumlah; (iii) mengalokasikan DAU sebesar 26 persen dari PDN neto dengan tetap memperhitungkan faktor pengurang; (iv) meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yang bersumber dari lembaga/instansi yang berwenang; (v) mengalokasikan DAK untuk membantu daerah-daerah yang kemampuan keuangan daerahnya relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) melalui penyediaan sarana dan prasarana; (vi) membiayai bidang-bidang DAK yang menjadi prioritas nasional terkait dengan bidang reformasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, serta daerah tertinggal, terluar, dan pasca konflik; (vii) mengalokasikan dana otsus masing-masing 2 persen setara DAU nasional untuk Provinsi Papua dan Papua Barat serta Nangroe Aceh Darussalam; (viii) meneruskan alokasi dana penyesuaian untuk tunjangan profesi guru, BOS, dana tambahan penghasilan guru PNSD serta dana insentif daerah.

Langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan tersebut adalah: *Pertama*, membatasi bidang dan daerah yang mendapatkan alokasi DAK dan diprioritaskan untuk bidang-bidang pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. *Kedua*, mengalihkan kegiatan dan pendanaan dari K/L untuk urusan yang sudah menjadi kewenangan daerah. K/L diarahkan untuk mencermati program-program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk dialihkan ke bidang-bidang DAK yang sesuai dengan kewenangan daerah. *Ketiga*, menyelesaikan proses pengalihan BPHTB ke Daerah bagi daerah-daerah yang sedang dan belum menyiapkan perda

termasuk juga bimbingan teknis bagi SDM daerah. *Keempat*, meningkatkan kualitas pengelolaan APBD, melalui: (a) rasionalisasi jumlah dan belanja gaji PNS daerah; (b) penurunan porsi belanja gaji PNSD terhadap belanja APBD; (c) peningkatan persentase belanja modal dan penurunan persentase belanja barang; (d) pengalokasian arah belanja APBD untuk kegiatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, pengurangan pengangguran, dan pengentasan kemiskinan; (e) percepatan penetapan APBD, penyelesaian dokumen anggaran, proses pengadaan, dan proses pencairan anggaran;

(f) percepatan penyaluran dana BOS; (g) pembatasan penumpukan dana surplus kas (SiLPA) daerah; (h) peningkatan jumlah daerah yang mendapatkan opini WDP/ WTP pada laporan keuangannya, minimal 75 persen dari jumlah daerah.

3. Kebijakan Pembiayaan Anggaran

Arah kebijakan defisit anggaran pada tahun 2012 direncanakan dapat menurun dari tingkat defisit APBN 2011 menjadi berkisar antara 1,4 persen terhadap PDB dan 1,6 persen terhadap PDB. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengendalikan defisit guna menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah dalam kerangka fiskal periode 2010-2014. Dalam rangka menutup defisit tersebut, Pemerintah perlu menetapkan strategi pembiayaan yang tepat, serta merumuskan suatu kebijakan pembiayaan yang mempunyai komposisi seimbang antara pembiayaan yang bersumber dari non utang maupun utang.

Secara umum strategi pembiayaan pada tahun 2012 adalah: (i) pembiayaan utang dari penerbitan SBN dan penarikan pinjaman luar negeri harus mempertimbangkan biaya yang rendah dan risiko yang minimal; (ii) pinjaman luar negeri harus diutamakan untuk membiayai kegiatan produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat; (iii) pemanfaatan dana SAL ditujukan utamanya untuk mengurangi tambahan utang serta menjaga stabilitas perekonomian; (iv) meningkatkan Investasi pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur; serta (v) pengembangan dana bergulir untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dan Kredit Usaha Rakyat.

Terkait dengan pembiayaan yang bersumber dari non utang, kebijakan yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2012 antara lain: (i) penggunaan sebagian dana SAL sebagai

salah satu sumber pembiayaan non-utang; (ii) penyertaan modal negara (PMN) untuk meningkatkan penjaminan infrastruktur, dan penjaminan program Kredit Usaha Rakyat (KUR); (iii) investasi pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur; (iv) dana bergulir untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), pembangkit listrik tenaga geotermal, dan lembaga pengelola dana bergulir koperasi, usaha kecil dan menengah (LPDB KUKM); (v) pengembangan pendidikan nasional untuk pembentukan *endowment fund* dan dana cadangan pendidikan; dan (vi) penjaminan terhadap kredit PT PLN dan PDAM.

Dari sisi administrasi keuangan, pemerintah melanjutkan reklasifikasi cicilan pengembalian penerusan pinjaman. Hal ini dimaksudkan untuk perbaikan sistem dan penertiban rekening yang dikelola oleh pemerintah, khususnya yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Pada tahun-tahun sebelumnya cicilan penerusan pinjaman diklasifikasikan ke dalam penerimaan pembiayaan dari RDI, dan mulai tahun 2011 cicilan tersebut tidak lagi melalui rekening dana investasi (RDI), akan tetapi disetorkan kepada rekening kas umum negara (RKUN).

Terkait dengan kebijakan pengalokasian dana investasi pemerintah yang bertujuan untuk memperbesar peran pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur, kebijakan pada tahun 2012 diarahkan pada portofolio investasi langsung, *public private partnership*, pemberian pinjaman dan investasi dalam bentuk surat berharga. Sejalan dengan hal tersebut, alokasi dana penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN terutama ditujukan untuk meningkatkan penjaminan infrastruktur, meningkatkan kapasitas penjaminan terhadap program kredit usaha rakyat (KUR) dan mendukung penerbitan SBSN valas di pasar internasional.

Selanjutnya, terkait dengan alokasi dana bergulir yang bertujuan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat, pada tahun 2012 pemerintah merencanakan akan mengalokasikan dana antara lain untuk: (i) kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM); (ii) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan menengah bawah (MBM) termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan (iii) dana bergulir geotermal yang digunakan untuk membiayai kegiatan eksplorasi bagi pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Sementara itu, dana pengembangan pendidikan nasional adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan *endowment fund* dengan tujuan menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk tanggungjawab antargenerasi. Pengelolaan dana tersebut dilakukan melalui mekanisme dana bergulir. Selain itu, dana tersebut juga berfungsi sebagai dana cadangan pendidikan yang dipakai untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

Di sisi lain, pokok-pokok kebijakan pembiayaan utang pada tahun 2012 adalah: (i) memenuhi target penerbitan SBN dan penarikan pinjaman dengan memperhatikan biaya dan risiko utang paling optimal; (ii) menetapkan target penerbitan SBN sesuai dengan kapasitas daya serap pasar dan perkembangan kondisi pasar keuangan; (iii) meningkatkan proses bisnis pengadaan pinjaman melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri sesuai dengan aturan PP Nomor 10 tahun 2011; (iv) memanfaatkan pinjaman luar negeri yang diarahkan hanya untuk membiayai kegiatan prioritas; (v) menurunkan besaran realisasi pembiayaan utang tunai dalam hal perkiraan realisasi defisit lebih rendah dari target. Namun jika perkiraan realisasi lebih tinggi dari target, maka peningkatan target pembiayaan utang tunai harus mempertimbangkan kapasitas sumber utang dan kesinambungan fiskal serta utang dalam jangka menengah; serta (vi) menurunkan rasio utang terhadap PDB secara konsisten. Semakin baiknya pengelolaan utang pemerintah selama menjadi salah satu indikator penting penilaian lembaga *rating* yang terus memperbaiki peringkat *rating* utang pemerintah hingga awal tahun 2011 yang tinggal satu level menuju *investment grade*.

Dalam tahun 2012 pemerintah menetapkan target pembiayaan utang bersumber dari SBN, Pinjaman Luar Negeri, dan Pinjaman Dalam Negeri. Untuk SBN, beberapa aspek yang dipertimbangkan adalah: (i) target penerbitan SBN neto ditetapkan dengan mempertimbangkan daya serap pasar SBN domestik berdasarkan proyeksi pertumbuhan *investible asset* yang dikelola oleh beberapa investor institusi potensial dan perkiraan pertumbuhan kepemilikan dari berbagai tipe investor; (ii) besaran penerbitan SBN valas direncanakan dalam jumlah terbatas hanya sebagai pelengkap dengan memperhitungkan batasan risiko nilai tukar; serta (iii) besaran target penerbitan SBN neto perlu dipertimbangkan lagi jika terjadi *reversal*, karena

kepemilikan asing pada SBN domestik telah melebihi 30 persen. Pertimbangan tersebut diperlukan untuk mengakomodasi agar tambahan dana untuk *buyback* tidak dibiayai dari tambahan penerbitan SBN baru.

Untuk instrumen pinjaman luar negeri, aspek-aspek yang dipertimbangkan diantaranya: (i) target penarikan pinjaman proyek dihitung berdasarkan proyeksi *on going* dan rencana komitmen pinjaman; (ii) target penarikan pinjaman program dihitung berdasarkan potensi ketersediaan sumber pinjaman sebagaimana tertuang dalam *country strategy & program/country assistance strategy* dan kesiapan K/L dalam memenuhi *underlying* penarikan seperti *policy matrix* dan pelaksanaan kegiatan tertentu dalam hal *refinancing modality*; serta (iii) penarikan pinjaman proyek termasuk untuk penerusan pinjaman.

Untuk instrumen pinjaman dalam negeri, aspek-aspek yang dipertimbangkan diantaranya: (i) target penarikan per tahun mempertimbangkan kapasitas sumber dana dan perkiraan kemampuan penyerapan; serta (ii) target penarikan per tahun dapat melebihi Rp 1 triliun jika ada luncuran dan/atau prioritas kegiatan mendesak dan menjadi kebijakan nasional.

Dalam rangka pengelolaan utang, kebijakan yang diambil dalam tahun 2012 antara lain (i) mendukung upaya pengembangan pasar uang dan pasar modal domestik untuk memperkuat sistem keuangan; (ii) mengintensifkan pelaksanaan *buyback* dan *debt switch* untuk mengurangi tingginya utang jatuh tempo pada tahun 2012-2014; (iii) mendorong terciptanya *investment oriented society* melalui penerbitan SBN ritel dan pengembangan instrumen berupa *saving bonds*, serta melakukan sosialisasi/edukasi kepada masyarakat; (iv) memanfaatkan dana SAL dan sumber dana lainnya untuk mendukung *bond stabilization fund/crisis management protocol* jika terjadi *reversal* dana asing;

Sementara itu, terkait dengan penarikan pinjaman luar negeri, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri. Untuk lebih mengefektifkan penerbitan PP tersebut, pemerintah sedang mempersiapkan peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Keuangan

terkait penerusan pinjaman serta penetapan sumber pinjaman dan seleksi pemberi pinjaman.

Berdasarkan perkembangan realisasi pembiayaan dalam beberapa tahun terakhir, terlihat adanya aliran dana masuk (*capital inflow*) yang cukup besar. *Capital inflow* tersebut terutama mengalir ke *portfolio investment*, yang salah satunya dalam bentuk SBN. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepemilikan asing atas SBN rupiah hingga mencapai lebih dari 30 persen dari total SBN rupiah yang dapat diperdagangkan sepanjang tahun 2011. Peningkatan kepemilikan asing tersebut menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia, dan juga dapat meningkatkan likuiditas SBN itu sendiri. Namun di sisi lain, jika terjadi arus pembalikan (*reversal*) akibat aksi jual investor asing, diperlukan upaya mitigasi melalui kebijakan *bond stabilization fund* yang telah disiapkan pemerintah.

Saat ini, pemerintah sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk melaksanakan program *bond stabilization fund* yang dibagi menjadi program jangka pendek dan program jangka menengah. Program jangka pendek terdiri dari: (i) pembelian SBN oleh Dirjen Pengelolaan Utang (DJPU), Kementerian Keuangan, dari dana yang telah dianggarkan dalam APBN, yang merupakan strategi yang telah dilaksanakan selama ini; (ii) pembelian SBN oleh BUMN di pasar sekunder dalam masa pre-krisis atau krisis; (iii) berkoordinasi dengan unit internal di lingkungan Kementerian Keuangan untuk membeli SBN pada saat kondisi pasar SBN sedang *bearish*; dan (iv) pembelian SBN dengan menggunakan dana SAL. Terkait dengan program ini, telah ada Nota Kesepahaman antara Menteri Keuangan dengan Menteri Negara BUMN terkait pembelian SBN oleh BUMN. Selain itu saat ini juga sedang disusun SOP dan peraturan yang diperlukan guna mendukung program jangka pendek tersebut. Khusus untuk pembelian SBN dengan menggunakan dana SAL yang memerlukan persetujuan DPR, maka akan diusulkan mekanismenya dalam UU APBN.

Selanjutnya, program jangka menengah yang sedang disiapkan adalah melakukan pembelian SBN dengan menggunakan *Bond Stabilization Fund* (BSF) yang diharapkan dapat dibentuk dan dioperasionalkan paling lambat tahun 2012. Dengan adanya *bond stabilization fund* tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa: (i) peningkatan kepercayaan investor pada pasar SBN; (ii) perpanjangan horizon

investasi; (iii) peningkatan *credit rating*; (iv) peningkatan stabilitas pasar SBN dan pasar keuangan pada umumnya; dan (v) penurunan *cost of borrowing* pemerintah.

D. RISIKO FISKAL

Risiko fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan defisit APBN yang disebabkan oleh sesuatu di luar kendali pemerintah. Kesadaran akan adanya risiko fiskal yang dapat membebani APBN dan pencapaian tujuan kebijakan fiskal mendorong pemerintah untuk mengungkapkan risiko fiskal ke dalam Nota Keuangan yang diajukan bersamaan dengan pengajuan APBN ke DPR setiap tahun. Pengungkapan risiko fiskal sangat perlu untuk empat tujuan strategis, yaitu (i) peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan kebijakan fiskal, (ii) meningkatkan keterbukaan fiskal (*fiscal transparency*), (iii) meningkatkan tanggung jawab fiskal (*fiscal accountability*), serta (iv) menciptakan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).

Pengungkapan risiko fiskal dalam Nota Keuangan telah dimulai sejak Nota Keuangan dan APBN Tahun 2008 dan terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2012, risiko fiskal dikelompokkan dalam empat kategori utama yaitu (i) risiko yang berasal dari dinamika ekonomi makro, (ii) risiko utang pemerintah pusat, (iii) kewajiban kontinjensi pemerintah pusat, dan (iv) desentralisasi fiskal.

1. Risiko Ekonomi Makro

Dinamika ekonomi baik domestik maupun eksternal berdampak pada APBN melalui indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi utama di dalam penyusunan APBN. Dalam penyusunan APBN, indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Oil Price/ICP*), dan lifting minyak. Indikator-indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN. Apabila realisasi variabel-variabel tersebut berbeda dengan asumsinya, maka besaran-besaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBN juga akan berubah. Secara umum sumber risiko fiskal yang dihadapi oleh APBN 2012 terutama berasal dari dua risiko utama, yaitu:

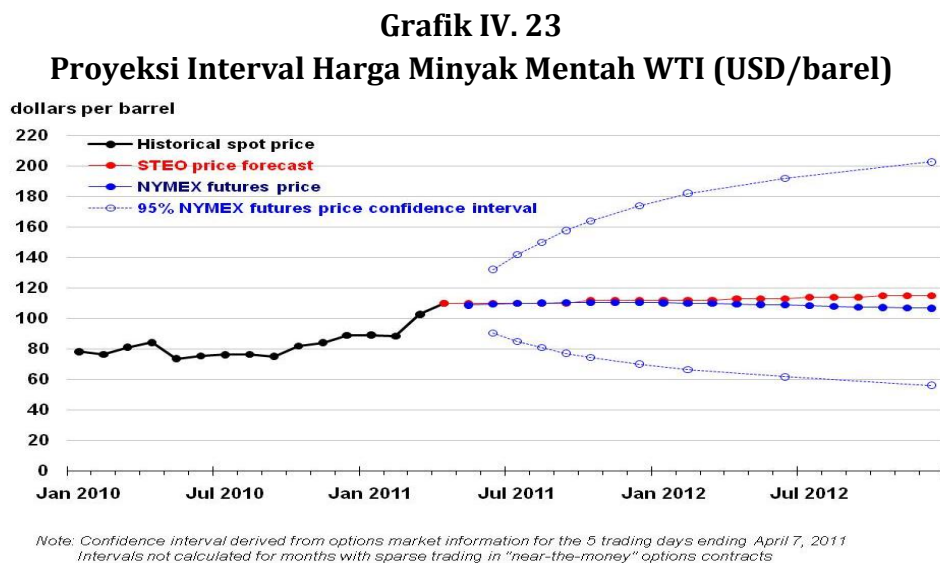
Inflasi. Pemerintah memproyeksikan angka inflasi 2012 berkisar antara 3,5 – 5,5 persen. Sementara itu IMF di dalam *World Economic Outlook* per April 2011, inflasi Indonesia diperkirakan sebesar 5,85 persen. Angka ini lebih tinggi daripada realisasi inflasi tahun 2010 dan lebih rendah dari proyeksi tahun 2011 masing-masing sebesar 5,13 persen dan sekitar 6 persen. Sementara itu, *market consensus* Bloomberg memperkirakan kisaran inflasi Indonesia pada tahun 2011 antara 6,3 – 7,3 persen sedangkan pada tahun 2012 berada pada kisaran 5,3 – 6,5 persen.

Dengan demikian angka proyeksi pemerintah masih sejalan dengan kecenderungan penurunan angka inflasi sebagaimana disebut di atas. Walaupun tekanan inflasi sudah menunjukkan kecenderungan menurun, namun risiko tekanan inflasi ke depan diperkirakan masih cukup tinggi. Dari sisi domestik, sumber inflasi diperkirakan antara lain berasal dari meningkatnya permintaan sejalan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dari sisi eksternal, tekanan inflasi terutama bersumber dari harga komoditas internasional yang masih cenderung meningkat. Kecenderungan meningkatnya permintaan dan harga pangan global serta gangguan faktor cuaca menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya menjaga kestabilan harga. Harga pangan dan harga energi yang cenderung naik menimbulkan peningkatan risiko inflasi mengingat harga pangan dan harga energi menyumbang bobot terbesar terhadap perhitungan inflasi. Namun demikian, masih terbukanya ruang penguatan nilai tukar rupiah lebih lanjut diperkirakan dapat meredam meningkatnya tekanan inflasi dari sisi eksternal.

Inflasi memberikan dampak tidak langsung terhadap APBN melalui melemahnya daya beli masyarakat yang pada akhirnya berdampak menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya tingkat suku bunga sebagai langkah mengatasi inflasi.

Harga Minyak. Pemerintah memperkirakan harga minyak berkisar antara US\$ 75 per barel sampai dengan US\$95 per barel. Angka tersebut sejalan dengan trend penurunan harga minyak di pasaran dunia. Harga minyak mentah WTI turun tajam pada semester kedua 2008 dari harga tertinggi pada bulan Juli 2008. Harga minyak cenderung naik pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 berada pada kisaran US\$66 – 92 per barel. Namun demikian terdapat faktor risiko yang perlu diwaspadai terkait dengan harga minyak ke depan. Faktor risiko tersebut berasal, baik dari sisi permintaan maupun dari

sisi penawaran. Dari sisi permintaan, terutama berasal dari potensi pasar minyak yang diprediksi tetap ketat dalam dua tahun ke depan mengingat pertumbuhan permintaan minyak dunia yang kuat. Sementara dari sisi penawaran berasal dari pertumbuhan produksi yang lambat dari negara-negara non-OPEC. Kondisi ini menyebabkan penarikan cadangan minyak dunia dan permintaan kenaikan produksi dari negara-negara anggota OPEC, yang akan mengurangi surplus kapasitas produksi minyak. Sementara pada saat yang sama gangguan ekspor minyak mentah karena krisis geopolitik di Libya dan negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah lainnya menyebabkan tingginya risiko pasokan minyak. Dalam *Short Term Energy Outlook* yang dirilis bulan April 2011, EIA memproyeksi rata-rata harga minyak mentah WTI pada tahun 2012 sebesar US\$114 per barel, dengan kisaran tertinggi mencapai US\$200 per barel. Di dalam laporan yang sama juga disampaikan probabilitas harga minyak lebih dari US\$120 per barel sebesar 30%. Prakiraan interval harga minyak tahun 2012 dapat dilihat pada **Grafik IV.23**.



Sumber: US Energy Information Administration (EIA), 2011.

Potensi risiko kenaikan tingginya harga minyak juga tercermin dari *market consensus* Bloomberg per April 2011. *Market consensus* Bloomberg memprakirakan harga minyak pada tahun 2012 berada pada kisaran US\$73 – 189 per barel dengan prakiraan rata-rata sebesar US\$100,93 per barel.

Risiko fiskal yang berasal dari kenaikan harga minyak ditransmisikan secara langsung melalui dua sisi pada APBN. Sisi penerimaan melalui kenaikan penerimaan PPh Migas, PNPB migas maupun penerimaan yang berasal dari *Domestic Market Obligation* (DMO) minyak, serta sisi pengeluaran melalui peningkatan subsidi BBM, Subsidi Listrik dan transfer Dana Bagi Hasil ke daerah serta anggaran pendidikan. Secara tidak langsung, risiko fiskal yang berasal dari kenaikan harga minyak ditransmisikan melalui potensi kenaikan ekspektasi inflasi yang menahan upaya penurunan suku bunga, sehingga dapat mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi.

Analisis Sensitivitas. Pengaruh dinamika ekonomi makro terhadap APBN dapat digambarkan dalam suatu analisis sensitivitas. Dalam analisis ini, indikator-indikator ekonomi makro memengaruhi APBN secara langsung terhadap perubahan besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang bermuara pada perubahan besaran defisit APBN dan secara tidak langsung melalui kontribusi BUMN terhadap APBN.

a. Sensitivitas Defisit APBN terhadap Perubahan Asumsi Ekonomi Makro

Risiko fiskal akibat variasi asumsi ekonomi makro dapat digambarkan dalam bentuk analisis sensitivitas parsial terhadap angka *baseline* defisit dalam APBN. Analisis sensitivitas parsial digunakan untuk melihat dampak perubahan atas satu variabel asumsi ekonomi makro terhadap defisit APBN, dengan mengasumsikan variabel asumsi ekonomi makro yang lain tidak berubah (*ceteris paribus*). Analisis sensitivitas tersebut menghasilkan besaran risiko fiskal berupa tambahan defisit yang berpotensi muncul dari variasi asumsi-asumsi variabel ekonomi makro yang digunakan untuk menyusun RAPBN 2012.

b. Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Perubahan harga minyak, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, dan suku bunga dapat menimbulkan dampak pada kinerja keuangan BUMN yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kontribusi BUMN terhadap APBN. Penurunan kontribusi ini merupakan bagian dari risiko fiskal yang bersumber dari BUMN. Untuk mengetahui dampak perubahan variabel ekonomi makro terhadap risiko fiskal BUMN tersebut, pemerintah melakukan pengujian sensitivitas atau *macro stress test* risiko fiskal BUMN dengan menggunakan beberapa indikator risiko fiskal, yaitu: (i) kontribusi bersih BUMN

terhadap APBN, (ii) utang bersih BUMN, dan (iii) kebutuhan pembiayaan bruto BUMN. Pengujian sensitivitas memberikan gambaran tentang (i) magnitude risiko dari BUMN yang memengaruhi APBN, (ii) informasi dini risiko fiskal, dan (iii) gambaran risiko sektoral, sehingga dapat diambil tindakan dini dan antisipasi terhadap gejala tersebut.

2. Risiko Utang Pemerintah Pusat

Sebagai salah satu sumber risiko fiskal yang memiliki pengaruh cukup signifikan, pengelolaan risiko utang harus dilakukan dengan baik dan terukur. Pengelolaan risiko utang diperlukan agar target pembiayaan utang dapat diperoleh dengan biaya yang wajar dan tidak menimbulkan penumpukan beban utang yang tidak terkendali pada masa mendatang.

Secara garis besar, risiko utama yang dihadapi dalam pengelolaan utang antara lain: Risiko keuangan berupa risiko pasar dan risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*). Risiko pasar terdiri dari risiko nilai tukar, risiko tingkat bunga dan risiko likuiditas yang timbul sebagai akibat dari ketidakpastian kondisi pasar keuangan yang dinamis. Risiko pasar akibat perubahan nilai tukar dan tingkat bunga berpotensi menambah beban pembayaran kewajiban utang, baik pada saat ini maupun pada masa mendatang. Risiko nilai tukar terutama berasal dari utang melalui pinjaman luar negeri, sedangkan risiko tingkat bunga terutama bersumber dari pinjaman luar negeri berbasis LIBOR dan SBN berbasis SBI 3 bulan. Risiko pembiayaan kembali disebabkan oleh besarnya pembayaran kewajiban utang pada tahun/periode tertentu.

Risiko operasional merupakan risiko yang antara lain disebabkan oleh kegagalan pada orang, proses bisnis dan sistem di unit terkait, serta risiko yang ditimbulkan oleh aspek legal. Risiko ini antara lain dapat berupa gagal bayar akibat kelalaian manusia atau kegagalan sistem yang berdampak pada penurunan *sovereign credit rating*. Selain itu, risiko ini juga dapat berupa ketidakmampuan sumber daya, sehingga menyebabkan kualitas pengelolaan utang menjadi rendah.

Risiko reputasi kebijakan merupakan risiko penurunan kredibilitas pengelolaan utang dari sudut pandang investor dan *lender* yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kepastian dan konsistensi penerapan strategi pengelolaan utang. Penerapan strategi

pengelolaan utang yang tidak konsisten tersebut, terutama sebagai konsekuensi perubahan kebijakan yang lebih besar.

3. Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Kewajiban kontinjensi pemerintah pusat yang menjadi risiko fiskal bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, kewajiban yang timbul akibat program pensiun dan tabungan hari tua pegawai negeri, kewajiban pemerintah untuk menambahkan modal jika modal beberapa lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), di bawah jumlah yang diatur dalam Undang-Undang, tuntutan hukum kepada pemerintah oleh pihak ketiga, keikutsertaan dalam organisasi dan lembaga keuangan internasional, dan bencana alam.

a. Proyek Pembangunan Infrastruktur

Risiko fiskal yang terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur berasal dari dukungan dan/atau jaminan yang diberikan oleh pemerintah untuk penyediaan infrastruktur. Beberapa proyek yang mendapat dukungan dan/atau jaminan antara lain proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan II, proyek pembangunan jalan tol (jalan tol Trans Jawa dan non-Trans Jawa), proyek percepatan penyediaan air minum, dan proyek pembangunan perkeretaapian Bandara Soekarno-Hatta. Selain dukungan terhadap proyek-proyek infrastruktur tersebut, pemerintah juga memberikan dukungan bagi penyiapan proyek infrastruktur yang diadakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPS) serta mendukung operasionalisasi lembaga-lembaga yang terkait dengan penyediaan infrastruktur.

b. Program Pensiun Pegawai Negeri dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil

Risiko fiskal yang berasal dari program pensiun pegawai negeri terutama berasal dari peningkatan jumlah pembayaran manfaat pensiun dari tahun ke tahun karena sejak tahun anggaran 2009 pendanaan pensiun pegawai negeri seluruhnya (100 persen) menjadi beban APBN. Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran kenaikan pembayaran manfaat pensiun diantaranya, jumlah pegawai negeri yang mencapai batas usia pensiun, meningkatnya gaji pokok pegawai negeri, meningkatnya pensiun pokok pegawai negeri serta adanya pembayaran Dana Kehormatan sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2008 tentang Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia. Berdasarkan asumsi penambahan jumlah pensiunan sebanyak 10 persen dan kenaikan pensiun pokok sebesar 10 persen setiap tahun, jumlah dana APBN yang diperlukan untuk membayar manfaat pensiun diperkirakan akan terus mengalami peningkatan, yakni sebesar Rp51,5 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp59,0 triliun pada tahun 2012.

Sementara itu, risiko fiskal yang berasal dari Program Tunjangan Hari Tua PNS, terutama berasal dari *unfunded past service liability*. PT Taspen mencatat adanya akumulasi *unfunded past service liability* yang timbul akibat kebijakan pemerintah menaikkan gaji pokok PNS sejak tahun 2007 sampai dengan 2010. Pemerintah belum mengakui secara nominal *unfunded past service liability* Program THT PNS. Namun demikian, pemerintah akan bertanggung jawab penuh untuk membayar/melunasi *unfunded past service liability*, baik dibayar secara tunai atau dengan instrumen lain.

c. Sektor Keuangan

Kewajiban kontinjensi pemerintah pada sektor keuangan terutama berasal dari kewajiban pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), jika modal lembaga keuangan tersebut di bawah modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Bank Indonesia. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI, modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2 triliun. Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang mengakibatkan modal Bank Indonesia menjadi berkurang dari

Rp2 triliun, sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan Bank Indonesia dialokasikan untuk cadangan umum guna menutup risiko dimaksud. Dalam hal setelah dilakukan upaya pengalokasian surplus tahun berjalan Bank Indonesia untuk cadangan umum jumlah modal Bank Indonesia masih kurang dari Rp2 triliun, pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain dari ketentuan perundang-undangan di atas, mengenai permodalan Bank Indonesia juga diatur dalam pasal 3 ayat 2 butir (f) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah dan Bank Indonesia Mengenai Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2003, menyatakan bahwa dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia kurang dari 3 persen disepakati bahwa pemerintah membayar *charge* kepada Bank Indonesia sebesar kekurangan yang diperlukan. Namun sebaliknya apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia mencapai di atas 10 persen, maka BI akan memberikan bagian kepada pemerintah atas surplus BI sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan tentang BI.

Saat ini telah dilakukan pembahasan *Asset Liabilities Management* (ALM) antara pemerintah dan BI yang antara lain menyelesaikan klausul tentang rasio modal sebagaimana diatur dalam kesepakatan bersama antara pemerintah dan BI tersebut di atas, dalam hal usulan disepakati dan di setuju oleh DPR, kewajiban pemerintah untuk menutup kekurangan modal BI akan dikembalikan dgn mengacu kepada UU Nomor 3 Tahun 2004 pasal 6 ayat (i) sebagaimana telah disebutkan di atas.

Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah di bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (i) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Modal awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya Rp4 triliun dan sebesar-besarnya Rp8 triliun.

Jumlah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS sejak tanggal 13 Oktober 2008 paling banyak Rp2,0 miliar per nasabah per bank (sebelumnya Rp100 juta), sedangkan bank yang berada dalam penyehatan oleh LPS sejak tanggal 24 November 2008 adalah Bank Mutiara (dahulu Bank Century).

Untuk menjalankan fungsinya, LPS pada awal berdiri tahun 2005 telah diberikan modal awal oleh pemerintah sebesar modal minimal LPS yaitu Rp4,0 triliun. Diperkirakan pada akhir tahun 2011, modal (ekuitas) LPS berkembang menjadi sebesar Rp16,9 triliun. Kebijakan untuk menambah modal LPS pada tahun 2012 ditentukan terutama oleh jumlah klaim atas simpanan layak bayar dan/atau jumlah biaya penyehatan atas bank gagal yang harus dibayar LPS pada 2012. Mengingat bank gagal yang akan dicabut izin usaha oleh BI dan bank gagal yang akan diselamatkan pada tahun 2012 tidak dapat diestimasi, maka kemungkinan pemerintah harus menyediakan dana *charge* untuk LPS belum dapat ditentukan.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebelumnya bernama PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), adalah lembaga keuangan nonbank yang berfungsi mendukung program ekspor nasional melalui penyediaan pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi bagi para eksportir.

LPEI mempunyai ruang gerak pembiayaan yang relatif lebih fleksibel dibandingkan dengan Bank pada umumnya, sehingga dapat menutupi *gap* yang selama ini dihadapi oleh eksportir, yang pada gilirannya mampu mengakselerasi ekspor nasional.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (i) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4,0 triliun. Dalam hal modal LPEI menjadi berkurang dari Rp4,0 triliun, pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku. Pada tahun 2010 pemerintah melakukan penambahan modal pada LPEI sebesar Rp2 triliun untuk mengembangkan ekspor nasional, terutama produk-produk ekspor yang menjadi unggulan maupun yang berpotensi untuk dikembangkan.

Pada tahun 2012, ekuitas LPEI diperkirakan akan mencapai Rp7,41 triliun. Modal tersebut diperkirakan cukup untuk mendukung pemberian pembiayaan ekspor sebesar Rp25,9 triliun, penjaminan sebesar Rp1,8 triliun serta asuransi ekspor sebesar Rp300 miliar. Berdasarkan proyeksi kondisi keuangan LPEI di atas, pemerintah tidak perlu mengalokasikan dana tambahan modal untuk LPEI pada RAPBN 2012.

d. Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Potensi risiko fiskal timbul dari beberapa gugatan perdata yang ditujukan kepada beberapa kementerian/lembaga. Gugatan tersebut jika telah mempunyai kekuatan hukum yang tepat dapat menyebabkan timbulnya pengeluaran negara atau hilangnya kepemilikan aset tanah dan bangunan karena kepemilikannya dipersengketakan.

e. Keanggotaan pada Organisasi dan Lembaga Keuangan Internasional

Keanggotaan Indonesia pada organisasi dan lembaga keuangan internasional dapat menimbulkan risiko fiskal terkait dengan:

- a. Adanya komitmen pemerintah untuk memberikan kontribusi dan penyertaan modal kepada organisasi atau lembaga keuangan internasional tersebut.
- b. Adanya keterlambatan penerbitan peraturan perundang-undangan dalam hal pembayaran kontribusi dan penyertaan modal kepada organisasi atau lembaga keuangan internasional tersebut.

f. Bencana Alam

Indonesia merupakan negara yang terletak pada salah satu titik rawan bencana paling aktif di muka bumi, dengan sering terjadinya gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Data Bencana Indonesia yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa antara tahun 2004 sampai dengan 2010 terjadi 5.014 bencana alam di Indonesia, antara lain banjir (43,1 persen), kekeringan (21,7 persen), angin topan (14,6 persen) dan tanah longsor (12,3 persen).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah meletakkan tanggung jawab pada pundak pemerintah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, diantaranya perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan

bencana dalam APBN. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.

Pada APBN Tahun 2011, pemerintah mengalokasikan dana kontinjensi bencana alam sebesar Rp4,0 triliun. Besaran alokasi ini didasarkan pada pengalaman historis kebutuhan bantuan pemerintah untuk daerah-daerah yang mengalami bencana alam.

Dengan mempertimbangkan naiknya probabilitas kejadian bencana serta meningkatnya nilai kerusakan dan kerugian akibat vulnerabilitas dan perubahan iklim serta laju urbanisasi yang cepat, pemerintah sedang mengkaji kemungkinan meningkatkan keragaman dalam pilihan-pilihan pembiayaan risiko bencana. Pembiayaan risiko bencana yang merupakan kombinasi yang optimal antara risiko yang diretensi (ditanggung langsung) dan yang ditransfer agar kesinambungan fiskal terjaga. Yang menggabungkan antara pengalokasian dana kontinjensi bencana alam, seperti yang dilakukan saat ini, dengan pinjaman siaga dan asuransi untuk menutup risiko bencana yang berbeda tingkat dampak dan frekwensi kejadiannya. Gabungan pembiayaan tersebut diharapkan dapat memberikan ketahanan yang lebih tinggi bagi kesinambungan APBN.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemerintah telah merumuskan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014 yang salah satu programnya adalah peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan risiko bencana. Kegiatan yang menjadi salah satu fokus dari program tersebut adalah pembentukan mekanisme pendanaan risiko bencana (asuransi bencana).

4. Desentralisasi Fiskal

Kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penerapan kebijakan ini selain menghasilkan hal-hal positif sebagaimana yang diharapkan ternyata juga berpotensi menimbulkan risiko fiskal.

Risiko fiskal dari kebijakan desentralisasi fiskal diantaranya bersumber dari kebijakan pemekaran daerah, tunggakan pemerintah daerah atas pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri (*Subsidiary Loan Agreement*) dan Rekening Pinjaman Daerah (RPD), serta pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah, yaitu PBB-Perdesaan dan Perkotaan.